

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PENGUMPULAN DATA

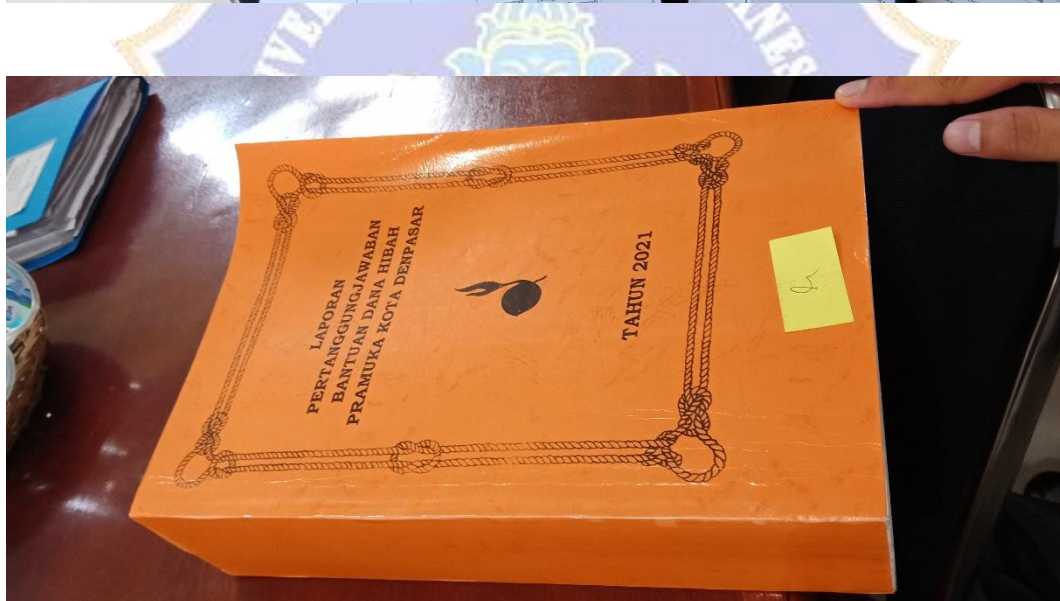
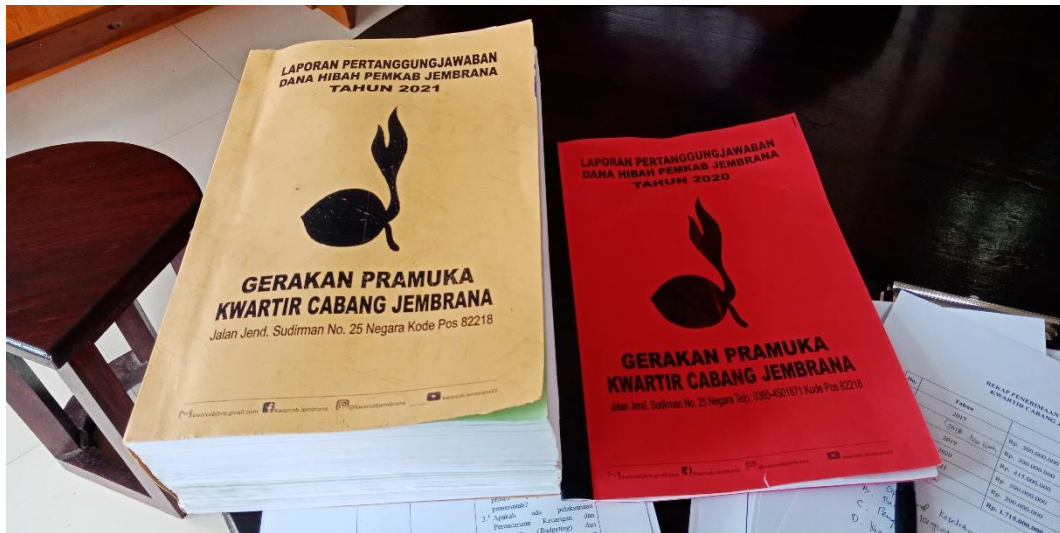


FOTO 1 & 2. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kwartir (Contoh di Jembrana dan Denpasar)

**GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG DENPASAR**
Alamat : Jl. Mawar No. 6 Denpasar , Telp. (0361) 247521

Nomor : 180/22.09-A
Lampiran : 1 Gabung
Prihal : Laporan Dana Hibah Pramuka Tahun Anggaran 2021

Denpasar, 31 Desember 2021

Kepada
Yth. Bapak Walikota Denpasar
CQ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar
di-
Denpasar

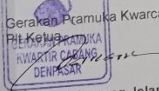
Salam Pramuka,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dimana Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar memperoleh dana hibah sebesar Rp. 902.909.000 (Sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) maka dengan ini dapat kami laporkan penggunaan dana dimaksud sebagai berikut :

- Dana Hibah yang diterima = Rp. 902.909.000,-
- Realisasi Tahun Anggaran 2021 = Rp. 176.480.300,-
- Sisa dana hibah Tahun Anggaran 2021 = Rp. 726.428.700,-

Atas sisa dana hibah Tahun 2021 tersebut telah kami setor ke Kas Daerah Kota Denpasar pada tanggal 28 Desember 2021 (Bukti Setoran Terlampir).

Demikian kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pramuka Tahun 2021 , agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar

Dr. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.

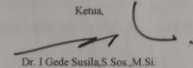
- Inspek tur Kota Denpasar
- Kepala BPKAD Kota Denpasar
- Arsip

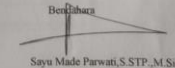
**GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG TABANAN**
Alamat : Perumahan Dinas Kab Tabanan No.5 Br. Wanasara Desa Bongon Tabanan

PERUBAHAN
RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
Bidang Kesekretariatan					
1.	Belanja ATK dan Fotocopy	1	paket	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Biaya Service Sepeda Motor	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Belanja Materai	1	paket	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Rapat-Rapat Koordinasi	1	paket	6.000.000,00	6.000.000,00
JUMLAH					9.500.000,00
Bidang Pembinaan Anggota Muda					
1.	Jambore Nasional di Ciburut	1	paket	78.040.000,00	78.040.000,00
2.	JOTA / JOTI	1	paket	7.220.000,00	7.220.000,00
3.	Raimuna Cabang	1	paket	18.146.000,00	18.146.000,00
4.	Raimuna Daerah	1	paket	19.094.000,00	19.094.000,00
JUMLAH					122.500.000,00
Bidang Organisasi dan Hukum					
1.	Pengaduan Sarung Lapangan	1	Paket	35.100.000,00	35.100.000,00
JUMLAH					35.100.000,00
Bidang Aset, Sarana dan Prasarana					
1.	Rekening Air dan Listrik	1	paket	500.000,00	500.000,00
2.	Biaya Banteng/ ACI	1	paket	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Belanja Bendera SAKA	1	paket	1.500.000,00	1.500.000,00
4.	Belanja Bendera Ranting	1	paket	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Belanja Bendera WOSM	1	buah	150.000,00	150.000,00
6.	Belanja Bendera Tunas Kelapa	1	buah	150.000,00	150.000,00
7.	Belanja Bendera Cabang	1	buah	150.000,00	150.000,00
8.	Belanja Papan Nama Sekretariat	1	buah	2.200.000,00	2.200.000,00
9.	Biaya Pembuatan Jagrag	1	paket	6.900.000,00	6.900.000,00
JUMLAH					16.550.000,00
Bidang SAKA, SAKO dan GUGUS DARMA					
1.	PERANSAKA	1	paket	9.200.000,00	9.200.000,00
2.	PERTAKARA	1	paket	7.150.000,00	7.150.000,00
JUMLAH					16.350.000,00
Jumlah Keseluruhan L.I.I.I.I.I.V				Rp.200.000.000,00	(dua ratus juta rupiah)

Tabanan, 21 Oktober 2022

Ketua, 
Dr. I Gede Susila, S. Sos., M.Si.

Bendahara, 
Sayu Made Parwati, S.STP., M.Si.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan

FOTO 3 & 4. Bagian isi Laporan Pertanggungjawaban Kwartir (Contoh di Denpasar dan Tabanan)



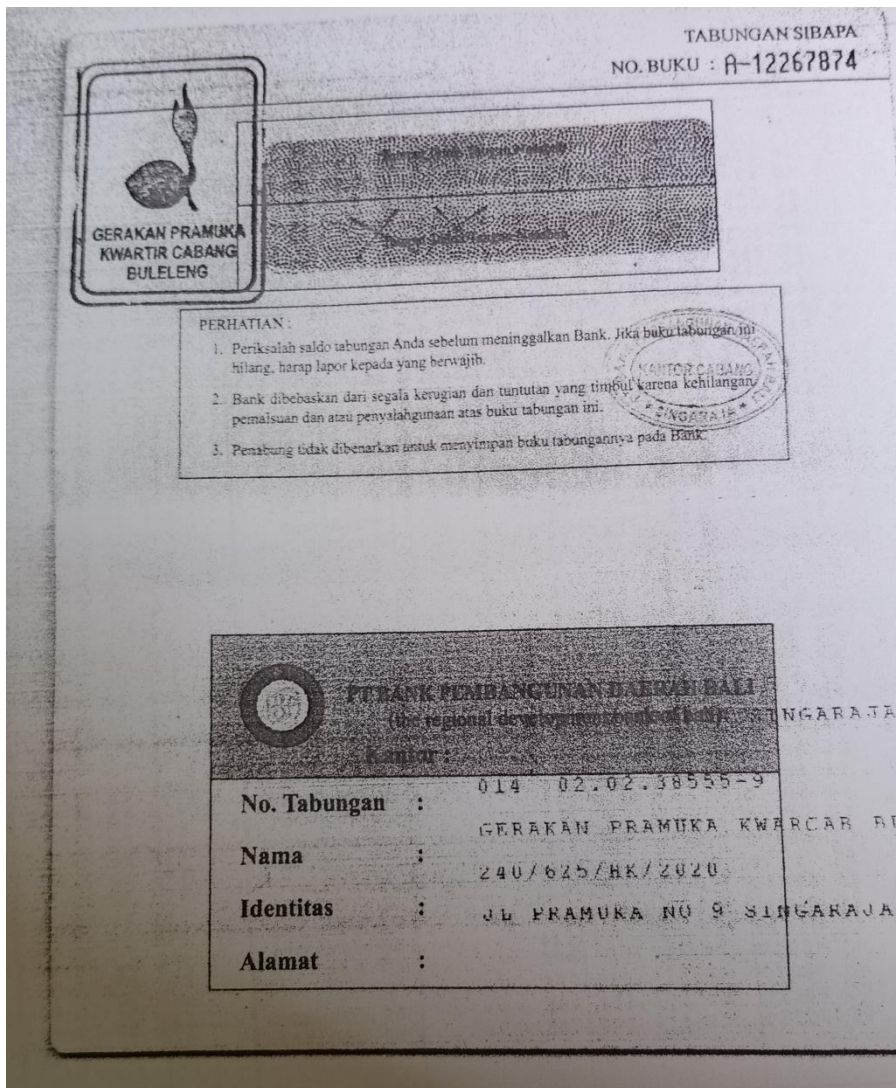


FOTO 5. Gambar depan rekening tabungan kwartir (Contoh di Kwartir Buleleng)

DAERAH BALI
4)

Kepada Yth :
014 02.02.38555-9
GERAKAN PRAMUKA KWARCAB BULELENG

JL PRAMUKA NO 9 SINGARAJA

REKENING KORAN TABUNGAN
PERIODE : 01-12-2021 S/D 31-12-2021

Hal 2 dari

RUPIAH

Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LT
Saldo Sebelumnya			40,094,153.79		
BEND/KWARCAB/2021	O1466.4755	165,000.00 DB	39,929,153.79 CR	O1466	01
BEND/KWARCAB/2021	O1466.4757	313,640.00 DB	39,615,513.79 CR	O1466	01
BEND/KWARCAB/2021	O1466.4758	522,727.00 DB	39,092,786.79 CR	O1466	01
BEND/KWARCAB/2021	O1466.4762	189,375.00 DB	38,903,411.79 CR	O1466	01
A Dec, 2021	BUNGA.-1120	133,958.13 CR	39,037,369.92 CR	O1842	01
TAB Dec, 2021	PAJAK.-1120	26,791.64 DB	39,010,578.28 CR	O1842	01
ec, 2021	A D M.-1130	6,000.00 DB	39,004,578.28 CR	O1842	01
PARPART KEN OP SEK	O1908.5531	1,981,500.00 DB	37,023,078.28 CR	O1908	01
CAB BLL 0140202385559			31,977,453.28 CR	O1908	01
SNAK MASI RAKOT KWARCAB	O1908.5532	5,045,625.00 DB			
140202385559 Ref : 5532					
JK RAKOR KWARCAB BLL	O1908.5533	129,375.00 DB	31,848,078.28 CR	O1908	01
02385559					
LISTRIK, AIR & TELPON BLN	O1471.2285	2,667,814.00 DB	29,180,264.28 CR	O1471	01
021					
BHAN BAKAR KENDARAAN	O1471.2286	1,954,000.00 DB	27,226,264.28 CR	O1471	01
BLN NOP-DES2021					
HARIAN PERJALANAN	O1471.2287	1,750,000.00 DB	25,476,264.28 CR	O1471	01
S BLN NOP-DES2021					
IS AUDIT AKUNTAN PUBLIK	O1908.5821	15,000,000.00 DB	10,476,264.28 CR	O1908	01
H KWARTIR CAB BLL TH 2021					
02385559					
884,158.13					
191,307,647.64					

Setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening ini sudah benar.

Tanggal, 31-December-2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG SINGARAJA

KANTOR CABANG
KUSTUMER MANAJEMEN SE
NRK : 0755

FOTO 6. Rekening koran tabungan kwartir (Contoh di Kwartir Buleleng)

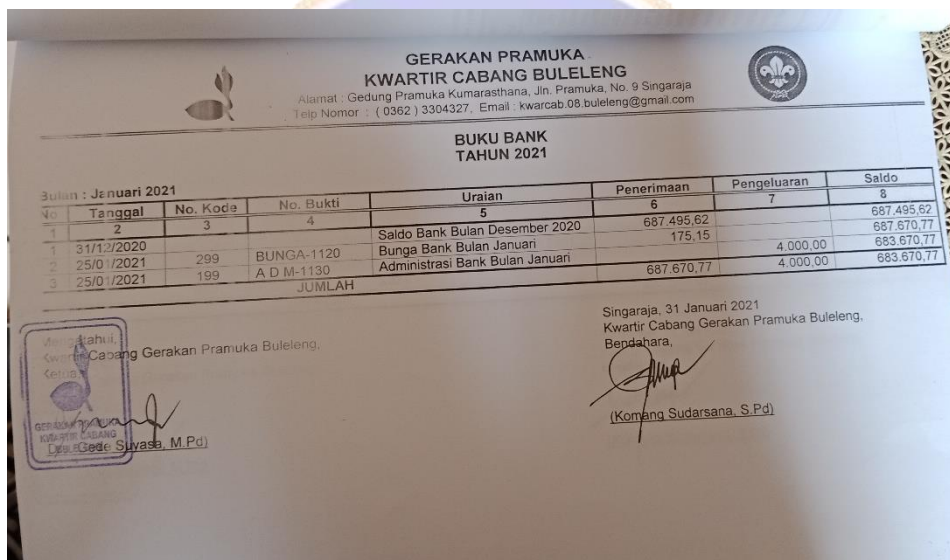
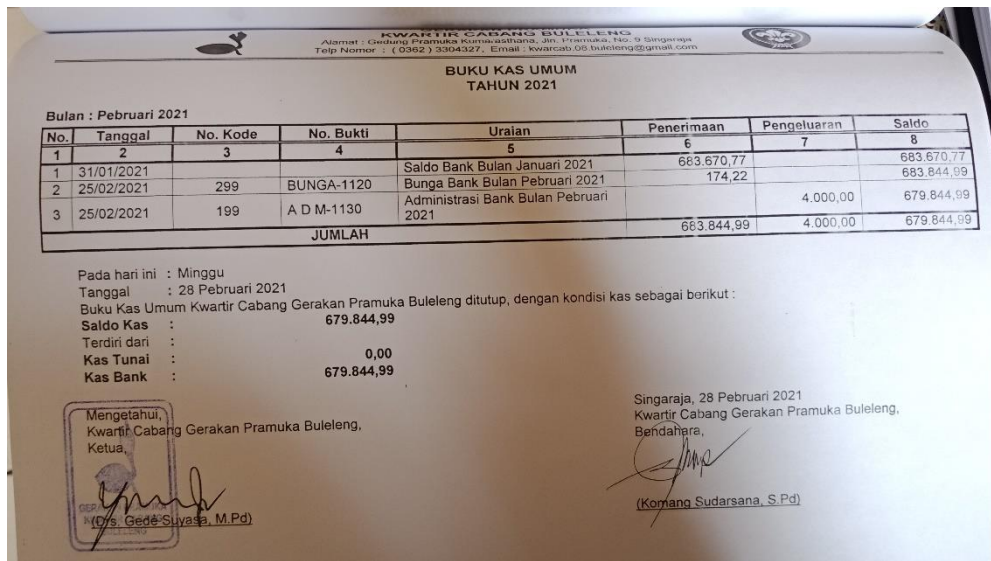


FOTO 7 & 8. Buku Kas Umum dan Buku Bank (Contoh di Kwartir Buleleng)



FOTO 9. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Gianyar bersama dengan I Putu Ardika (staf kwartir)



FOTO 10. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Jembrana bersama dengan I Ketut Sukmayasa, S.Pd (Bendahara Kwarcab Jembrana)



FOTO 11. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Jembrana bersama dengan Ni Nyoman Purnamiati, SE (Ketua LPK Kwarcab Jembrana)



FOTO 12 & 13. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Tabanan bersama dengan Sagung Raka Suartini, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Kwarcab Tabanan) & Ni Ketut Yuliatrini, S.Pd (Bendahara Kwarcab Tabanan)



FOTO 14. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Buleleng bersama dengan I Made Tingkat, S.Pd., M.Si (Ketua Harian Kwardcab Buleleng) & Dra. Ni Nengah Watis, M.Si (Bendahara II Kwardcab Buleleng)





FOTO 15 & 16. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Buleleng bersama dengan Gede Ngurah Omardani, SE., M.M (Ketua LPK Kwarcab Buleleng) & Kadek Supri Budiadnyana, SE (Wakil Ketua LPK Kwarcab Buleleng)



FOTO 17. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Denpasar bersama dengan Drs. I Made Arawan, M.M (Sekretaris Kwarcab Denpasar) & Ni Nyoman Kartini, S.Sos (Staf Kwarcab Denpasar)



FOTO 18. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Klungkung bersama dengan Ngakan Made Kasub Sidan, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Kwarcab Klungkung)



FOTO 19. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Karangasem bersama dengan Ni Wayan Mudiarthi, S.Pd (Bendahara Kwarcab Karangasem)



FOTO 20. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Daerah Bali bersama dengan Nyoman Aryawan, S.E (Sekretaris Kwarda Bali)



FOTO 21. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Badung bersama dengan Dewa Made Muartha,SH (Sekretaris Kwardcab Badung / Kasi Kepemudaan Disdikpora Badung)



FOTO 22. Dokumentasi Wawancara di Kwartir Cabang Bangli bersama dengan I Nyoman Triana Juniawan, S.Pd (Waka VI Kwarcab Bangli) dan Kabag Kepemudaan Disdikpora Kab. Bangli



FOTO 23. Dokumentasi Wawancara dan Konfirmasi Data di Kantor Akuntan Publik (KAP) Arnaya dan Darmayasa (AND) bersama dengan Luh Febry Ariani, S.E, M.Si (Ka. Div Audit)



FOTO 24. Dokumentasi Wawancara dan Konfirmasi Data di Kantor Akuntan Publik (KAP) I Gede Oka (IGO) bersama dengan I Putu Ady Ariartha, S.E., Ak. dan Ni Made Sri Lestari, S.E.,Ak (Supervisi dan Senior Auditor)



LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

I.	Jadwal Wawancara		
1.	Tanggal, hari	:	26 November 2022, Sabtu
2.	Waktu mulai dan selesai	:	10.48 WITA s.d 12.07 WITA
II.	Identitas Informan		
1.	Nama Informan	:	I Ketut Sukmayasa, S.Pd
2.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
3.	Usia	:	28 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Bendahara Kwarcab Jembrana
5.	Pendidikan terakhir	:	S1
III.	Pertanyaan & Jawaban		

Q: Dari sumber dana kan kita tau ada hibah itu, SKPD nya dari mana turunnya? apakah langsung kak?

A: Hibah ini datangnya dari dinas pendidikan, yang menangani itu bidang kepemudaan dan olahraga

Q: Bagaimana proses pengajuan dana hibah pemerintah?

A: Proposal pengajuan hibah, dirancang oleh para pimpinan kwarcab antara lain yaitu bendahara, ketua, wakil ketua, sama sekertaris, kemudian kita mengusulkan pagu keperluan kita dalam setahun melalui dinas pendidikan. Nanti oleh dinas Pendidikan akan diteruskan ke dinas terkait. Setelah itu baru muncul surat yang istilahnya disini kita sebut nota yang sudah diacc terkait jumlah dananya. Misalnya dari kita ngusul misalnya 500 juta, ternyata tahun ini dapat di acnya 300 juta, dan dari sana kita diminta menyesuaikan nominal notanya sesuai jumlah yang di acc dan kemudian di setorkan kembali ke dinas pendidikannya.

Q: Berarti ada proses 2 kali proposal ya kak?

A: Iya. pertama kita pengajuan pagu dengan nominal yang kita perlukan, kemudian menunggu keputusan jumlah nominal yang di acc, dan setelah itu kita sesuaikan dengan berapa nominal yang d acc.

Q: Tadi ada bagian dari bendahara ketua, apakah LPK sudah dilibatkan dalam?

A: Iya, LPK juga

Q: Sejak kapan kwarcab jembrana mendapatkan dana hibah dari pemerintah?

A: Setau saya, dari tahun 2012 atau 2011. Saya kurang tau juga, soalnya saya

baru disini

Q: Berarti memang dari awal mekanisme pemberian dananya sudah langsung hibah ya?

A: Pernah berubah tapi saya lupa tahun persisnya itu seperti dana kegiatan

Q: Berarti dana langsung campuran dari dinas pendidikan ya?

A: Iya, kita perlu apa, kegiatan muspranitra misalnya kita ngusul cuma saya gak tau persisnya tahun berapa.

Q: Tapi untuk 5 tahun terakhir apakah sudah rutin bentuk dananya berupa hibah?

A: Sepertinya dari tahun 2019. 2019, 2020, 2021, 2022 itu murni hibah.

Q: Kalau 2017 dan 2018?

A: 2018 setahun itu kayaknya pernah, dana kegiatan istilahnya, saya gak tau nama kegiatannya. Tapi 2017 itu kayaknya hibah. Antara itu kemungkinan ya. Saya kan baru disini.

Q: Untuk besaran dana apakah pengeluaran sebenarnya itu dapat digunakan seluruhnya atau kira kira melebihi dari dana hibah yang telah diperoleh?

A: Begini, kalau pengeluaran itu pasti melebihi lah dana hibah karena ada beberapa event kegiatan itu anggaplah tahun kemarin ada jamboree jadi ada iuran pesertanya jadi iuran peserta itu dibantu oleh dana sekolah seperti uang bekal mereka, seragam mereka itu gak di tanggung sama kwarcab. Sekolah yang bayar tetapi dana camping, makan, dan minum itu di tanggung oleh dana hibah. Tapi kan tetap di pelaporan itu 200 selebihnya itu dari sekolah yang mendanai.

Q: Berarti selama ini belum sempat ada dana yang tersisa sehingga dikembalikan?

A: Belum ada. Tidak pernah ada pengembalian.

Q: Kalau untuk alur atau proses pengelolaan dana hibahnya bagaimana kak? Proses pencairannya, kemudian kalau penggunaannya digunakan untuk beli ini beli itu, apa yang harus dilakukan atau nota nota yang seperti itu?

A: Jadi untuk dana hibah itu kan keluarnya tidak tentu ya pertama apakah triwulan I, triwulan II itu tidak tentu.

Q: Berarti kwarcab memiliki rekening penampungan sendiri. BPD ya?

A: Kwarcab memiliki rekening penampungan sendiri, untuk sekarang ini ada di bank BRI, namun dulu sempet juga di bank BPD. Yang jelas saya ambil yang tahun ini ya, itu kemarin cair itu bulan Agustus/juli langsung masuk ke rekening kwarcab, nanti kwarcab dalam pengambilan itu mengesuaikan dengan pengeluaran bulan sebelumnya, karena itu kan cairnya pertengahan tahun, apa yang sudah dikeluarkan itu ditarik uangnya. Kemudian yang akan dilakukan kegiatan kita tarik secukupnya.

- Q: Berarti untuk proses pencairan dananya tidak sekaligus ya?
A: Tidak, penarikannya bertahap
- Q: Misalnya di 2021 dapat dana 200 juta, nah kemudian berapa kali itu pencairan nya kak?
A: Bisa sampai 2-3 kali penarikan
- Q: Maksudnya masuk rekening itu kak?
A: Oh sekalian, langsung 200 juta, Cuma kita saja yang beberapa kali narik gitu sesuai dengan keperluan kwarcab. Sekali dia cair. Kemudian nanti terakhir baru istilahnya kumpul SPJ gitu, dan nota itu sekalian kita ngumpul sesuai dengan hibah yang dicairkan.
- Q: Apakah ada pelaksanaan perencanaan keuangan kak atau anggaran di kwarcab jembrana?
A: Selama ini belum
- Q: Kalau penyusunan pagu itu berdasarkan apa ya? Untuk mencapai misalnya di 2021 kemarin kan menyusun proposal tentunya kita menganggarkan apa yang harus kita anggarakan itu?
A: Jadi yang pertama itu, kita melihat historis oprasional kwarcab dulu, dalam setahun sebelumnya itu habis berapa, misanya tahun lalu 60 sampai 70 juta misalnya, kemudian melihat program kerja, kan ada program kerja yang dalam setahun ini apa yang tingkat cabang, daerah dan nasional dari situ baru bisa menyusun berapa keperluan kwarcab
- Q: Diperkirakan berarti?
A: Ya diperkirakan
- Q: Kemudian pengendalian keuangan atau control itu bagaimana dilakukan disini kak berdasarkan angggaran yang sudah ditetapkan itu atau misalnya berapa dana yang di dianggarkan untuk kegiatan kemudian itu dikontrol sehingga mengurangi untuk kelebihan pemakaian atau kekurangan?
A: Jadi disini itu karena dana hibah, misalnya dipagu misalnya 1 kegiatan itu 25 juta jadi dari 1 kegiatan itu tetap disusun proposal RAB nanti anggaran yang dicairkan untuk kegiatan sesuai dengan pagu yang sudah ada. 25 juta ya cukup 25 juta gitu. Jadi gak bisa melebihi.
- Q: Untuk menentukan perkegiatan nih kak, misalnya ada kegiatan sekarang RAIDA atau mungkin nanti kegiatan musyawarah atau gimana pasti menggunakan dana. Untuk menentukan oh kegiatan ini keluarkan dana sekian sekian siapa yang menentukan?
A: Pimpinan, jadi pimpinan itu waka yang membidangi, di Kwarcab ini terdapat beberapa waka, kalau itu memang waka bina muda, jadi waka bina muda itu berkordinasi dengan sekretaris dan bendahara berapa si pagu untuk kegiatan musyawarah, musyawarah penegak misalnya, jadi misalnya nilainya sekian accnya sesuai dengan pagu yang ada.

- Q: Berarti prosesnya itu dari kegiatan siapa yang membidangi itu mengusulkan dulu ke pimpinan, nanti pimpinan berkordinasi, menyetujui berapa baru langsung di setujui?
- A: Iya, tapi terakhir goalnya tetap lapor ke ka kwarcab. Iya terakhir dah, jadi kita ada deal berapa dari segi anggaran baru kita lapor, untuk kegiatan ini kita aggarannya sekian terakhir kan ka kwarcab kan waktunya agak susah kalau kita ajak diskusi seperti menyusun anggaran dan sebagainya.
- Q: Kalau secara awan diperusahaan itu kita kan mengenal pelaporan keuangan kak ya, kalau pramuka itu tidak mungkin kita samakan dengan perusahaan privat. Kita kan mengikutnya pemerintah pasti ada realisasi anggaran seperti itu kan ada pelaporan operasional biasanya. Kalau di kwarcab sendiri jenis pelaporan keuangan apa saja yang sudah dimiliki kak?
- A: Pertama Laporan Operasional tetap itu ada dari Gaji, ATK, pemeliharaan. Kemudian yang kedua itu ada Laporan pengadaan, pengadaan barang dan jasa kemudian pengadaan kegiatan itu biasanya.
- Q: Kalau untuk pembuatan laporan-laporan ini tentunya kan harus mengikuti teknis atau pembuatan laporan, darimana terknisnya atau apakah ada mengikuti kiblat kak?
- A: Ngikut dinas pendidikan
- Q: Formatnya itu apakah sudah ada?
- A: iya yang sudah ada, format SPJ, format laporan kegiatan .
- Q: Selanjutnya kak, kalau yang harus kita pertanggungjawabkan itu kan dana hibah saja ke dinas pendidikan, tetapi kan ada dana – dana diluar hibah itu yang kita gunakan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti yang kakak sebutkan tadi ada iuran anggota untuk kegiatan itu yang tentunya ditalangi oleh sekolah karena kan masing-masing ininya berasal dari sekolah masing-masing. Itu bagaimana proses pencatatannya di kwarcab?
- A: Jadi untuk dana tersebut, pertama kan dari kwarcab yang minta bantuan sekolah, jadi kita bersurat secara administrasi mohon sekolah membiayai berapa item misalnya jadi setelah disepakati kita dari kwarcab itu menyusun bukti penerimaan, jadi berapa kita nerima karena uang itu kan dikembalikan kepada masing masing sekolah jadi kita ada bukti penerimaan dari siswa tapi tetap disimpan juga di kwarcab . uang yang kita minta itu nanti dikebalikan kepada perwakilan sekolah tersebut untuk mengikuti kegiatan.
- Q: Istilahnya ini bentuknya uang saku?
- A: Uang saku, pemakaian baju, misalkan baju untuk mereka. Selain itu misalkan pembayaran bis untuk kegiatan jambore jadi itu uang kembali kepada mereka untuk membayar tiket bis. Cuma ditampungnya aja di kwarcab sementara gitu.
- Q: Berarti untuk itu ada laporan yang tersimpan disini ya?
- A: Ada. Tercatat dia

Q: Kalau menurut kak sukma, sumber dana selain dari hibah , dari peserta ada dana lain gak sumbangan gitu atau penggalian dana.

A: Gak pernah kalau itu

Q: Berarti kalau mengadakan kegiatan itu belum pernah ngadain penggalian dana ya?

A: Belakangan ini belum, kalau dulu hibah kecil mungkin tahun 2012 gitu Mungkin ada, mereka membentuk panitia mereka yang langsung melaksanakan mereka juga yang langsung mempertanggungjawabkan. Kalau kwarcab yang membuat gak pernah, ada panitia di bawah kwarcab terkait panitia kegiatan. Itu dulu. Tapi sekarang gak pernah.

Q: Kalau disini perkegiatan terpisah gak laporan pertanggungjawabannya dengan laporan kwarcab secara keseluruhan?

A: Terpisah. Jadi ada laporan kegiatan jamboree nasional misalnya, itu terpisah. Cuma secara global itu tercatat di laporan kwarcab, nilai pagunya berapa misalnya 50 juta nilainya 50 juta, Cuma secara terinci itu ada di laporan jamboree nasional.

Q: Berarti misalnya di laporan khusus jamnas gitu kan dia menggunakan dari dana hibah sekian dari dana sekolah sekian kan, dirinci semua kan pada saat pelaporan besarnya di kwarcab itu?

A: Gini, kita khusus punya pengeluaran kwarcab khusus untuk jamboree dulu, terus kalau yang dari sekolah itu tidak masuk dalam laporan besar. Tersendiri dia, karena sekolah kan sudah meng-SPJkan dia ke kami. Jadi tidak mungkin kami laporkan ke pemerintah juga, dia sudah melaporkan secara instansi bahwa dia sudah mendanai kegiatan jamboree nasional berapa gitu.

Q: Berarti kalau secara dari jenis laporan di tanyakan secara keseluruhan secara nyatanya ini berapa sebenarnya sih, apa menggunakan pengeluaran ini kan kita secara parsial terpisah hibah sekian, sekolah sekian. Tapi kalau di kegiatan kedepannya ada hal seperti itu? Kita kan secara parsial juga mengetahui pengeluarannya

A: Tetap terpisah dia.

Q: Disini ada badan usaha kak?

A: Badan usahanya ada, Cuma ini kan 2021 baru lagi terbentuk itu belum jalan, karena belum terSKkan belum ada SKnya. Yang sebelum sebelumnya ada, kepengurusan sebelumnya ada sementara ini yang terbaru belum.

Q: Bentuknya jual beli ?

A: Yang sebelumnya itu menjual ATK pramuka, seragam, dan kain. Itu kepengurusan kemarin 2017-2021. Yang sekarang ini belum, belum ada pergerakan.

Q: Kalau koperasi kak?

- A: Gak punya, memang tidak punya di kwarcab. Badan usaha saja.
- Q: Mulai dibentuk LPK mulai periode kapan kak?
- A: Saya kurang tau, di periode sebelumnya ada atau tidak, yang jelas sekarang ada dari tahun 2021 akhir.
- Q: Saya mau tanya, bagaimana proses pemilihan LPKnya itu kak? Kriterianya bagaimana?
- A: Setau saya termasuk kepengurusan kwarcab sama mekanismenya itu dipilih sama tim permatur saat muscab. Dia yang menentukan tiba-tiba dapat SK gitu aja.
- Q: Tanpa melalui penghubungan sebelumnya?
- A: Kalau LPK saya tidak tau, kalau saya sendiri itu tiba-tiba dapat SK.
- Q: Tiba-tiba? Kebetulan kakak menerima, kalau misalnya menolak tidak boleh menolak?
- A: Kalau ditawarkan ya gak bersedia lah jadi bendahara, seperti itu.
- Q: Kalau yang bendahara kan tentunya memiliki kompetensilah di bidang pengelolaan keuangan, kalau LPK itu ini kan khusus, unik menurut saya satu organisasi ini ada dibentuk untuk mengawasi
- A: Mungkin itu ada dari peraturan terbaru saya gak pernah baca juga yang jelas mungkin ada petunjuknya sekarang biar ada LPK gitu.
- Q: Kalau dari saya si ngulik - ngulik aturannya itu dari AD ART 2017 sudah ada itu dinyatakan LPK itu.
- A: Mungkin, saya gak pernah baca itu. Cuma karena kita kan baru ya, pada bulan oktober atau november baru kita SK 2021-2026. Bertemu langsung membahas bersama LPK kita belum pernah.
- Q: Jadi sebarnya LPK itu belum aktif kak ya?
- A: Belum
- Q: Belum mulai terjun kan? Harusnya kejaannya itu kan pada saat kak sukma selaku pengurus itu menyusun pertanggungjawaban LPK itu memeriksa. Seharusnya begitu kan prosesnya?
- A: Iya harusnya begitu.
- Q: Berarti sementara ini LPKnya belum ikut terjun ya?
- A: Karena kepengurusan istilahnya ngayah memang gitu, siapa yang sempat dia menyusun yang penting pelaporan selesai. Yang terakhir 2021 yang kita laporkan itu saya selaku bendahara bersama pimpinan, kalau LPK kayaknya tidak terlibat. Karena kita kan dikejar sama staf untuk pengumpulan, seperti itu.
- Q: Untuk dari dana hibah itu ada alokasikan untuk gaji?
- A: Ada, Gaji staf, kita punya staf 1 orang itu dibayar oleh dana hibah.

- Q: Itu di alokasikan khusus ya?
A: Memang khusus operasional, gajinya per bulan. Nominal mengikuti standar kontrak kabupaten.
- Q: Jumlah stafnya hanya 1 orang ya?
A: Iya 1 orang, kalau tidak ada staf susah kerjanya. Kemarin di bagian staf kak Eri cuma sekarang karena dia balik ke SD jadi Cuma 1. Dia itu dulu dari Pemkab di bayarnya. Dinas pendidikan yang bayarnya dia Cuma tugasnya disini. Dari 2022 dia ke SD jadi sekarang Cuma 1 orang aja, itu di bayar oleh kwarda 1 orang.
- Q: Apa kira-kira yang menyebabkan LPK itu belum bekerja kak? Katanya sudah dilantik ya?
A: Belum, pengurus pun belum dilantik.
- Q: Harusnya yang melantik itu dari kwarda?
A: Iya kwarda. Karena, panjang si ceritanya kalau belum dilantik, ya kan harus sinkron kwarda bisa Bupatinya ada ka kwarcabnya bisa juga gitu. Kemarin itu rencananya Agustus, karena HUT kabupaten jadi bupati susah jadi gak jadi pelantikannya sampai sekarang si belum ada wacana lagi, tapi SK kan sudah.
- Q: Yang penting kan Sknya sudah ya kak namun secara formal pelantikannya belum.
A: Iya belum, tapi sudah si buat karena bupatinya kalau tidak ada bupati kan tidak bisa dilanjutkan. Dia dilantik dulu jadi kamabicab baru bupati ngelantik kita, karena bupatinya juga baru.
- Q: Berarti selama ini belum?
A: Kalau kepengurusan yang baru ini belum, belum ada pelantikan.
- Q: Berarti secara ini belum ada, maksudnya kan berarti dilantik dulu kamabicabnya oleh kwarda.
A: Bupati dulu jadi kamabicab, baru Bupati melantik ka kwarcab. Itu memang alurnya itu di waktu yang sama, langsung pengurus dan badan kelengkapan
- Q: Berarti tidak ada proses pelantikan secara parsial ya kak?
A: Belum, yang jelas saat ini sampai akhir tahun ini pasti gak bisa, karena sudah akhir tahun tidak mungkin juga lagi membuat kegiatan. Mudah-mudahan tahun depan.
- Q: Kalau misalnya tahun depan dilantik berarti kepengurusannya mundur lagi?
A: Gak, kan mengikuti SKnya.
- Q: Brarti itu simbolis saja ya?
A: Simbolis, pelantikannya saja belum. Tapi komunikasi antar pimpinan tetap jalan .

- Q: Berarti dari kak sukma, masalah kordinasi saja ya, makanya LPKnya belum bertugas?
- A: Belum bisa eksien dia, nanti sama Ibu Pur pun ditanya kayaknya gak tau persis tentang LPK ini, karena kita kumpul membahas ini belum pernah.
- Q: Saya kan fokusnya pada pengelolaan keuangan dan keunikan LPK ya kak ya? Kalau selama ini di buleleng sudah bekerja LPKnya itu bertugas memeriksa laporan keuangan, kinerja juga, kalau misalnya ada sesuatu yang dibenahi atau sesuatu yang salah dalam pengelolaan, LPK memberikan masukan kepada ini. Kalau selama ini adakah kekeliruan dalam pengelolaan keuangan atau dalam SPJ atau dalam laporan pertanggungjawaban yang disetorkan kesana itu kemudian siapa yang mengkoreksi itu kak?
- A: Kalau kita lihat tahun kemarin si gak ada jadi lancar. Pernah tahun berapa gitu ya jadi saya belum pimpinan, pernah ada kekeliruan karena keterlambatan bukan kekeliruan dalam membuat laporannya. Terlambat dalam ngumpul saja.
- Q: Berarti melewati batas waktu ya? Maksimal menyetorkan LPJ untuk pertanggungjawaban hibah kedinas itu?
- A: Maret awal
- Q: Maret awal tahun berikutnya?
- A: Iya
- Q: Berarti lewat dari maret waktu itu ya?
- A: Iya, saya lupa tahun berapa itu, sudah lama 2017 apa 2018 pokoknya sekitar tahun-tahun itu. Tapi setelah itu gak pernah terlambat, paling gak akhir januari atau awal february sudah ngumpul.
- Q: Yang menyebabkan keterlambatan itu?
- A: Bukti kayak absensi, lampir lampiran itu, yang SPJnya yang nota-nota sudah lengkap. Sebagai pendukungnya. Sebagai pendukung kegiatan itu ada. Kegiatan ngundang 200 orang yang datang 75 nyari lagi sekian itu yang agak lama. Kendala seperti itu si kebanyakan ke pendukungnya yang menyebabkan keterlambatan, seperti dokumentasi. Tapi setelah itu gak pernah, lancar lah ngumpul.
- Q: Dari laporan hibah yang sudah berjalan kira kira kak sukma tau pernah diaudit oleh BPK di dinas?
- A: Pasti diaudit, makanya kan dinas ngejar kita gitu, ngejar biar cepat ngumpul, Cuma mengenai hasil audit, karena mungkin gak ada kekeliruan kita gak di panggil lagi gitu. Tetap di periksa kok sama BPK. Makanya kita di kejar kan oleh dinas untuk cepat ngumpul. Karena itu kemarin kita sempat terlambat ngumpul sampai kita harus bertemu sama BPK gitu.
- Q: Apakah disini sudah memiliki NPWP? Atau masih bergabung sama dinas?
- A: Punya NPWP sendiri, Cuma tidak tertib pajak. Dari beberapa tahun terakhir

gak gini, saya gak tau juga ya persisnya, katanya “Hibah Gak Usah” gitu.

Q: Kalau di gianyar dia punya sekarang, kalau apa-apa NPWPnya di gabung katanya sama dinasny, gak tau juga, nnti tyang kumpulkan

A: Dinasnya gak pernah juga memeriksa kita bayar atau gak bayar pajaknya

Q: Kalau di SPJ itu bukannya ditentukan pengeluaran sekian pakai materai sekian gitu, gak ada ya? Kalau misalnya jasa atau bentuknya ini kena PPH 22 kena berapa gitu, harusnya gitu kak?

A: Iya harusnya gitu, tapi kita tidak. Nominal akhirnya berapa gitu

Q: Catering gitu misalnya gak ada pajaknya gitu ya? Pas pemeriksaan tidak pernah gini?

A: Mungkin karena sumber hibahnya, tidak ngerti juga. Pokoknya kalau ngurus itu kan ribet ya. Kalau suber daya yang kita punya artinya stafnya lebih gitu lo nah pasti yakin saya bisa nanganin, 1 orang tentang bantu di keuangan bendahara gitu tapi karena stafnya Cuma 1 susah. Tapi mudah mudahan nanti bisa tertib ya.

Q: Menurut kak sukma laporan keuangan yang disusun saat ini sudah memenuhi prosedur yang sesuai?

A: Karena saya kan memakai pedoman tahun sebelumnya jadi tidak ada permasalahan.

Q: Apakah ada laporan tentang anggaran, realisasi yang terkait afisiensi itu kak, Dari pagu biasanya sekian nanti pengeluaran yang digunakan sekian, nanti ada persentase penyerapan anggaran itu ada?

A: Rata-Rata semua terpakai, habis. Karena ini kan sifatnya hibah ya sebenarnya kurang sangat fleksibel jadi pagu yang sudah disusun itu bisa dioper dialokasikan ke yang lain. Pokoknya sisa sekian apa si yang perlu, oh kita pengadaan aja. Kita beli pengadaan, jadi habis gitu.

Q: Kalau gedung tempat berdiri ini punya pemda kak ya?

A: Iya, kita cuma makai saja.

Q: Ada asset hibah tidak kira-kira yang dimiliki oleh kwarcab mibil misalnya atau barang diatas 2 jutaan?

A: Ada, computer, AC, Meja, Kursi. Kita kan kosongan. Kalau listrik dibayar sama pemda kita Cuma perawatan, mati lampu ya kita beli. Barang- barang di dalam ini dana hibah yang kita pakai, meja kursi, computer, AC, Kipas banyak si itu tenda semua dari hibah.

Q: Apakah disini memiliki data inventaris?

A: Tidak. Saat ini tidak ada. Tapi ada waka yang mengelola, waka bagian asset ada, Cuma kalau itu ditanya mengenai jumlah inventaris real itu mungkin gak bisa. Tapi beberapa disini bisa dilihat bisa dibuat.

Q: Berdasarkan pengadaan sebelumnya itu berarti tidak ada kak ya? Ini sudah

- rusak itu udah hilang
- A: tidak, tidak ada
- Q: Berarti dilaporan pertanggungjawaban akhir semua pengurus itu tidak ada dilampirin asset ?
- A: Tidak, tidak pernah melaporkan asset kwarcab.
- Q: Secara intern saja kak sukma ini kepengurusan dari tahun 2021 sampai 5 tahun kedepan. Dari kepengurusan sebelumnya kan ada musyawarah pertanggungjawaban over hand over dari pengurus sebelumnya ke yang baru, itu kan harus dilampirkan apa saja yang ada disini. itu tidak pernah?
- A: Tidak pernah. Tidak pernah ada laporan itu
- Q: Nanti kalau misalnya ACnya di copot gimana kak?
- A: Tidak ya, karena kita kan sudah tau semua ya, barang barang fisik itu kita kan pengurus tau semua, Cuma kalau laporan itu tidak ada
- Q: Kalau dari berjalan ini kan tidak, kalau dari pengurus sebelumnya ada pengadaan computer 5 yang kak sukma liat Cuma 2, kalau gitu kemana itu, kita kan tidak bisa menuntut
- A: Belum ada laporan itu, tapi harusnya ada memang. Cuma kayaknya pengurusnya tidak sempet buat. Susah memang untuk organisasi begini, Kita kan punya induk sendiri untuk kerjanya itu.
- Q: Kalau misalnya saya bukan orang keuangan sulit menyatakan apakah sudah menerapkan akuntabilitas atau belum, akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban kak ya. Biasanya secara umum Akuntabilitas itu ada 2 Horizontal dan Vertikal, kalau Vertikal pertanggungjawaban dari bawah keatasnya ke dinas pendidikan, kalau ke kwarda ada tidak kak?
- A: Tidak pernah
- Q: Berarti sampai dinas pendidikan, tidak ada hubungannya keuangan keungannya sama kwarda ya?
- A: tidak ada
- Q: Kalau horizontal kak?
- A: Bersama pengurus sudah terlaksana dalam musyawarah berapa kita dapat, berapa saja untuk kegiatannya, itu sudah.
- Q: Kira-kira pas musyawarah itu siapa saja yang diundang untuk hadir?
- A: Pengurus semuanya sama dinas paling dinas pendidikan bagian keuangannya saja, perwakilan ranting. Kalau di ranting yang diundang ka kwaran kalau ada musyawarah pasti diundang.
- Q: Pelaksanaanya setiap pergantian pengurus saja apa setiap tahun?
- A: Setiap tahun di raker. Di rapat kerja itu ada laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan kegiatan sebelumnya, tetap ada.

- Q: Kalau di rapat kerja yang menjadi pemimpin rapat itu siapa kak,?
A: Ka Kwarcab langsung, waka-waka gitu.
- Q: Berarti tidak ada presidium khusus independan yang memimpin rapat?
A: Tidak ada
- Q: Kalau pelantikan pengurus gitu baru membentuk presidium ya kak?
A: Kalau pelantikan iya, membentuk permatur 5 tahun sekali. Itu saja, makanya kaget tiba-tiba disini
- Q: Kak sukma selaku bendahara kan berkecimpung langsung dengan uangnya dan pertanggungjawabannya ya, kira-kira apa yang menjadi kendala atau hambatan kak sukma dalam mengelolanya?
A: Kendalanya , melengkapi bukti pendukung itu setelah kegiatan seperti absen, dokumentasi kan sudah ada cuma kita saja yang menyusun dokumentasi itu. Yang paling berat itu saja, daftar hadir tidak memenuhi, kita undang 200 Cuma 70 datang.
- Q: Berarti sebenarnya untuk pertanggungjawaban hibah itu kita sudah menganggarkan peserta atau anggota sekian?
A: Iya
- Q: Kalau misalnya pesertanya kurang kita harus memertanggungjawabkan penuh lagi?
A: iya betul, karena kita kan mengundang, ada surat undangan, kita ngundang dari sana kita ngitung berapa masuk konsumsi. Kalau pengadaan yang lain gampang, artinya nyewa sound misalnya kan sudah jelas gitu tidak ngaruh sama undangan.
- Q: Kalau misalnya kurang berarti di koreksi gitu?
A: Kita yang melengkapi biar dapat 200 nama tanda tangan gitu kan tidak mungkin kita, kemarin itu yang diundangan 200 yang datang 75 atau 100, untuk melengkapi lagi 100 nya itu ya kita harus melengkapinya. Itu saja. Yang kerja kan saya sama staf saja kalau pengurus yang lain habis kegiatan ya selesai gitu
- Q: Disini kan ada Ka Kwarcab ada ketua harian tidak?
A: Tidak ada, Ka Kwarcab, Waka ada 6, sekertaris cabang dan bendahara cabang. Itu saja
- Q: Posisi sekretaris cabang dengan bendahara cabang itu sejajar apa sekretaris diatasnya kak?
A: Kalau secara structural sepertinya sejajar sekarang. Kalau dulu kayak beberapa itu harus report ke sekretaris. Dulu bendahara itu di bawah waka bidang keuangan, dibawah itu ada bendahara. Tapi sekarang ada bendahara, ada sekretaris ada waka.
- Q: Berarti kak sukma itu dibidang lini tanggungjawabnya itu kemana?

Langsung tembus ke ka kwarcab?

A: Tidak, tapi tetap ke sekretaris dulu baru ke waka. Sekretaris tau, baru ke waka, kordinasi yang berjalan. Kita sekretaris bendahara kan sejajar Cuma kita di bawah waka saja.

Q: Berarti kendalanya memang bukti saja kak ya? Tidak ada kendala yang lain ya? Kira-kira sempet tidak kwarcab itu minus kak?

A: Pernah si, karena kalau kita tidak mampu kita tidak buat gitu.

Q: Apakah diakhir tahun itu pasti ada sisa saldo?

A: Iya pasti, Kalau ada saldo kita akan belanjakan pengadaan apa perlu dibeli seperti itu.

Q: Kalau di pertanggungjawaban kita tentu perlu pertanggungjawaban secara LPJ kan dilampirkan dengan fotocopy rekening tabungan, tentunya benar tidak di rekening pada akhir tahun itu habis apa masih ada dana begitu ?

A: Ya, harus habis.

Q: Habis 0?

A: Tidak saldo pengendapan saja.

Q: Harus seperti itu ya prosesnya?

A: Iya

Q: Kalau secara real itu secara keseluruhan itu ada sisa saldo kan, apakah ada sisa dana yang dimiliki oleh kwarcab?

A: Tidak pernah ada sisa saldo

Q: Kalau ke hibah tidak, kalau di kwarcab akhir tahun itu?

A: Kalau internal, itu pasti ada ya, tpi itu sedikit sampai di internal kwarcab saja tidak pernah sampai keluar

Q: Seperti kak sukma tau di UKM dulu kan gitu kalau ada dapat dari itu habisin, tentu kita ada mungut dari peserta, lomba gini, itu kan masih ada sisa saldo ya, itu maksudnya?

A: Kalau ada pendaftaran kita tidak pernah, pasti dananya habis, tapi kalau ada kegiatan tertentu anggaplah pengadaan gitu, pengadaan makan minum jadi ada saldo, di akhir itu pasti ada saldo, Cuma dilaporannya habis kita hanya untuk internal saja di januari sampai hibah cair. Tapi itu tak pernah terekpose kemana mana berapa nominalnya tidak pernah, istralahnya kas pribadi lah kas intern

Q: Berarti sebenarnya kas intern itu bersumber dari dana lain hibah, apa hibah?

A: Hibah.

Q: Untuk bertahan hidup gitu lah sekiranya ya,

A: Iya, kalau tidak gitu januari kita tidak bisa bayar gaji staf itu lah pasti yang gede kan, kita tidak bisa membeli ATK dan sebagainya kan tetap ada

kegiatan, surat masuk, surat keluar. Tapi itu jangan di ekpose.

Q: Kalau misalnya kita di pramuka kan tau seperti itu. Pertanggungjawaban kesana kan memang harus nol (0) harus habis. Soalnya saya disini nanti menyajikan, saya berkiblatnya selain ke ADART turunannya kan ada arah kebijakan, arah kebijakan itu ditentukan sumber-sumber dana kegiatan pramuka tu darimana saja, dari pemerintah, dana publik, Intern, sehingga nanti kalau dari hibah saja, kalau kwarcab lain bilang dari hibah saja tidak mungkin bisa berkegiatan kalau dari hibah saja. Pasti lah ada dana internnya, ada dari publiknya walaupun publiknya kecil, mungkin ada sumbangan kan

A: Saat ini tidak pernah ada sumbangan, gitu si kalau di jembrana.

Q: Soalnya uniknya disini itu, aturan pemerintah itu kan hibah hanya boleh diberikan sekali kepada yayasan kepada apapun itu organisasi pemerintah atau dilingkungan pemerintah itu, namun terkecualikan itu kalau tidak salah 4, PMI, Pramuka, KONI itu boleh menerima hibah secara terus menerus seperti setahun , sebenarnya hibah itu kan sekali saja, kalau koperasi kan hibah modal sekali saja. Kalau misalnya hibah ini berhenti bagaimana kira kira kak?

A: Kita tidak jalan, kalau ikut partisipasi kegiatan tapi dananya dari pribadi peserta jadinya. Siapa yang mau ikut silakan.

Q: Kalau nanti Rainas kan kira-kira besar pengeluaran itu kak dari mana?

A: Dari Hibah di cover, katanya si sekarang ini dapatnya 300 kayaknya apa 400 tahun depan ini. Tapi sebisa mungkin kita cover dari ini. Karena kegiatan ini kan ngak terlalu banyak kita ya di jembrana, tidak terlalu banyak kegiatan pramukanya. Jadi kalau ada event-event seperti itu ya kita support semuanya. Sama seperti Rainas sebelumnya kita support dari dana kwarcab semua, tidak ada iuran.

Q: Dari sekolah?

A: Tidak ada, kalau bekel ya silakan dari sekolah, tapi dari kwarcab support semua itu. untuk apa lagi danany? Staf Cuma 1 juga. Kemarin kan kecil itu Cuma 200 2021 ada jamboree, terpaksa minta kesekolah untuk membiayai mereka. Untuk tiket, uang saku, seragam menyesuaikan berapa sekolah memberi. Tapi konsumsi, latihan, campu itu dari kita

Q: Transport juga ya?

A: Transport disamping dari kita ya dari sekolah juga kemarin, biaya latihan semua dari kita, karnaval itu semua dari kita. Yang berkaitan langsung dengan transport dia, baju untuk dia itu datangnya dari uang sekolah. karena paling kecil kan diliat dari 5 tahun terakhir itu 200 yang paling kecil, sekarang lagi 200 kecil sekali. Ngangsehang gitu lo angkih angkih

Q: 2019 besar ya? Covidnya kapan ya 2019?

A: 2019-2020. Yang 2020 dapatnya paling gede, ini habis untuk sembako saja, kita kan tidak ada kegiatan.

- Q: Untuk dana bantuan, penanggulangan covid ya?
- A: Dana ini digunakan untuk penanggulangan covid, sembako yang paling banyak. Kan tidak boleh ada kegiatan dan uang juga sudah cair. Sekarang uangnya sedikit kegiatannya banyak, makanya ya ngepres ngpresin lah. Makanya kalau kita tidak mampu membiayai kita tidak ikut. Ini saja Raimuna kan ada dari sekolah biayanya yang sekarang ini. Yang dari cabang hanya DKC Cabang yang bayar kan lumayan DKCnya ikut kita yang bayarin.
- Q: Kalau ranting itu bekerja atau tidak kak?
- A: Tidak. Secara administrasi ada, istilahnya ngundang tetap ada dia, tapi buat kegiatan dia tidak. Untuk dijembrana, kegiatan dia tidak. Kalau kepengurusan ada, kita ngirim surat ke dia suruh ngirim surat ke sekolah jalan kok tetap. Artinya meneruskan informasi tetap jalan tapi untuk eksien kegiatan itu tidak. Cukup 1 di kwarcab saja buat kegiatan, kalau masing masing ranting tu tidak ada kegiatan. Kalau dulu kita support dana kita ngasi bantuan dari hibah yang kita punya kita kasi ke ranting pernah, ke saka kita pernah ngasi 2019/2020 apa 2018, kita ngasi tapi kemarin. Kalau sekarang tidak.
- Q: Berarti proses secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di kwartir cabang itu berhenti cukup di cabang gitu kak ya? Tidak ada mewajibkan atau mengharuskan laporan pertanggungjawaban yang kita bentuk dilaporkan di kwarda ya?
- A: Tidak ada
- Q: Berarti keuangan itu terpisah, kalau kegiatan?
- A: Laporan ke kwarda apa saja kegiatannya.
- Q: Saya kira ada reportnya, soalnya kan otoritas yang melantik yang menaungi cabang itu kan daerah, saya kira memang ada kewajiban pelaporan itu
- A: Tidak, cukup sampai di pemda saja selesai. Itu yang kemarin, kalau yang ini saya tidak tau apakah ngirim atau tidak. Tapi tahun kemarin itu sampai di pemda saja.

I. Jadwal Wawancara			
1.	Tanggal, hari	:	26 November 2022, Sabtu
2.	Waktu mulai dan selesai	:	15.48 WITA s.d 17.00 WITA
II. Identitas Informan			
1.	Nama Informan	:	Ni Nyoman Purnamiati, SE
2.	Jenis kelamin	:	Perempuan

3.	Usia	:	52 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Ketua LPK Kwardcab Jembrana
5.	Pendidikan terakhir	:	S1 Ekonomi Manajemen
III. Pertanyaan & Jawaban			

Q: Bagaimana upaya ibu dalam mengembangkan LPK yang masih belum berjalan?

A: Baik saya lanjutkan lagi terkait bagaimana upaya kami, dimana keberadaan lembaga LPK di jembrana ini merupakan hal atau tugas yang baru bagi kami, sehingga saya itu tidak mau melakukan tugas tanpa ada pegangan atau koridor-koridor yang diberikan yang diberikan kepada saya secara jelas. Nah untuk hal itu upaya kami selaku ketua LPK kami berusaha dan berupaya melakukan kordinasi dan konsultasi ke kwarda dalam hal ini Bapak Made Rentin kalau tidak salah itu saya hubungi beberapa kali beliau, mungkin beliau sangat sibuk ya sehingga tidak merespon daripada apa yang kami tanyakan kami maksudkan untuk konsultasi dengan beliau sehingga saya melakukan altrnatif lain lagi, yang saya dapatkan bahwa saya melakukan kordinasi baik dengan saya selaku ketua pramuka masih di kwartir ranting mendoyo apakah diperbolehkan juga sebagai ketua LPK. Itu yang merupakan pertanyaan kami, biar tidak salah kami memegang dua jabatan. Kemudian saya dapat kordinasi dengan kak surya selaku sekretaris kwardcab disini dinyatakan berjalan saja, karena disini kan ada situasional namanya. Nah kenapa ada Situasional yaitu 1 kemungkinan belum adanya pelantikan. Belum adanya musra, tapi tugas dan fungsi lembaga LPK sudah ditetapkan di 2021 kemarin. Maka dari itu saya sudah mulai mengadakan pertemuan dan mengadakan komunikasi tetapi secara online bersama pengurus-pengurus LPK lain bahwa kita menyusun rencana kerja dulu. Jadi 1 sudah plong saya jalan, oh jalan saya karena situasionalnya katanya saya bisa melaksanakan tuagas saya selaku ketua LPK . Pertama saya menyusun rencana kerja, apa yang dilakukan terkait dengan tugas tugas kami di LPK. Kemudian yang kedua kami akan merencanakan untuk membuat semacam tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi dari kelembagaan, ini sedang proses ya dik. Tugas pokok dan fungsi debagai lembaga LPK di Kwardcab. Yang ketiga kami akan melakukan tugas tugas kami yang sudah disampaikan pada saat rapat kemarin itu ada disampaikan itu salah satu tugas kami adalah memeriksa penggunaan anggaran di kwardcab. Semua yang akan kami lakukan itu, satu (1) hasil pemeriksaan itu berupa kuesioner nanti itu semua dalam proses. Kami akan membuat itu dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan pertanyaan yang akan kami ajukan kepada pengurus di kwardcab yang manapun yang memegang dan menggunkan anggaran kwardcab. Itu sasaran kami . kemudian kami akan melakukan, ini rencana kami juga, kami akan melakukan pemeriksaan keuangan atau tugas kami secara berkala. Secara berkala itu maksud kami per semester ya.

Q: Iya betul bu, di buleleng juga bekerjanya persemester, bahkan ada periode 3 bulannya.

- A: Iya benar biar tidak menumpuk pekerjaannya. Saya sementara ini, kesepakatan kami di pemeriksakan keuangannya secara berkala dilakukan per semester begitu. Ini semua masih dalam proses masih kami dalam susunan. Masih kami susun semua rencana kerja yang akan kami lakukan kemudian.
- Q: Dapat saya simpulkan berarti LPK di jembrana ini masih tahap persiapan. Mengenai LPK berarti dapat sementara saya simpulkan LPK di Jembrana ini masih prosen persiapan. Karena baru 2021 di bentuk itupun belum dilantik, sehingga belum memiliki acuan yang jelas dalam bekerja. Tadi ibu sempat menyebutkan sebagai ketua kwatir ranting mendoyo, itu nanti saya juga akan coba menanyakan terkait dengan independensi, jadi kan sebenarnya tidak boleh dari salah satu pengurus yang ada dalam keluarga pramuka yang menjadi LPK, misalkan boleh mungkin jabatan yang secara struktur itu di dalamnya ada tidak boleh masuk sebagai lembaga LPK.
- A: Saya kasi tambahan penjelasan sedikit ya, terkait dengan itu kembali saya sampaikan bahwa seperti yang di sampaikan oleh kak surya itu ada situasional. Kemarin kan kepengurusan di kwarcab, Pak Made Kembang Artawan selaku ka kwarcab mengundurkan diri, kemudian baru ada pemillihan lagi kan, nah disini juga mungkin belum ada pelantikan dan lain sebagainya, kita menunggu juga untuk melakukan musran kemarin saya sudah minta petunjuk karena sudah habisnya sebanarnya. Masa saya sebagai ka kwaran itu sudah habis sebenarnya, tapi kami hampir keseluruh daripada kwaran belum melakukan musran
- Q: Untuk periode berakhirnya tahun berapa harusnya ibu?
- A: Pada tahun 2021, makanya terpilih menjadi ketua LPK, kami disini sudah kemarin melakukan penjajagan kebebrapa sekolah atau ke Gudep itu untuk kita sama-sama melakukan musran. Untuk persiapan melakukan musran bersama. Mengingat juga dari DKR-DKR yang saya ajak kemarin itu semua sudah nyebar ada yang keluar negeri, ada di Denpasar juga, sekarang kebetulan juga ketua DKC juga dari Mendoyo, jadi nanti bisa kita sharing terkait dengan kegiatan selanjutnya.
- Q: Sebenarnya kalau dari kwartir kwartir yang lain itu kan sebelum pergantian pengurus diadakan musyawarah cabang kalau dicabang, di ranting mursan kan seperti itu. Disana disetiap 5 tahun perganting pengurus kan membentuk tim permatur untuk memilih, untuk LPK ini ibu waktu ikut atau tidak dalam proses pemilihan atau sekiranya ibu bisa memaparkan apasi sekiranya yang menjadi indikator seseorang itu diajukan untuk menjadi calon anggota LPK?
- A: Kalau kemarin itu memang dilaksanakan pemilihan ketua LPK itu secara permatur itu dalam rapat saat itu yang memang menjadi kandidat waktu itu terpilih adalah saya dan juga kak surya. Jadi disana para peserta rapat membuat semacam pilingan untuk memilih siapa terbanyak. Begitu prosesnya
- Q: Sebelum ibu diajukan adakah kalau misalnya dibeberapa kwartir itu harus memenuhi syarat setidaknya minimal sarjana ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum begitu misalnya?

A: Iya S1 disana

Q: Ya tentunya saya juga berpikir tidak mungkin disaat pemilihan itu yang dipilih itu bukan yang tidak mengetahui tentang bagaimana pengelolaan keuangan. Seperti itu

A: Begini, tolak ukur di pilihnya teman teman itu, kita kan tidak mengajukan diri, siapa yang di jadikan ini dengan kriteria begini begini begini. Kriteria atau tolak ukurnya yang kemarin itu Pertama Sudah berpengalaman menjadi pengurus di kepramukaan. Kalau kak surya kan sudah luar biasa beliau. Kalau saya kan pengalam di mandoyo saja, tapi kalau itu kan masuk kriteria. Kedua pendidikannya minimal S1 paling tidak mendekati ekonomi begitulah. Kebetulan saya Ekonomi.

Q: Sebagian besar masih S.Pd ibu?

A: Kalau di pramuka kan begitu ya, padahal kalau saya tanya-tanya kemarin itu, pramuka itu memang khusus untuk pendidik dan siswa gitu, ternyata tidak. Kalau saya lihat semua komponen itu masuk ke pramuka jadinya. Namanya yang beda-beda begitu

Q: Ibu dari segi pendidikan dan pengalaman ibu ya? Untuk saat ini LPK kan masih tahap proses berarti belum pernah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan. Apa yang menyebabkan LPK belum bekerja sampai saat ini sementara yang dari tadi yang ibu paparkan itu karena belum ada kordinasi yang jelas terkait dengan bagaimana LPK itu harus bekerja, standar acuan begitu bu?

A: Iya, yang menjadi dasar kami melakukan pemeriksaan itu belum megang saya gitu

Q: Untuk sementara apakah ibu mengetahui sumber sumber kuangan di kwartir?

A: Salah satunya itu hibah

Q: Apakah LPK sudah pernah mengadakan rapat bersama dengan anggota?

A: Saya kemarin pernah mengadakannya secara online. Cuma saya kalau surat itu saya engga cuma lewat online akan tetapi kita bertemu bersama gitu dengan anggota.

Q: Berarti LPK belum sempat terjun/bertatap muka dengan pengurus kwartir?

A: Belum, kita rapat internal sudah, rapat internal untuk menyusun yang tadi.

Q: Menurut ibu sedikit saya mungkin karena ibu belum melakukan pemeriksaan. Ibu memahami tentang akuntabilitas, akuntabilitas itu pertanggungjawaban. Menurut ibu dengan bulumnya bekerja LPK jadi kan kita mundur nggih belum ada LPK masuk ke kwartir, apakah kwartir itu sudah menerapkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban?

A: Sudah, Cuma disini membutuhkan pengawasan lebih kalau di tambah dengan tugas tugas LPK yang nantinya masuk, sehingga disana ada transparansi lebih terjamin begitulah. Saya setuju adanya LPK saya siap

bekerja untuk transparansi dari laporan-laporan keuangan yang telah dibuat. Karena salah satu fungsinya kan pengawasan.

Q: Saya disini tidak mengetahui LPK itu kan lembaga diluar di strukturnya ada garis putus –putus tidak terpengaruh oleh bawahan manapu dia bekerja diluar itu untuk mengawasi pengelolaan keuangan kwartir. Jadi ini unik, LPK kan tidak di gaji atau entah nanti mau di gaji atau gimana. Apa yang mendasari ibu kok mau menjadi LPK padahal itu tidak di gaji?

A: Pertama saya sampaikan sesuai dengan struktur tadi. Struktur LPK itu kan adik sebut tadi garis putus-putus, itu betul garis kordinasi Karena kami LPK itu SKnya ada di kwarda dan yang melantik juga kwarda jadi kami itu akan memantau ataupun mengawasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran-anggaran yang ada di kwarcab. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi apa sih yang mendorong kan tidak ada gaji dan lain-lain terkait dengan kegiatan kok mau, begitu ya ngayah namanya.

Q: Sebenarnya LPK itu di gaji atau tidak?

A: Tidak, setau saya tidak ya, dari saya menjadi ketua kwaran juga tidak ada bayaran-bayaran begitu

Q: Tadi kak sukma juga saya Tanya untuk hibahnya bagaimana apakah ada dikeluarkan untuk penggajian kak? Di jawab ada Cuma untuk staf kita saja.

A: Kalau di saya pribadinya saya tidak ada bayaran dan lain-lain terkait dengan itu kemungkinan juga semacam reward pun tidak ada. Cuma pastinya kalau kita bekerja kurang bagus pasti ada sorotan ya. Nah apa yang mendorong saya sampai saya bekerja seperti ini, itu kembali ke pribadi saya, saya suka melakukan hal ini, karena rasanya apa yang saya miliki itu bermanfaat. Ini bukan omong kosong saja ya, ini memang betul seperti itu, saya siap melakukan pekerjaan ini karena terdorong memang dari hati saya sendiri, bahwa apa sih yang bisa saya lakukan yang berfungsi untuk masyarakat luas paling tidak walaupun saya tidak memegang jabatan tertinggi seperti sekda, seperti bupati dan seabainya tapi apa yang bisa saya lakukan. Kita lahir sebagai manusia dan apa yang bisa saya lakukan sedikit saja ya tenaga pikiran apa yang kita miliki ini bermanfaat yang positif. Itu dorongan memang dari hati saya. Saya bersyukur bertemu disini di pramuka. Jadi apa yang saya inginkan untuk mewujudkan itu disini saya kerjakan begitu.

Q: Jadi dari awal sudah muncul loyalitasnya terhadap organisasi pramuka nggih?

A: Betul

Q: Sementara ini selain kordinasi kendala apa lagi yang sekiranya dihadapi bu?

A: Nah itu, ini mungkin saya mohon maaf sebelumnya kepada jajaran ya tapi apa yang saya sampaikan disini kan merupakan unek-unek yang memang perlu diperhatikan. Saya inginnya kendala kendala saya itu sulitnya kordinasi ke atasan. Itu 1 sulit saya kordinasi ke atasan, sehingga apa yang mendorong saya untuk bekerja itu jadi terhambat itu kendalanya sulitnya kordinasi komunikasi dengan atasan. Kenapa saya bilang atasan, karena

beliau yang membidangi dan mewenangi.

Q: Atasan yang ibu maksud disini siapa ibu?

A: Disini 1 semisal saya agak kesulitan, seperti kemarin kemarin saya melakukan kegiatan apa yang mau saya laksanakan saya mau audensi dengan kwarcab, ka kwarcab ternyata saya sudah datang beramai ramai kesini beliau pada saat itu tidak bisa bertemu, begitu. Mungkin beliau sangat sibuk. Cuma itulah kendalanya, Cuma nanti ada dihari apa kami dikasi waktu. Itu yang mohon saya sebenarnya karena apa yang dilakukan seperti apa yang adik katakan tadi tugas dan kewajiban yang kita lakukan disini tidak ada terbayarkan apa-apa. Cuma kami mohonkan perhatikanlah untuk kami audensi berikanlah kami waktu untuk bisa kami ada yang menuntun ada yang membimbing karena beliau beliau kan jelas dengan pengalaman dan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah kan sudah luar biasa jadi beliau yang akan bisa menuntun kami di daerah. Kemudian yang ke 2 kendala kami juga terkait dengan komunikasi kordinasi dengan kwarda. Itu tidak di tanggapi saya ngirim wa, saya menelfon.

Q: Mohon maaf ibu, disemua cabang ini saya sudah oke, di kwarda ini terus di tunda-tunda disuruh Desember saya tidak mengerti apa sebenarnya

A: Saya sempat berfikir begini ini memang serius ya pembentukan pramuka ini memang mau serius apa cuma sekedar ada, pramuka sekedar ada lembaga, sekedar penuh sekedar dipenuhilah untuk A untuk B begitu, kalau kami di pilih begitu kami itu bekerja sesuai dengan aturan maunya. Tetapi itulah kendalanya, memang sulit kordinasi komunikasi, mudah-mudahan dengan ini nantinya akan terbuka hati mereka untuk bisa merangkul kami dalam komunikasi dan konsultasi.

Q: Sementara ini yang melatar belakang penelitian saya adalah membaca dari turunan AD ART terbaru. Munculnya arah kebijakan pramuka sampai tahun 2045 ibu, jadi kita sementara ini masih berada di periode ke-2000 berapa sampai 2024 kalau tidak salah masih sisa 2 tahun. Disana di Visi Misinya ada semua lembaga yang diamankan dalam undang undang no 12 tahun 2010 itu Gerakan pramuka dan AD ART itu harus di bentuk dan di optimalkan itu salah satunya, sementara LPK ini belum dioptimalkan, sudah dibentuk tapi belum dioptimalkan. Apakah menurut pendapat ibu LPK ini hanya dianggap sekedar di bentuk saja untuk memenuhi dan belum di butuhkan sebenarnya, bagaimana menurut pendapat ibu?

A: Kalau idealnya itu sebenarnya dibutuhkan

Q: Tapi dengan apa yang sudah terjadi apakah sudah efektif?

A: Mudah-mudahan kedepannya ini semua saling bersinergi, itu harapan saya

Q: Berarti, bukan berarti LPK itu diabaikan begitu bu ya?

A: Bukan hanya sekedar di bentuk saja gitu

Q: Sementara kan saya tampung dulu kendala saat ini yang terbesar adalah masalah komunikasi dan kordinasi, nanti juga akan saya carikan solusi tapi

ibu apakah ada pendapat apa solusi terbaik untuk menghadapi atau membenahi kurangnya komunikasi dan kordinasi tadi bu?

A: Iya salah satunya memang begitu, karena kita sama-sama belajar, untuk memenuhi dari perundang undangan yang ada. Kita sama sama melangkah satu visi misilah di pramuka dan di LPK jadi saling bersinergi antara kwarda, kwarcab, LPK disini kalau memerlukan kordinasi atau sebagainya untuk mendapatkan kami bimbingan tuntunan supaya ada di buka lah waktu untuk kami. Harapan ya masih, bukan solusinya ya, solusinya harus tetap nelfon terus dan sabar

Q: Jadi harapan saya juga seharusnya ka kwarda itu sebagai pembimbing karena dia berada hirarki diatas cabang. Seharusnya LPK dulu harus di optimalkan

A: Diadakan pelatihan mungkin ya? Diadakan pelatihan penambahan kompetensi di bidang LPK. Itu si permohonan saya. Saya siap dilatih untuk LPK tapi panggilan tidak ada

Q: Mohon maaf ibu, Sementara di daerah juga belum. Malah yang dibuleleng yang ini

A: Nah itu, saya maunya kesana nanya-nanya di buleleng gimana sampai bisa jalan gitu. Apa sih yang di pegang untuk melakukan pemeriksaan

Q: Apa mungkin karena beliau salah satu pegawai di inspektorat, karena di inspektorat memang bagian pemeriksaan tetapi sebenarnya di AD ART itu kan dijelaskan ada 3 nggih sumber dananya. Dari pemerintah sumbangan yang berupa hibah, kemudian dana intern, dari sumbangan juga bisa diterima, tapi sementara ini yang dari intern dan dari publik itu sangat minim dan bahkan hampir 100% semuanya dari hibah saja yang dikelola, jadi sesuai dengan arah kebijakan tersebut sebenarnya organisasi ini tidak bisa berjalan kalau pemerintah berhenti memberikan dana sokongannya apa yang harus dikerjakan, berarti kan harus di genjot masing-masing kwartir itu harus memiliki dana sendiri salah satunya adalah pembentukan badan usaha. Selama ini badan usaha yang ada di kwartir jembrana kan baru penggalian dana, jual beli atribut kepramukaan saja ibu, bagaimana menurut ibu memberikan solusi, sebenarnya LPK kan tidak hanya memeriksa tapi juga memberikan masukan agar lebih baik

A: Betul ya, betul sekali. Terkait itu kalau menurut saya disinilah merupakan bagaimana seni kita di dalam mengelola suatu kelembagaan khususnya pramuka karena kita ketahui kita tidak bisa hanya patokan atau berpedoman dengan uang yang datang berupa hibah tapi disini kita harus memiliki suatu upaya apa upaya-upaya kita yang akan kita lakukan supaya organisasi ini berjalan sesuai dengan program yang sudah dibuat atau dirancang. Salah satu contoh misalkan seperti saya di kwaran contohnya ini ya. Di kwaran saya kemarin itu sampai bisa melakukan kegiatan dengan menghadirkan sampai 500 orang hadir padahal pada saat itu keadaan keuangan sangat minim apa yang saya lakukan, saya melakukan 1 membuat proposal melakukan pendekatan-pendekatan atau kerjasama dengan beberapa instansi terkait yang nantinya bisa mendukung kegiatan kepramukaan, itu yang saya

lakukan. Kemudian selanjutnya saya mendekati pengusaha-pengusaha yang mendukung juga kegiatan kepramukaan. Link-link saya ini yang akan menghasilkan uang, uang itu yang akan bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan di kepramukaan. Jadi kita tidak melulu hanya menunggu hibah. Kita punya inisiatif apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana diluar daripada hibah sehingga program ataupun kita memiliki inisiatif baru terkait dengan kegiatan misalnya di bulan Agustus, biar tidak baru tidak ada uang tidak berjalan. Seperti contoh saya itu membantu lansia, membantu lansia di bulan Agustus itu sebelum pandemi, beberapa lansia saya hadirkan untuk mendapatkan vitamin gratis, pemeriksaan gratis dari dokter-dokter, mendapatkan suntikan gratis, itu yang saya lakukan, kalau mengingat dana hibah, apa mungkin kegiatan itu di lakukan? gak kan?, nah itulah maka apa yang harus kita miliki kita mencari solusi terkait dengan penggalan dana

Q: Sementara ini untuk kwaran ada di bawahnya itu mendapatkan danakah dari cabang ibu?

A: Dapat, kalau tidak salah jumlahnya sekitar 2 juta

Q: Per kwaran? Untuk melakukan sebuah kegiatan?

A: Iya, pertahun. Harapan dari saya ini nantinya utamanya kendala dari masing-masing LPK terangkum nanti disini, kita sama-sama mengetahui kebutuhan kita itu seperti apa, kalau semisal itu perlu melakukan pendidikan dan pelatihan sebagai LPK kami siap mengikuti itu apabila di panggil oleh kwarda.

I. Jadwal Wawancara	
1.	Tanggal, hari : 27 November 2022, Minggu
2.	Waktu mulai dan selesai : 15.02 WITA s.d 16.17 WITA
II. Identitas Informan	
1.	Nama Informan : 1. Sagung Raka Suartini, S.Pd., M.Pd. 2. Ni Ketut Yuliatrini, S.Pd
2	Jenis kelamin : 1. Perempuan 2. Perempuan
3.	Usia : 1. 61 Tahun 2. 53 Tahun
4.	Jabatan/kwartir : 1. Sekretaris Kwarcab Tabanan 2. Bendahara Kwarcab Tabanan

5.	Pendidikan terakhir	:	1. S2 2. S1
III. Pertanyaan & Jawaban			

Q: Apakah di kwartir ada ketua harian kak dan kedudukan sekretaris apakah sejajar dengan bendahara untuk pertanggungjawabannya?

A: Untuk Waka terdiri dari 11 Waka atau 11 komisi dibawahnya itu ada sekretaris dan bendahara sejajar.

Q: Berarti untuk nanti bendahara pertanggungjawabannya langsung ke ka kwarcab apa melalui kordinasi sekretaris dulu baru ke ka kwarcab?

A: Bersamaan kita. Jadi menyusun RAB kan saya yang bawa program kerja, program tahunan atau program jangka pendeknya. Jadi kita eksekusi dananya itu bekerjasama dengan bendahara membuat RABnya sesuai dengan dana yang kita peroleh. Jadi bersamaan.

Q: Soalnya laporannya juga jadi 1

A: LPJ dan Laporan kegiatan jadi 1. laporan pertanggungjawaban di atasnya, laporan kegiatan dengan bukti-bukti fisik dan foto sebagainya di bawahnya jadi 1

Q: untuk sumber dana yang diperoleh oleh kwartir ini kan hibah ya? Dari tahun berapa yang diperoleh berupa hibah itu bu?

A: Iya, memang kepengurusan sebelumnya sudah dana hibah, waktu 5 tahun sebelum waktu saya jadi bendahara juga sudah dana hibah.

Q: berarti sudah lama ya bu?

A: Lama, hibah PEMDA

Q: Berarti tidak ada dana campuran dari dinas pendidikan?

A: Tidak ada, hibah murni tapi turunnya melalui dinas pendidikan

Q: Di badung itu kan dinas pendidikan, Cuma anggarannya nyampur di dalam tidak langsung hibah di kelola oleh kwartir.

A: kita mengusulkan RAB sesuai dengan permohonan kita lewat dinas pendidikan termasuk lembaga-lembaga yang lain, lewat dinas pendidikan diajukan kepada pemerintah daerah nanti turunnya ke rekening pramuka, tidak ke rekening dinas pendidikan.

Q: Rekeningnya itu rekening BPD apa rekening bank lain bu?

A: Rekening BPD

Q: Untuk besaran dana hibah tahun ini berapa bu?

A: 200juta pas

Q: Ini tahun 2022 nggih?

A: Iya, ini tahun berjalan

Q: Periode turunnya itu 1 tahun dari januari sampai desember ya bu?

A: Ya 1 tahun anggaran dari Januari sampai Desember.

Q: Mungkin bisa dibantu menjelaskan alur atau proses pengajuan dari pertama kan ada proposal penyusunan anggaran, kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran itu?

A: Kita rapat kerja dulu dengan semua struktur komisi-komisi jadi masing-masing jadi masing-masing komisi itu membuat dia program, apa programnya dia itu yang dimasukkan langsung dengan berapa jumlah dananya, langsung dengan RABnya masing-masing komisi mengajukan kita bahas di dalam rapat kerja. Sekarang kan ada ancer-ancer berapa kira-kira kita dikasi dana dengarkan dulu berapa kira-kira, biasanya kita berpatokan pada tahun sebelumnya. Kita pilih memang kegiatan yang harus di lakukan di sesuaikan apa saja si kegiatannya, berapa jumlah dananya kita ajukan, tapi kadang-kadang kita ajukan misalnya 300 biasanya tidak sampai segitu turunnya, kita membuat proposal biasanya melebihi dari dana yang akan diturunkan.

Q: Seperti proposal di kwartir-kwartir yang lain memang mengajukan terlebih dahulu kemudian di revisi berapa dananya habis itu ada revisi anggaran sesuai dengan dana yang turun begitu nggh bu?

A: Iya, di suruh kita buat RPH namanya kalau sudah disetujui misalnya berapa dapat yang di anggarkan misalnya 200 gitu kayak sekarang langsung di suruh buat RPHnya yang mana aja yang akan di dana untuk 200 itu. Dalam hal ini kita juga harus melihat progressnya kwarnas kwarda, yang nyambung-nyambung ini biasanya biar kita tidak kekurangan dana, kita harus ngintip dari hasil munas itu, kalau sekarang kan gampang di youtube kita buka terutama yang berkelanjutan kayak jamboree, jamboree cabang, jamboree daerah, jamboree nasional, raimuna juga. Jadi kita intip itu dana yang kita dapatkan kita sesuaikan. Biasanya itu si yang pasti-pasti saja kita anggarkan. Habis itu baru mengikuti dan menyesuaikan dengan komisi-komisi yang lain sisanya. Jadi kita utamakan dulu yang kita memang harus berangkat, kegiatan yang harus kita ikuti

Q: Di pengelolaan yang kemarin itu ada kira-kira kan sudah di sudah ditetapkan untuk kegiatan A B sekian di RPH itu, tapi melenceng sedikit dari kuota, itu bagaimana ibu?

A: Banyak yang melencen, banyak sekali, contoh seperti raimuna ini kita sesuai dengan program nasional kemarin mencontoh jamboree 1 regu PA dan 1 regu PI sekarang 3 Umpi PA dan 3 Umpi PI kan lagi 4 Umpi lagi 4 x 8 Orang. Jadi kita menyesuaikan, kan ada di perubahan, boleh editnya di perubahan

Q: Berarti tidak saklek harus mengikuti itu, jadi anggaran yang masih ada bisa di alokasikan?

- A: Bisa, tetapi untuk mengubah itu kita mangajukan lagi, ngajuin lagi perubahan tidak bisa kita sendiri harus sepengetahuan termasuk tembus ke BAPEDA nanti ke keuangan daerah
- Q: Untuk proses pencairan itu setelah kegiatan apa? Kan di rekening pas kegiatan kan narik dananya, setelah kegiatan apa itu di Tarik dananya bu?
- A: Kalau sudah di ACC oleh LPK bisa langsung di Tarik dananya
- Q: Harus melalui ACC LPK dulu ya bu?
- A: Harus. Kita buat RAB kita perlu dana sekian, selama tidak melebihi RPH itu dilancarkan biasanya tapi harus ijin. Jadi kita selalu buat RABnya terlebih dahulu.
- Q: Untuk bagian pengendalian controlling itu siapa ya yang memegang ACCnya?
- A: Ka Kwarcab langsung, Waka Wargakum (Waka Organisasi dan Hukum) kita tidak punya ketua harian langsung ka kwarcab. Kita kalau surat atau keuangan kita konsul dulu ke waka. Kalau bina muda ke bina muda dulu, kalau kegiatannya ke bina wasa ke bina wasa dulu. Kalau sudah di paraf kita ke Wargakum, disitu biasanya beliau memberikan disposisi kepada yang terhormat ka kwarcab mohon untuk menyetujui atau mohon koreksi, sudah itu kalau masalah keuangan seperti kegiatan raimuna atau jamboree kemarin apalagi dananya besar begitu pasti beliau ka kwarcab lagi disposisi ke Ketua LPK, setelah di ACC oleh LPK baru kita jalan tapi prosesnya cepat karena kita 1 atap di PEMDA.
- Q: Ketua LPKnya itu pernah menjabat di Pemda?
- A: Di Inspektorat Daerah, Irban lagi yang memeriksa keuangan kita, irban 1
- Q: Untuk laporan keuangan dan pertanggungjawaban bentuknya seperti apa bu?
- A: Sederhana saja, kayak skretariat seperti apa, langsung saja seperti itu
- Q: Untuk pembagian biayanya jadi berapa biaya bu?
- A: Sesuai dengan komisi, sesuai dengan RPH itu saja, apa yang kita anggarkan di RPH, secretariat misalnya untuk pembelian fotocopy misalnya 200rb ya sudah jangan lewat jadi nanti kira kira di bagian sini gimana, secretariat apa saja fotocopy seperti itu, materai, banten, biaya rapat-rapat, uang transport, di banding dengan bos agak ringan si cuma lengkap dengan fotonya dengan daftar hadirnya nota kwitansi kan biasa.
- Q: Untuk format itu mengikuti format di penda ya bu? Pertanggung jawaban hibah itu, kwitansinya, formatnya itu dari sana?
- A: Iya, sesuai dengan penggunaan dana hibah
- Q: Kalau ini kan ada contohnya, di LPJ dibagi menjadi 4 ini biayanya operasional kesekretariatan seperti foto copy itu yang tadi, kemudian yang kedua biaya kegiatan ada mengadakan pertemuan atau musyawarah sesuai

dengan komisi, kemudian Pengadaan barang dan subsidi kwartir ini ada disini?

A: saya buatnya menyesuaikan dengan karena memang arahnya kalau memang RPH itu dibuat seperti itu tidak boleh melenceng harus sesuai dengan itu

Q: tidak ada panduan untuk biaya biaya yang baku seperti rekening-rekening itu tidak ada ya bu?

A: Jadi memang harus itu yang kita lakukan, kalau memang kita membuat RPHnya rencana penggunaan hibahnya seperti itu ya memang itu, SPJnya harus seperti itu.

Q: Bidang asset sarana?

A: Iya, apapun yang kita buat ya itu yang harus kita lakukan. Mungkin tahun depan raimuna bergerak asset tidak ada.

Q: Ada disini sumber dana selain hibah?

A: Tidak itu saja,

Q: kalau misalnya mengadakan raimuna cabang kurang apakah memungut iuran dari peserta?

A: Tidak, kalau sekarang kita dianggarkan 19 cabang 19 juta kan tidak cukup kita harus bekerja sama bersama dengan ranting, misalnya transport ranting, seberapa ranting itu mampu, ranting lagi dengan gugus depannya berbagi jadi urunan kita, tapi kita jelaskan di dalam surat edaran ke ranting itu apa saja yang akan ditanggung oleh cabang.

Q: Berarti istilahnya akhirnya nike di gugus depan ya bu?

A: Gugus depan dan orang tua tentu bekerjasama gitu, urunan bersama itu yang biasa kami lakukan, walaupun dana kecil tapi bisa mengadakan kegiatan. Ranting-ranting itu apakah mereka urunan kita tidak tau tergantung dari ranting itu sendiri. Kemudian di ranting mungkin tidak mencukupi ini harus pendekatan kepada gugus depannya. Gugus depan tentu mana-mana yang bisa didanai oleh sekolah atau komite itu yang di danai, kalau masih kurang pasti orang tua. Contohnya bekel, dana kesehatan itu pasti orang tua. Orang yang terpenting disini, ya syukur selama ini porsi bantuan orang tua itu cukup.

Q: Untuk pertanggungjawaban di kegiatan itu dimana di cantumkan bu? Urunan bersamanya?

A: Kalau itu sesuai dengan mereka masing-masing. Kalau kita mengeluarkan untuk cabang untuk apa sesuai dengan RAB kita kalau uang cabang. Kalau uang ranting misalnya uang saku dia kan buat surat tugas diranting kemudian buat SPPD kita yang neken di cabang kembalikan ke mereka akan menjadi uang keluar pada SPJ di ranting.

Q: Berarti pertanggungjawabannya di ranting ya bu? Mereka menyimpan atau tidak itu ya bu?

A: Tidak, paling kita hanya menandatangani SPPDnya stempel itu, karena tidak

urusan kita jadi kita membantu ranting maupun gugus depan itu untuk SPJ yang dikumpulkan.

Q: Itu terkait dengan permintaan sekolah?

A: Iya sekolah, bagaimana pun modelnya pertanggungjawaban sekolah pertanggungjawaban ranting begitu.

Q: Di kwarcab tabanan ada mengelola badan usaha Ibu?

A: Masih sedang menjajagi, masih rencana, membuat kedai rencananya

Q: Koperasi tidak juga bu?

A: Tidak, memang kita belum kearah sana, kedai rencananya baru kita sedang merintis.

Q: Nanti siapa yang akan mengolalanya bu?

A: Secretariat langsung

Q: Memang belum ada badan usaha?

A: Belum, baru buat nama, kan kita harus ada aturan ADART lah ini sedang kita pelajari kemana arahnya terutama di dalam pembagian keuntungan antara pengelola dengan ranting sekaligus upah gitu. Rencananya seperti itu, sehingga kegiatan-kegiatan pramuka tercover toh pelanggan kita adik adik kita di SD SMP SMA, rencananya seperti itu kalau mereka masuk order misalnya ke kedai ada tembusan, apa misalnya di order, misalnya SD 1 Pupuan jadi rantingny itu di tembus, kita yang nembus dari sini apa yang di pesan

Q: Jadi di hendel langsung oleh sini ya ibu?

A: Iya langsung di secretariat

Q: Disini di margarana kan ada bumi perkemahan, kalau misalnya seperti RAIDA ini kan ada uang kampi siapa yang di cabang ini mengelola?

A: Kita dari dana cabang, kita yang bayar kampinya bukan adik-adik

Q: Yang mengelola margarana itu beda?

A: Beda, daerah yang mengelola,

Q: Disini pramukanya tidak bekerjasama dengan itu ya?

A: Tidak, langsung ke daerah

Q: Disini sempat melakukan kegiatan penggalian dana

A: Belum, penggalian dana uang begitu?

Q: Seperti kupon begitu bu?

A: Tidak pernah

Q: Sumbangan juga tidak bu?

A: Tidak ada, dan tidak dikasi oleh ka kwarcab

- Q: Fokusnya dihibah dulu ya bu?
A: Iya betul, kalau dari sebelum-sebelumnya hibah yang diberikan ada peningkatan, kemarin 100 sekarang 200 . lumayan cukup
- Q: Tahun berapa mulai di bentuk LPK nya itu ya kak?
A: Di kepengurusan sekarang saya tau LPKnya ada, kalau kepengurusan sebelumnya kurang tau saya karena saya sebagai andalan jadinya tidak tau
- Q: Arsip SK disini tidak ada?
A: Tidak ada.
- Q: Bagaimana menurut pendapat kakak tentang LPK, apakah LPK itu sudah kompeten di bidangnya, anggotanya kan 5 orang itu sudah kompeten itu?
A: Usulnya itu dari cabang dan dari ranting, ranting masuk 2 orang kemudian yang di muscab kemarin yang dibentuk oleh permatur memang orang kompeten orang inspektorat semua 3 orang lainnya.
- Q: 3 orang itu langsung inspektorat?
A: iya, 3 orang inspektorat 2 orang dari ranting, ranting selemadeg timur 1, ranting marga 1, keputusan ranting.
- Q: Bagaimana dulu proses pemilihan LPK itu?
A: Muscab dulu, sudah itu ada permatur, kemudian permatur itu, dipilih unturnya itu ada yang punya keterampilan pramuka memang ada yang pemegang kebijakan pemerintah, ada tokoh ada yang utusan ranting
- Q: Istilahnya itu indikator, atau kriteria pemilihan menjadi bagian dari LPK ya?
A: Iya
- Q: Itu dalam pengajuan orang-orang itu kan hanya di pilih 5 orang
A: Permatur itu yang mengajukan, inikan juga tidak terlepas dari kebijakan, bukan kebijakan supaya terpengaruh, tidak. Apa yang lebih tepat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya kemudian jangan lupa mau. Yang terpenting itu mau. Pramuka itu kan pengabdian begitu. Akhirnya Permatur dan semua unsur itu tepatnya mengarah kepada inspektorat begitu, karena bidangnya memang disitu. Kapasitasnya juga karena kan skupnya ke UKM jadi untuk monitoring mengevaluasi masalah keuangan adalah hak beliau di inspektorat dalam hal penggunaan uang daerah.
- Q: Berarti kalau dari inspektorat sudah, saya kira LPK itu semua dari unsur pramuka saja.
A: tidak, yang 2 itu unturnya dari pramuka memang.
- Q: Disini ada staf kak? Dan Itu digaji?
A: tidak, tidak ada yang mendapat gaji disini

- Q: Saya kira diajukan juga di hibahnya itu
A: Kalau dari kegiatan baru biasanya kita dapat dan itupun dana stransport, tidak ada digaji disini di tabanan di unsur yang manapun. Jadi dari kegiatan saja yang pasti
- Q: Seperti yang sebelumnya juga saya Tanya LPK tidak di gaji, kira-kira menurut kakak napi yang menyebabkan mau bekerja ya?
A: Sudah panggilan hati, pengabdian, loyalitas trisatya dan dasa darma, sudah mendarah daging.
- Q: Sudah ada reward kebanggaan sendiri ya bu?
A: Iya, nyari pahala sendiri, itulah istilahnya ngayah begitu. Ada rasa bertanggungjawab sebenarnya. Malu kita kalau kita tidak berbuat. Sama halnya dengan wakaa-waka itu kebanyakan sekarang itu di OPD, jadi teras atas di pemerintahan daerah, beliau mau berlumpur-lumpur dan hujan-hujan, jadi malu saya kalau tidak ikut terjun juga.
- Q: Itu juga di penellitian saya menjadi unik, mau bekerja padahal tidak di gaji
A: Iya, kalau anak-anak muda sekarang kan bagini, saya duduk di situ apa yang saya dapat itu pertanyaannya. Misalnya menjadi ka kwarcab, pekerjaanya saja yang sudah saya bayangkan berat sekali apa yang di dapatkan kak sekda? Tidak enak saya tanya begitu. Pak sekda saja yang rumit pekerjaanya sudah penuh beliau mau jadi ka kwarcab.
- Q: Untuk ka kwarcab semua pengurus di LPK sudah di lantik oleh daerah nggih?
A: Sudah, 29 november 2021, SKnya juga SK 26 LPK
- Q: Untuk LPK ini kan sudah melakukan pemeriksaan, untuk pengurusnya mulainya ini dari tahun 2021?
A: Begini, masa kerja kita 2020/2025, tetapi karena pandemic 2020 tidak bisa membuat muscab, muscab baru September 2021, 29 september 2021 muscab kemudian dilantik oleh ka kwarda, karena bapak bupati baru berkesempatan tanggal 29 november 2021. Masa kerjanya 2020/2025 5 tahun. Tapi masa kerja kita baru november 2021
- Q: Berarti untuk tahun 2021 ini sudah turun hibah kak?
A: Sudah
- Q: Berarti sudah ada LPJ sampai dengan desember 2021.
A: Ada
- Q: Untuk LPK ini sudah memeriksa?
A: Sudah
- Q: Bisa dijelaskan sedikit apa saja yang diminta LPK ke pengurus itu?
A: Itu saja, laporannya saja, kegiatannya apa sudah sesuai belum

Q: Belum Di jilid nggh?

A: Sudah dijilid

Q: Sudah dijilid baru di periksa oleh LPK?

A: Ada awal, ini kan disusun oleh bendahara ada kelengkapannya jadi kita konsul ke cabang, kemudia disposisi, kalau sudah ada disposisi kita bawa ke LPK, ke LPK baru jilid

Q: Habis jilid itu baru di setor ya?

A: Iya, disetor ke dinas dan ke arsip kita.

Q: Setelah melalui konsultasi dengan LPK kan tentunya ada yang diperbaiki, apa saja kira-kira?

A: Kebanyakan lupa nama tera, tanggal, yang seperti itu

Q: Terkait teknik dokumen?

A: Iya, itu saja yang kemarin saya perbaiki.

Q: Siapa saja yang dapat mengakses data keuangan kwartir kak? Kalau misalnya dari orang luar gitu?

A: Tidak, Itupun kita harus laporan dulu, misalnya kan kayak adik ini, kan dilaporin dulu boleh tidak. Kalau dari ka kwarcabnya ngasi ya kasi.

Q: Dengan surat, dan sesuai dengan peruntukannya bisa kak ya?

A: Iya

Q: Untuk LPJ ini di musyawarkan apa tidak kak, diakhir tahun itu mengadakan musyawarah cabang untuk membahas LPJ ini? itu dilakukan setelah pemeriksaan LPK apa sebelumnya di musyawarah?

A: Biasanya setelah di LPK. biasanya ini pada saat penganggaran tahun berikut itu yang dibicarakan itu semua diundangkan, sekalian disana di beritahukan.

Q: Itu kan secara horizontal ya musyawarah itu, kalau vertical pertanggungjawaban keatas kan kedinas saja ya, itu diperiksa dari BPK apa tidak ya kak?

A: Kemarin dari LPK saja, belum ada panggilan kalau ada pemeriksaan dari BPK, mungkin tidak tau ya bendahara kemarin, karena saya kemarin tidak ada dari oktober perganting. Sebelum periode 5 tahun kemarin pernah ke kantor bupati di panggil karena ada pemeriksaan BPK.

Q: Kalau secara kegiatan kita ada beberapa melaporkan ke kwarda, cabang itu kan ada di bawahnya kwarda, kalau untuk keuangan tidak ada ya?

A: Tidak, hanya sampai di dinas cabang mengirim laporan pengelolanya.

Q: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban?

A: Melengkapi lampirannya itu, seperti tanda tangan, foto-foto kegiatan, itu biasanya.

- Q: Untuk dokumen pertanggungjawaban apa yang paling sulit? Kan ada pembelian barang, jasa, ada konsumsi, apa yang sulit dipenuhi kadang-kadang, absen?
- A: Tidak ada biasanya karena setiap kegiatan kita sudah tau apa yang mesti harus dilengkapi di LPJ, sudah jalan. Langsung daftar hadir. Atau begini ya perkegiatan, contohnya raimuna, ada bagian perlengkapan yang mesti harus berbelanja kan dia yang langsung jalan, dia yang belanja saya printkan kwitansinya langsung dia yang jalan mencari tanda tangan ke tokonya.
- Q: Menurut kakak dana yang di peroleh saat ini sudah cukup ya?
- A: Kalau dibilang cukup ya dicukup-cukupin, kenyataannya kan masih banyak juga kegiatan yang belum tercover oleh dana hibah. Tergantung ini saja sebenarnya, missal dikasi dana 200 juta kita lihat programnya sekarang apa saja ini yang mendesak yang harus diikuti. Yasudah itu saja. Kalau di kasi dana 300 ya bisa nanti komisi yang lain mengajukan untuk mengadakan kegiatan.
- Q: Sebenarnya masih kurang ya bu, untuk memenuhi kekurangan itu kita harus bekerjasama sama ranting sama sekolah.
- A: Iya kerjasamanya jadi ke gudep ke ranting.
- Q: Jadi sebenarnya memang kalau secara normal kegiatan yang dimiliki oleh cabang ini tidak cukup di cover oleh dana hibah saja begitu ya
- A: Tidak mungkin cukup, 1 miliar dikasi tidak cukup untuk kegiatannya
- Q: Berarti kita memang di paksa berusaha untuk bekerjasama
- A: Adik baca di ADART pasti begitu, sumbernya iuran, itu urunan bersama. Seperti sekarang 200, mana kegiatan yang harus dilaksanakan ya itu kita masukkan, padahal banyak komisi-komisi yang lain kegiatan yang memang tidak bisa tercover. Seperti penghijauan program kegiatan bela Negara, ada peringatan hari bumi kita punya program, tapi mandiri itu. Kita mengadakan kegiatan itu sesuai dengan program tapi non budgeting, begini artinya, kita undang kwaran-kwaran mengeluarkan beberapa orang penegak trus ada kebetulan ranting pupuan yang mampu melaksanakan, dia punya pohon kesue, bibitnya ada disana tidak beli kita, adik-adik seluruh tabanan bersama PP pramuka peduli, ka kwarcab yang membuka, itu kan sudah menjadi kegiatan cabang jadinya, Begitu. Sebenarnya pramuka itu tidak kalah akal dan strategi, harus punya strategi. Lagi 1 penyebaran tukik, tukik di yeh gangga, berapa kita bisa minta itu, karena kebetulan pimpinan saka bayangkara punya bibit tukik. Jadi adik-adik kesana kita dari cabang yang melepas itu. Kan kelihatan kegiatan cabang. Berkolaborasi itu penting, asalkan kita dari top leadernya, ka kwarcab memang mengefektifkan potensi-potensi yang ada, gampang. KMD, KML itu kan kegiatan orang dewasa jadi dimandirikan itu, kita tidak ada membiayai dari cabang untuk komisi bina wasa. Tetapi KMD itu berjalan lancar, ada yang gugus depan melaksanakan ada yang ranting melaksanakan, mandiri.

Q: Untuk SDM disini kak, tumpang tindih tidak antara PA sama PI untuk Pembina pelatih?

A: Tidak, seimbang kita, di struktur organisasi hamper sama putra dan putri

Q: Tidak ada kesulitan mencari Pembina putra/putri pelatih putra/putri?

A: Tidak, sudah seimbang.

Q: Baik terakhir itu saja kak, karena tidak ada kendala dalam pengelolaan keuangan karena besicnya dasarnya sudah dari bos apalagi ini lebih sederhana dari bos.

A: Pernah bos soalnya, kalau tidak pernah mungkin ada kendala, dari irban juga membimbing kita. Misalnya kita kurang jeli, kurang membayar pajak misalnya, jadi kita tambahin berapa % yang kurang.

Q: Punya NPWP sendiri?

A: Punya cabang

Q: Biasanya pajak apa saja yang di potong?

A: Pembelanjaan diatas 5 juta, sewa kendaraan seperti kemarin berangkat sewa bis kena

Q: Berapa % itu, 2,5%

A: Tidak, 2 % itu sewa kendaraannya, kalau yang belanja barang 11,5% PPNDM. Lengkap itu, dari inspektorat tau kalau pajaknya itu belum tuntas, artinya kita di cabang hak pungut saja tapi yang membayar rekanan kita, siapa yang ini, dia yang membayar, rekan kita. Tapi kalau dia tidak punya NPWP pakai NPWP kita

Q: Berarti potong langsung dari sini ya bu?

A: Iya.

I. Jadwal Wawancara	
1.	Tanggal, hari : 28 November 2022, Senin
2.	Waktu mulai dan selesai : 10.30 WITA s.d 12.00 WITA
II. Identitas Informan	
1.	Nama Informan : 1. I Made Tingkat, S.Pd., M.Si. 2. Dra. Ni Nengah Watis, M.Si
2	Jenis kelamin : 1. Laki- Laki 2. Perempuan
3.	Usia : 1. 60 Tahun

			2. 62 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	1. Ketua Harian 2. Bendahara II Kwardcab Buleleng
5.	Pendidikan terakhir	:	1. S2 2. S2
III.	Pertanyaan & Jawaban		

Q: Tahun 2017 berapa total penerimaan hibahnya nggh?

A: 500

Q: Ini tetap jumlahnya?

A: Iya, kecuali 2020 tidak dapat

Q: 2021 juga sama kak?

A: Sama

Q: Sumber hibahnya dari instansi/SKPD mana kak?

A: Sumber dananya dari PEMDA melalui dinas pendidikan

Q: Mungkin bisa dibantu dijelaskan terkait bagaimana proses pengajuan dana hibah tersebut

A: Pertama, kita membuat rapat kerja, dirapat kerja itu mempersiapkan untuk membuat proposal, proposal lah yang diajukan ke pemerintah kabupaten buleleng, kemudian kabupaten buleleng yang menentukan berapa kita di acc dana kita, selama ini biasanya begitu, meskipun kita mengajukan lebih banyak, tetap akhirnya 500. Jadi keputusannya ada disana.

Q: Pihak penting siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan proposal itu?

A: Kalau penyusunan proposal kita pengurus

Q: Pengurus saja? Melibatkan LPK juga atau tidak kak?

A: Kalau LPK tidak dlibatkan dalam menyusun proposal

Q: Seperti yang sudah di sampaikan tadi, kan dalam pengajuan proposal tentunya kita mengajukan asumsi dana lebih tinggi dari apa yang di dapatkan, apakah setelah itu kita membuat revisi terkait proposal tersebut kak?

A: Iya, kita menyesuaikan, kita membuat RPD (Rencana penggunaan dana).

Q: Untuk proses revisinya di libatkan kembali di tahap awal sesuai penyusunan?

A: Kita undang semua pengurus untuk memastikan berapa yang di acc , kita di

acc sekian maka dari proposal yang kita ajukan kita di acc sekian harusnya ada penyesuaian –penyesuaian.

Q: Sejak kapan sudah mendapatkan dana pemerintah berupa hibah?

A: 2010

Q: Pernah berubah ke non hibah kak?

A: Tidak

Q: Berikutnya, setelah dana di cairkan apakah khawatir memiliki rekening bank

A: YA

Q: Rekeningnya dalam bentuk bank apa kak BPD atau non BPD?

A: Bank BPD

Q: NPWP juga punya kak ya?

A: Punya

Q: Berarti selama transaksi dana tersebut jika memang kena pajak atas pengadaannya langsung NPWP khawatir yang di pakai? Bukan dinas pendidikan ya kak?

A: Iya, Bukan

Q: Selanjutnya bisa di bantu kak bagaimana proses pengloaan dananya, kan sudah diterima dananya, sekarang sesuai dengan kegiatan tentunya kan di cairkan dana tersebut, bagaimana terkait proses pengelolaannya?

A: Untuk pengelolaan dana kita, setelah dana itu cair masuk ke rekening, baru kita, tapi kadang-kadang kita mengadakan kegiatan dulu karena kadang-kadang dana itu tidak pas datangnya. Ini kan anggarannya januari sampai desember. Sedangkan januari sampai bulan maret atau april belum datang dananya, mei biasanya. Baru muncul atau baru masuk ke rekening kadang-kadang di bulan Mei sehingga kegiatan-kegiatan yang harus di biyai sebelum dana itu cair ya sejenisnya kas bon lah dulu. Jadi kas bon di bayarkan setelah dana itu bisa di cairkan, seperti itu. Berikutnya kegiatan-kegiatan itu menyesuaikan dengan jadwal yang kita susun kedalam RPD tersebut. Jadi di RPD tersebut di rencanakan, misalnya kegiatan jamboree di laksanakan kapan lalu raimuna di laksanakan kapan seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan mendahului yang sifatnya operasional, seperti air, listrik begitu kan tidak boleh tidak terbayar itu pada januari, february, maret, padahal tidak ada uang itu maka kas bon.

Q: Kas bonnya kemana nika kak? Apakah mengambil pinjaman dari lembaga pembiayaan atau bagaimana?

A: Biasanya selama ini minjam pribadi, begitu jadinya.

Q: Berarti secara sukarela ya ?

A: Iya secara sukarela

- Q: Terkait dengan anggaran apakah ada penetapan kegiatan A dialokasikan dana sekian, kegiatan B dialokasikan dana sekian
- A: Iya Ada, di RPD dah muncul, di Rancangan Penggunaan Dana pada 7 komisi
- Q: Apakah RPD masing-masing tersebut ada yang melenceng kak dari anggaran yang sudah ditetapkan, lenih tinggi atau lebih rendah seperti itu?
- A: Iya kurang lebih biasa saja, namanya juga anggaran tidak bisa pas sekali begitu, kita anggarkan 2juta 5ratus kadang-kadang tidak pas 2juta 5ratus artinya ya kurang lagi 2juta 4 ratus begitu, tidak ada yang lebih, artinya tidak jauhlah melencengnya begitu
- Q: Jadi untuk anggarannya fleksibel ya kak kalau misalnya ada yang kurang bisa dialokasikan ke kegiatan yang lain?
- A: Kalau terlalu jauh misalnya, kalau ada rencana kita yang tidak jadi atau tidak jalan seperti itu biasanya kita melakukan perubahan, rencana perubahan harus di buat. Selama ini tidak terlalu jauh, apa yang kita rencanakan itu yang kita jalankan.
- Q: Terkait untuk hibah yang diterima selama penggunaan periode tahunan itu ada yang lebih atau kurang sehingga ada kas yang kita kembalikan?
- A: Biasanya si ada sisa, seperti tadi, kadang kita berusaha begitu jangan sampai melewati kalau melewati kemana kita carikan begitu, berusaha seperti itu, bagaimana minimal sama dengan yang kita rencanakan atau ada sisa, kalau ada sisa itu akan bisa pergunakan di tahun berikutnya, tidak di kebalikan
- Q: Terkait kegiatan setelah penggunaan dana pasti ada reporting atau laporan pertanggungjawaban, laporan nitu biasanya menggunakan standar laporan gimana kak?
- A: Acuan kita mengikuti per SPJan di SKPD
- Q: Berarti format untuk kwitansi juga langsung?
- A: iya, menyesuaikan dari sana, karena dari pemerintah kita harus menyesuaikan dengan pemerintah.
- Q: Apakah ada sumber dana lain yang di kelola oleh kwatir selain hibah?
- A: Selama ini tidak ada
- Q: Dalam melaksanakan kegiatan ada pernah memungut iuran untuk peserta atau anggota
- A: Ada, tergantung kalau memang kalau kita belum mencukupi atau belum tertera di RPD tetapi kebutuhan memerlukan itu kita membebani kepada peserta. kemarin itu camvi
- Q: Untuk pengelolaan camvi itu langsung berupa kwitansi ke pesertanya atau di masukkan dulu ke kwartir atau diadakan pertemuan?
- A: Tidak, tidak di masukkan ke dana kwartir tapi langsung di kelola oleh panitia pelaksana kegiatan

- Q: Berarti terpisah di pertanggungjawaban tersebut?
A: Iya
- Q: Apakah kwartir memiliki badan usaha?
A: Punya tapi belum jalan, tidak jalan karena tidak ada pengelola yang ahli mengurus itu
- Q: Sudah ada tapi belum jalan. Kalau koperasi juga tidak ada kak?
A: Tidak
- Q: Apakah kwartir pernah melakukan penggalan dana kak? Seperti kupon dll?
A: Belum pernah
- Q: Sumbangan juga tidak nggih ?
A: Pernah ada di dalam kegiatan, donasi ya, kan ada dari CSR itu ya, untuk hadiah lomba.
- Q: Proses pencatatannya menjadi 1 dengan laporan pengurus kak?
A: Untuk dana yang seperti itu kembali ke panitia saja yang mempertanggungjawabkan.
- Q: Berarti terpisah sesuai dengan kegiatannya. Berarti nanti untuk kegiatan yang kayak camvi kemudian ada sumbangan itu tidak jadi 1 di ini?
A: Tidak di SPJnya berbeda
- Q: Untuk LPK kak ini sudah di bentuk, mulai pembentukannya kapan ya?
A: Tahun 2020 kemarin
- Q: Sebelum LPK yang baru sebelumnya sudah ada di bentuk?
A: Kita tidak ada membentuk LPK tetapi untuk akuntabilitas keuangan kita, kita menggunakan jasa akuntan publik
- Q: Berarti pernah menggunakan jasa akuntan publik?
A: Bukan pernah, tetapi terus. Iya kita terus menggunakan jasa akuntan publik.
- Q: Boleh tau kak, KAP apa namanya?
A: Diatmika namanya
- Q: Berarti untuk sekarang 2020 LPK kan sudah bekerja, apakah menggunakan jasa tersebut lagi atau tidak kak?
A: Masih, mulai 500juta katanya harus menggunakan jasa audit
- Q: Bisa di bantu kak, sekarang LPK kan sudah bekerja nggh, bagaimana proses pemilihan atau indikator sehingga orang-orang tersebut diajukan pada saat musyawarah tersebut, oh ini calon LPK ini ?
A: Untuk penentuan siapa yang menjadi LPK seperti itu? Ya berdasarkan musyawarah, dimusyawarah itulah kita menyepakati kira-kira siapa yang

bisa untuk bersama-sama. Ini kan kerja social masalahnya sebagai pengurus dan juga sebagai kelengkapan kepengurusan kita harus ada LPK begitu, karena kelengkapan itu. Maka di situlah kita sepakati. Kemudian yang pertama karena kita ini menggunakan dana hibah dari pemerintah, kita juga mengharapkan data biasa mengauditlah begitu memeriksa di keuangan di SKPD seperti itu sehingga menggunakan data dari inspektorat itu salah satunya. Sehingga kak Omar itu dari inspektorat

- Q: Untuk dari 5 orang anggota LPK itu Cuma 1 orang kak ya dari inspektorat?
A: Iya, yang lainnya boleh dikatakan intern dasarnya. Kakak-kakak bina pramuka seperti itu. Tetapi menurut pandangan kita di pengurus itu mampu melakukan begitu.
- Q: Apakah menurut kak semua anggota LPK itu sudah independen dalam melakukan tugasnya?
A: Ya selama ini sudah independen
- Q: Menurut kak anggota LPK sudah kometen dalam bidangnya kak?
A: Ya sudahlah, kalau tidak kompeten tidak mungkin di pilih.
- Q: LPK tersebut kan sebenarnya lembaga pemeriksa keuangan namun adakah prosedur pekerjaan lain yang dilaksanakan LPK di non keuangan kak?
A: Kalau LPK kita tidak khusus memeriksa keuangan saja artinya yang di periksa itu hanya keuangan saja, tidak. Tetapi menyeluruh baik secara organisasi baik dengan tupoksi juga kita tetap di pantau. Ada bagian-bagian juga yang dilihat terkait dengan pengurus staf seperti itu.
- Q: Kemudian apa yang menjadi perbedaan tugas antara LPK dan SPI?
A: Kalau LPK itu boleh dikatakan eksternal lah sebenarnya secara organisasi dan SPI itu internal jadi pemeriksaan internal itu SPI anggap eksternalnya tapi eksternalnya masih dalam lingkungan kita, kan ada 2 eksternal jadinya, eskternal yang dari LPK eksternal yang dari audit itu independen itu.
- Q: Apa saja bentuk laporan keuangan yang di buat oleh kwartir kak saat ini? kalau biasanya di pemerintah itu kan ada laporan kas, operasional, neraca seperti itu realisasi anggaran kalau misalnya di kwartir ini laporan keuangannya berupa apa itu?
A: Laporan keuangan realisasi, semua dilaporkan
- Q: Apakah hasil pertanggungjawaban dari kwartir di sampaikan dalam musyawarah kak?
A: Untuk laporan disampaikan kan setiap tahun kita ada rapat kerjadi sampaikan di rapat kerja, di musyawarah kan 5 tahun sekali baru kita lakukan disampaikan juga kerana sudah disampaikan disini disampaikan juga secara umum disitu berarti untuk 5 tahun.
- Q: Berarti untuk periode tahunannya di bahas dalam rapat kerja. Untuk yang di

bawa dalam rapat tersebut apakah sudah melalui pemeriksaan LPK dan akuntan atau belum?

A: Iya kan sudah selesai.

Q: Dari pemeriksaan LPK selama ini dan dari akuntan publik apakah ada poin-poin kekeliruan di kwartir

A: Ada, untuk melengkapi seperti kalau biasanya kita kan SPJ perjalanan itu kan dilaporkan apa pekerjaan dengan membuat perjalanannya itu apa hasilnya itu. Kemudian foto-foto kegiatan itu harus ada sekarang. Ada sedikit-sedikitlah, ada temuan intinya masukan disuruh melengkapi itu saja.

Q: Apakah dari temuan-temuan tersebut sudah di tindaklanjuti kak?

A: Sudah, sudah di kasi tau ini kita lengkapi karena LPKnya itu kan juga membuat laporan

Q: Untuk laporan pertanggungjawabn hibah yang disampaikan ke dinas pendidikan atau pemerintah daerah itu apakah sudah di periksa juga oleh BPK?

A: BPK iya, Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, karena kan semua instansi dan hibah itu diperiksa tapi kadang-kadang di pakai sample kita pramuka.

Q: Berarti di panggil untuk memeberikan penjelasan pada saat itu?

A: Iya.

Q: Bisa di bantu apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan di kwartir kak?

A: Sebenarnya di tidak ada kendala. Yang menjadi kendala kan kadang-kadang karena kesibukan sebagainya terutama bapak ketua kita, Cuma kadang-kadang agak molor sedikit karena untuk proses tanda tangan kita itu agak banyak, kebanyakan kesibukan ka kwarcab kita agak terlambat kadang-kadang itu saja kendala sebenarnya, peling terlambat sehari 2 hari 3 hari itu saja.

Q: Di bagian pemenuhan dokumen SPJ itu tidak ada?

A: Itu tidak ada, karena begitu ada kegiatan kita langsung. Selesai masing-masing kegiatan

Q: Menurut kakak apa dana hibah saat ini sudah mencukupi untuk keseluruhan pengelolaan kegiatan di kwartir?

A: Kalau bicara cukup-mencukupi itu di cukup-cukupkan begitu ya, sebab kita mengadakan kegiatan berbasis anggaran, bukan anggaran berbasis kegiatan begitu. Jadi ada uang segini cukupkan mana kegiatan yang harus di jalankan begitu, menjadi skala prioritas jadinya begitu. Banyak kegiatan yang harus dilakukan karena tidak ada uang tidak jalan jadinya begitu.

Q: Berdasarkan turunan ADART ada arah kebijakan geraka pramuka sampai 2045 kak ya? Di sana disebutkan dana pramuka berasal dari 3 sumber ada pemerintah, intern dan juga dana publik, sementara ini kita kan disokong

oleh sebagian besar dana pemerintah. Apakah untuk keberlanjutannya kita akan terus menggunakan dana pemerintah saja untuk melaksanakan kegiatan, seandainya pemerintah stop memberikan dana apakah pramuka juga akan menjadi pasif begitu kak? Bagaimana menurut kakak?

A: Harapan kita bahkan ada juga wacana bahwa akan ada amandemen terhadap uu no 12 th 2010 tentang gerakan pramuka, tetapi sampai saat ini mungkin belum berjalan amandemen itu karena bunyi disana di bagian keuangan itu Pemerintah Dapat begitu bahasanya, Pemerintah Dapat memberikan bantuan dana, karena pengertian dapat itu boleh iya boleh tidak sebenarnya. Maka mestinya menurut kepentingan pramuka, menurut pengurus-pengurus di pramuka bahasanya bukan Dapat lagi tetapi Wajib itu pemerintah karena kan kalau memang tidak kita di biyai memang dari 3 sumber itu akan kesulitan kita di dalam, kan berurusan disitu salah satunya dari kitalah iuran tapi sampai saat ini ada juga kesulitan yang kita pungut iuran itu, ada benturan sedikit terkait dengan aturan pemerintah yang menyatakan terutamanya bagi anggota muda terkait dengan pendidikan formal itu tidak memungut biaya seperti itu, gratis itu, karena dengan demikian ada kontradiktif sedikit begitu, pemahaman pramuka itu jadi tidak memungut iuran begitu. Sehingga disitulah kesulitannya begitu sampai saat ini memang kita tidak memungut iuran itu kepada anggota pramuka kita. Itu masalahnya, karena kita tidak memungut iuran kalau kita berkegiatan tentu ada kesulitan jika tidak ada dana tapi nantinya kita berharap pramuka ini tetap jalan ya bagaimana upaya kita, kalau kita mau jalan kita harus ada upaya begitu, tapi harapannya undang-undang itu bisa sebagai payung hukum tertinggi, mungkin itu ya. Sebetulnya pemerintah kalau dibaca itu mestinya dia yang harusnya support kita Karena kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan kan bukan tanggungjawab pemerinta saja sebetulnya ini tanggungjawab kita bersama, begitu. Non formal ya mestinya juga harus di biyai.

Q: Berarti dari kesimpulan tersebut harusnya pemerintah tetap memberikan bantuan dananya. Terkait dengan pelaporan kalau secara kegiatan kita kan berada di bawah naungan kwarda, apakah ada pelaporan khusus terkait keuangan kesana kak?

A: Tidak ada

Q: Berarti berhenti sampai di dinas pendidikan. Kemudian di bawahnya di ranting mendapatkan dana juga?

A: Ada dana, dana stimulant kita berikan namanya

Q: Terkait dari hibah tersebut apakah ada digunakan untuk penggajian kak?

A: Iya, bukan gaji ya tapi honor. Karena beda mungkin gaji sama honor itu ya

Q: Berarti yang di honor atau digaji itu staf saja kah?

A: Iya

Q: Berapa orang jumlah stafnya?

A: 3 orang

Q: Terkait dengan saya melakukan penelitian ternyata banyak pengurus dan juga LPK ini sebenarnya kan tidak ada honor tidak ada gaji mungkin kakak bisa jelaskan sedikit selaku kakak dulu ketua harian mendapatkan gaji/tidak ya?

A: Saya dapat gaji dan istri waktu ada istri.

Q: Ini yang penting kaka apa yang menyebabkan kakak-kakak seperti ini mau bekerja?

A: Kembali ke moto kita orang dewasa. Ada moto disitu **iklas bakti bina bangsa berbudi bawalaksana** dari sana kira-kira sudah menjadi diterapkannya begitu moto yang di dengung-dengungkan setiap ada pendidikan orang dewasa untuk menjadi 1 moto iklas bakti bina bangsa itu, dari sana datangnya jadi asas sukarejanya itu karena suka dan rela para pengurus ini mau datang kesini tanpa ada honor tanpa ada uang transport tak ada apa, karena suka dan rela/buduh-budahan. Tetapi kan kembali kepada itu karena kita merasa sudah terpanggil iklash bakti, suka rela, rasa tanggungjawab terutamanya itu dan kepercayaan sebagai pengurus bagaimana bisa mengurus gerakan pramuka ini bisa berjalan. Para Pembina juga harapan kita di gugus depan –gugud depan juga dengan sukarela dengan tulus iklas begitu mengabdikan dirinya, mungkin kalau disekolah-sekolah tidak tau apa di berikan honor, kalau diberikan ya syukur, kalau tidak ya tulus iklas sukarela.

Q: Ada lagi kak yang ingin disampaikan kepada saya terkait dengan pengelolaan, kalau dari pertanyaan saya sudah cukup

A: Tidak ada yang mengharapkan gaji di pramuka, mungkin karena sudah terbiasa di pramuka seperti itu, kalau boleh orang berseloroh begitu pramuka itu ngayah, payah, mayah itu seloroh-seloroh yang seperti itu kita ngayah yang namanya ngayah ya tulus iklas begitu, kadang ngayah payah otomatis ngayah payah yang terakhir harus mengeluarkan dana sendiri mayah begitu, rela begitu walaupun mengeluarkan uang, seperti contoh kemarin ada KPL di bali Kursus Pelatih Lanjutan itu kewenangan kwartir nasional melaksanakan KLP tetapi Bali melaksanakan KPL juga di kwarda tetap atas pantauan dari kwartir nasional. Lalu pesertanya bagaimana? Bayar dia 2,5juta rela dia bayar 2,5 juta pribadi, seluruh peserta membayar pribadi. Begitu contohnya jadi sudah ngayah, payah, mayah begitu. Itu sudah cash di bayar kepada panitia sebelum lagi kita kesan-kemari kan biaya lagi. Ya itulah kalau sudah niatnya ngayah itu itu kita kira, di pramukanya seperti itu. Terikat lehernya. Kira-kira itu penyebabnya

Q: Dari kak wates mungkin bisa menambahkan kenapa mau?

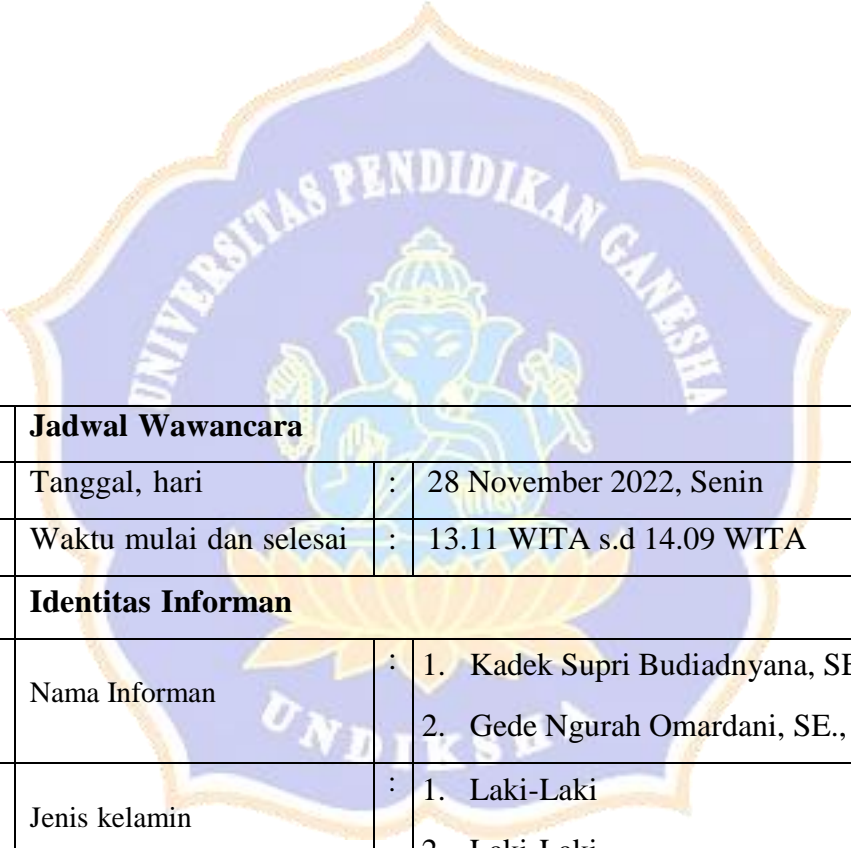
A: Karena suka. Karena suka jadinya rela ya senang. Terpanggilah begitu dan merasa tanggungjawab juga, tidak enak apalagi melihat anak-anak muda itu tidak ada yang mendampingi, terpanggil juga

A: Terakhir, sebetulnya kan jarang orang begitu kan dengan datangnya kita disini kan refresh sebetulnya tapi tidak diketahui apa sih sebenarnya setelah kita mengabdikan seperti tu rela seperti itu tapi sebetulnya ada tambahan untuk

diri masing-masing refresh sebenarnya. Kita bisa Bertemu dengan adik-adik,
A: Punya banyak teman, efek sampingnya itu ya pengiringnya itu

Q: Rewardnya ada kepuasan tersendiri?

A: Iya, kepuasan batin yang tidak bisa di beli sebenarnya.



I. Jadwal Wawancara		
1.	Tanggal, hari	: 28 November 2022, Senin
2.	Waktu mulai dan selesai	: 13.11 WITA s.d 14.09 WITA
II. Identitas Informan		
1.	Nama Informan	: 1. Kadek Supri Budiadnyana, SE 2. Gede Ngurah Omardani, SE., M.M
2.	Jenis kelamin	: 1. Laki-Laki 2. Laki-Laki
3.	Usia	: 1. 28 Tahun 2. 55 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	: 1. Wakil Ketua LPK Kwarcab Buleleng 2. Ketua LPK Kwarcab Buleleng
5.	Pendidikan terakhir	: 1. S1

		2. S2
III.	Pertanyaan & Jawaban	

Q: Untuk LPK ini apakah baru di bentuk pertama kali apa sebelumnya sudah?

A: Baru

Q: Berarti sebelumnya memang belum ada LPK?

A: Belum ada. Baru mulai tahun 2021

Q: Sesuai SK di peroleh 2020 kak?

A: Iya 2020-2024

Q: Terkait dengan SK yang sudah diterima apa sudah melalui proses pelantikan?

A: Sudah

Q: Yang melantik siapa?

A: Sekda, dari sekda provinsi, ketua kwarda, parenting

Q: Sebelumnya LPK itu kan belum ada di bentuk kepengurusan di tahun 2020 ini? mungkin ada hal atau siapa yang menggebrak agar LPK segera di bentuk di buleleng?

A: Kenapa LPK di bentuk karena ka kwarcab ingin dalam pengelolaan dana hibah sebagaimana sesuai dengan arahan kak kwarda memang perlu di bentuk lembaga pemeriksa keuangan agar kwarcab tertib keuangan dan tertib dalam pengelolaan keuangan.

Q: Berarti muncul arahan dari ka kwarda seperti itu untuk di bentuk di setiap cabang kalau bisa seperti itu kak. Untuk proses pembentukannya sudah saya konfirmasi melalui musyawarah cabang melalui tim permatur disana di ajukan terkait hal itu sebelum diajukan adakah konfirmasi sebelum jadi anggota, mungkin apa indikator atau prasyarat seseorang menjadi anggota LPK?

A: Kalau kita lihat dari sisi kompetensinya paling tidak harus mengetahui harus mempunyai jiwa secara naluriah tentunya dia mengetahui tentang unsur-unsur pengawasan, bagaimana pengawasan yang sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga itu yang disampaikan

Q: Ada lagi kak, atau sebelumnya kira-kira dibagian lulusan sarjana keuangan, sarja hukum seperti itu?

A: Yang penting mengetahui juga seluk beluk di kondisi pramuka itu seperti apa dan pengalaman di bidang pramuka.

Q: Setelah proses tersebut apakah langsung begitu saja di setuju, oh saya sudah terpilih kemudian ditunjuk, bersedia atau ada kesempatan untuk menolak?

- A: Dia kan sudah melakukan, seperti misalnya pimpinan yang sebelumnya kan sudah menilai, sepertinya orang ini yang punya kompetensi paling tidak bergerak dan berpengalaman tentang hal pramuka. Kita juga tidak serta merta mengatakan “saya tidak mau” pada prinsipnya ini kan ngayah swadaya lah dalam arti tidak ada yang namanya mendapatkan dari apa yang ada di pramuka itu, honor apapun tidak dapat, nah itu bisa di bilang ngayah. Pada prinsipnya kan hobby, untuk mengetahui, untuk berorganisasi.
- Q: Kalau kak supri kan saya sudah mengenal di pramuka sebelumnya, kalau kakak?
- A: Kalau saya tidak, belum pernah saya masuk di gininya pramuka, belum sama sekali.
- Q: Menurut bapak apakah LPK sedah memenuru kriteria independensi ya?
- A: Iya secara ini harus independensi, tetapi tetap yang namanya independensi tetap melalui kordinasi dan komunikasi itu yang penting.
- Q: Bukan berarti independensi yang dimaksud itu oh ini misalnya kakaknya pramuka berarti masih belum independen seperti itu, bukan seperti itu ya?
- A: Bukan
- Q: Yang penting tidak memihak
- A: Dari segi pemilihan kompetensi, yang pertama kan kompetensi di minta, misalnya kak umar kan kompetensinya sebagai pemeriksa, pemeriksa keuangan jadi beliau dipercayakan sebagai ketua LPKnya begitu. Dan saya di bawahnya karena pengalaman di pramuka trus di bagian SE juga mengetahui tentang bagian keuangan ya dituntut untuk dan tidak ada unsur keterkaitan dengan kwarcab. Dari dulu kan saya tidak ikut di tim kwarcab.
- Q: Karena LPK ini baru dan langsung bekerja kira-kira bapak bisa membantu menjelaskan bagaimana proses mulai bekerja LPK apa saja tugas pokok dan fungsinya sehingga bisa membagi tugas?
- A: Ya sesuai dengan SKnya, kalau tugas pokoknya kan disesuaikan dengan SKnya yang namanya di keluarkan oleh kwarcab, disana sudah jelas kalau tugas-tugas dari LPK kalau kita dalam rangka melakukan pemeriksaan pengawasan lah dalam artian. Kalau namanya pengawas kan dengan pemeriksaan dengan audit itu berbeda, kalau audit itu harus punya kompetensi, kalau pengawaas kan siapapun boleh, makanyan ada LPK itu Lembaga pengawasan keuangan bukan namanya lembaga audit, kalau lembaga audit harus punya kompetensi harus punya sertifikat, kalau pengawasan itu boleh saja, siapa pun yang melakukan pengawasan boleh sehingga saya berkolaborasi dalam hal ini melakukan yang namanya pengawasan di LPK kwarcab itu supaya biar bagus kedepannya, karena ini baru pertama makanya saya berkolaborasi dengan unsur-unsur yang dilakukan oleh inspektorat begitu. Sehingga kalau kita melakukan pengawasan itu kita pakai pengawasan yang secara regular, regular itu tentunya ada yang namanya beberapa aspek yang kita lakukan untuk melakukan pengawasan tentunya ada 5 aspek itu, 5 aspek baik dari aspek

tugas fungsinya trus ada yang namanya aspek keuangannya ada aspek sarana prasarannya, aspek SDMnya termasuk juga aspek metode kerjanya, ini kita evaluasi kita lakukan pengawasan. Tujuannya adalah untuk menilai dalam artian untuk menilai misalnya dalam melakukan pemeriksaan itu ada yang namanya tujuan daripada LPK itu yaitu kenapa harus ada namanya pemeriksaan regular, itu pada intinya yang pertama itu menilai sistem pengendaliannya bagaimana disana karena ini baru pertama di lakukan. Kemarin baru 1 tahun kita lakukan tahun 2021. Menilai pengendaliannya, pengendalian manajemennya terhadap tugas pokoknya terus menilai prosedurnya bagaimana terus menilai ke ekonomisan artinya dari sisi pelaksanaan kegiatan efektif efisien dan akuntabel terus menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, ini yang kita lakukan, sehingga pada saat kita melakukan pemeriksaan regular ini kan aspek dari 5 aspek itu kita lihat bagaimana tupoksinya bagus tidak sesuai dengan berjalan, bagaimana pemanfaatan sumber daya manusianya, itu disana apakah sudah sesuai dengan fungsinya dia. Tidak saling tarik ini yang melakukan terus dari sumber sarana prasarana apa saja yang sudah dia punya sudah di manfaatkan sudah berperan tidak, dari segi pengelolaan keuangannya juga, apakah sudah tepat waktu patuh terhadap aturan yang berlaku karena kita di berikan dana hibah ini kan harusnya ada batasan-batasan sesuai tidak dengan program-program selama setahun yang dilakukan, walaupun memang tidak ada ya tentu itu ada kendala-kendala yang terjadi istilahnya kan dibuatkan satu oh ini belum selesai ada laporannya, bagaimana bisa tidak selesai apa yang harus menyesuaikan dengan RAB yang sudah ada. Itu yang di lakukan di LPK.

- Q: Berangkat dari pengkolaborasi unsur-unsur yang dilakukan di inspektorat jadi ada 5, saya kira lembaga pemeriksa keuangan jadi hanya 1 aspek-aspek keuangan saja yang diperiksa ternyata mengikuti dari 5 komponen yang tadi.
- A: Karena ini baru pertama, karena tadi dari informasinya adik itu kan baru kabupaten buleleng yang melakukan pergerakan untuk LPK, makanya saya baru pertama juga melakukan makanya saya berkolaborasi dengan apa yang saya lakukan terhadap pemeriksaat di beberapa SKPD tentunya saya pakai itu karena secara juknisnya memang tidak ada artinya pada prinsipnya bagaimana proses pemeriksaan keuangan itu bisa berjalan sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada makanya disana kan ada efektif, efisien dan ekonomis akuntabelnya bisa di pertanggungjawabkan dan bisa di terima oleh orang banyak seperti itu. Selama ini kalau dana hibah di pergunakan sudah dibuatkan begini tidak pernah yang namanya siapa yang memonitoring siapa yang melakukan pengawasan tidak ada, begitu.
- Q: Bisa di bantu bapak dijelaskan sedikit mengenai proses pemeriksaan disini kan ada pemeriksaan dari aspek keuangannya, SDM, Sarana Prasarana, Metode kerja, mungkin sedikit alurnya bagaimana LPK bekerja apakah melakukan apakah konfirmasi minta, seperti itu?
- A: Begini, awalnya kan pertama kita kan mengajukan biasanya dalam melakukan tugas dan fungsi LPK itu dalam 1 tahun kita kan punya rencana

itu dipakai 3 triwulan artinya triwulan I triwulan II triwulan III tetapi karena istilahnya ada kesibukan termasuk anggota kita di LPK ini kan kebanyakan ada yang bekerja sehingga saat kita mungumpulkan untuk melakukan pengawasan kita kordinasi dulu dengan teman-teman team LPK ini tanggal ini bulan ini kita akan lakukan ini, nah itu kita buat namanya program kerja, apa-apa saja yang kita lakukan, kegiatan pengawasannya, kita lihat pakai istilahnya ada ruang lingkup pemeriksaan itu batasannya itu brapa hari, berapa yang harus kita lakukan sehingga yang disini ada yang namanya 5 aspek yang kita lakukan pemeriksaan itu tentu disitu ada yang mempunyai dari anggota LPK ini kan makanya kakak ini di aspek tupoksinya, kakak A misalnya di aspek keuangannya, nanti itu yang dilihat. Untuk aspek keuangan mungkin dari sisi perencanaan dari pelaksanaannya atau dari sisi pertanggungjawabannya dari sisi pelaporannya juga harus nyambung dia. Disitu kita nilai termasuk juga dari sumber daya manusianya juga itu ada hal-hal mungkin dari sisi pelaksanaan bagaimana ini dari sisi perencanaan kok berapa si yang diperlukan disini cocok tidak, tugasnya apa , kita juga akan menanyakan hal begitu, tidak cukup dengan oh ini tugas ini begini sudah selesai dilaksanakan, tidak seperti itu. Ada proses semua itu, sehingga kalau sudah ini terkumpul kita lakukan istilahnya kan ada metre metingnya pendahuluannya kita informasikan kepada kakak tingkat, kakak tingkatnya untuk memanggil atau ngumpulin semua bidang divisi-divisinya itu kita berikan informasi kita akan lakukan uatu pemeriksaan, pada intinya LPK itu bukan mencari-cari kesalahan mari melakukan pembinaan dan pengawasan. Sehingga ini berjalan, walaupun memang ini ada temuan istilahnya nantinya kalau kita sudah selesai batasan waktunya misalnya 2 minggu sudah selesai kita kita eksposi. Kebetulan hari ini kita melakukan pemeriksaan ini karena kemarin sampai bulan oktober kan sudah selesai ya, tapi November kita mau ekspose ada kegiatan dari kwarcab sehingga sampai saat ini belum kita reschedule artinya kita buat jadwal ulang tanggal berapa yang bisa kita sampaikan potret daripada apa yang kita lakukan selama 2 minggu, kita kan kumpul ini kita ada konfirmasi sama teman-teman disamping juga kan begini, proses ini kita cari administrasinya kita di berikan kita lihat walaupun memang diadministrasi itu ada hal-hal yang kurang pas kita lakukan konfirmasi, teman-teman LPK pun melakukan konfirmasi disana itu ada yang namanya wawancara, ospoting termasuk juga validasi informasi-informasi yang lainnya kita lihat itu penting termasuk juga sisi pertanggungjawaban kita lihat kalau memang itu kurang kita utarakan kita sampaikan kita masukkan dalam temuan dan nantinya kalau itu sesegera sudah disampaikan dalam proses pemeriksaan itu sudah ditindaklanjuti nantinya itu dengan adanya pembinaan dari LPK maka temuan ini ditemukan hal-hal begini segera ditindaklanjuti dengan adanya inti blablabla, sehingga LHP itu bersih jadinya, artinya adalah kinerjanya dari teman-teman di LPK itu, kalau itu tidak simasukkan kan seolah-olah walau sudah dilakukan-dilakukan kalau tidak ada temuan kan. Makanya kita tetap, makanya di situlah tingkat independennya ya tanpa ada, tapi tetap kita informasikan biarpun namanya internal tetap dilakukan tindak lanjutnya.

Q: Tekait dengan hal tadi kak, kan di LPK itu berjumlah 5 orang 1 orang ketua

1 orang wakil ketua di dalam pembagian tugas –tugas tersebut apakah ketua dan wakil di bagi sama rata bersama anggota atau bagaimana pembagian tugasnya masing-masing?

A: Artinya begini, kita kan dalam melakukan pengawasan tentu juga dari sisi saya selaku ketua kita melihat dari kompetensi teman-teman anggota LPK itu oh ini cocoknya disini ini nanti tolong di periksa artinya diawasi dilihatlah atau dibina dari sisi aspek tupoksi misalnya terus seperti kak supri di aspek keuangan karena beliaunya kan, saya Tanya dulu pernah tidak mengelola keuangan, oh pernah ya cocok disana, ini tolong tugasnya di bagian keuangan. Makanya program kerja itu sebelum kita melakukan pengawasan tentu kita harus membuat PKP Program Kerja Pengawasan makanya disana itulah yang ini tugasnya ini, yang ini tugasnya ini, sudah ada kriterianya yang mau di tanyakan ini tanyakan ini tanyakan ini tanyakan, sehingga itu untuk mempermudah kita untuk melakukan, kalau memang ada tambahan-tambahan yang lainnya sesuai dengan pemikiran diluar dari itu, itu kan sebagai pedoman saja kan, ini tanyakan ini, ini tanyain ini tapi kalau memang ada tambahan-tambahan yang lain silakan tapi saya makanya berharap kan begini kalau yang namanya pemeriksaan kesalahan administrasi akan berdampak kepada finansial artinya apa misalnya kesalahan namanya regulasi ya kan ketentuan atau mungkin apakah tetapi akan berdampak kepada finansial karena aturannya belum dia buat tapi sudah di bayarkan ya jelaskan berarti salah berarti itu melanggar aturan kan begitu, terus misalnya seperti di sarana prasarana begitu misalnya pengadaan apakah ya gininya tetapi dia sudah adakan tapi belum di regulasi terjadinya hilang misalnya itu berdampak juga kekeuangan, nah untuk menghindari hal itu kanya sedini mungkin kita lakukan, namanya LPK itu memberikan warning, memberikan warning bagaimana pengelolaan keuangan itu berjalan sesuai dengan regulasi.

Q: Baik terimakasih bapak, tiang kembali dengan aspek keuangannya untuk di kwartir sebenarnya mengelola dana apa saja ya?

A: Iya kalau dari sisi keuangannya di kwartir kan mengelola dana hibah yang diberikan. Yang diberikan itu dana hibahnya berapa mungkin 500 ya, itu ada belanja langsung saja dan itupun sesuai dengan RAB yang dia buat. Yang di kwartir itu membuat RAB perencanaannya untuk apa itu kan sudah ada disana, sehingga kita kan hanya melihat sesuai tidak dengan RAB yang dia rencanakan kan opertanggungjawabankan misalnya ada pengadaan makan minum dalam kegiatan apa , menyentuh tidak ini harus kita lihat.

Q: Berarti untuk dana utama yang digunakan itu kan hibah, sesuai berdasarkan wawancara mencukupi apa tidak dalam melaksanakan kegiatan, ada yang mencukupi ada yang tidak, saya si lebih fokusnya apakah pernah kwartir itu memungut iuran karena kalau iuran dari peserta misalnya camvi di kemah itu kan diluar sebenarnya dari dana hibah apakah itu menjadi fokus catatan juga dalam LPK?

A: Tidak, yang ini tidak sampai kesana melihat itu, kalau yang namanya, sebenarnya begini, sepanjang itu masuk dalam RAB dalam kalau dia meminta misalnya sumbangan dalam itu kan per person personal dia kan

kita kan tidak tau, kalau dia menceritakan kenapa misalnya dalam melakukan kegiatan artinya di dalam suatu pelaksanaannya itu kurang begitu misalnya terus kita minta uang di dalam dasarnya apa, kan begitu, harus kita kalau namanya kita harus sesuai dengan regulasi aturan yang mengatur, makanya saya bilang kalau memang itu tanpa ada dasar meminta atau mungkin memungut ini itu kan sama dengan sabet pungli kena lagi nanti makanya selama ini kan tidak ada yang namanya informasi seperti itu artinya kita liat dalam LPK itu, saya selaku ketua itu mewanti-wanti kalau memang ada permasalahan tolong dibicarakan di informasikan kepada kita, sehingga apa yang misalnya yang tidak pas kan kita bisa kasi tau, jangan nanti orang lain yang tau kita sendiri tidak tau kan beda nanti.

- Q: Sesuai dengan wawancara awal di seluruh bali si seperti itu, karena saya berangkatnya dari ADART sumber keuangan pramuka itu kan dari iuran anggota, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Seperti itu si, soalnya di beberapa kwartir fokusnya di hibah karena itu memang dana yang besar yang diterima tapi tidak menutup kemungkinan sumbangan ada seperti seperti kemarin di covid itu berkolaborasi dengan instansi mana atau yayasan mana memberikan sumbangan begitu ada, apakah itu masuk juga kebagian dari yang menjadi pengawasan dari LPK atau tidak seperti itu.
- A: Artinya begini, kalau yang namanya ada masuk di dalam pengelolaan mungkin teman-teman di LPK yang pas memeriksa atau mengawasi di rencana keuangan ada tidak sumbangan-sumbangan itu masuk terdaftar di sana. Kalau di kas umum tidak ada, tidak masuk. Artinya kan itu yang kita lihat, kalau memang itu tidak ada artinya begini kalau itu biasanya bantuan kalau kwartir itu sebagai pelaksana dimintai bantuan untuk mendistribusikan uangnya itu masuk di mungkin namanya kan kwartir aggotanya itu di bidang-bidangnya itu kan semuanya di lintas SKPD yang yang pegang. Disini kan sebagai pramuka itu sendiri tentunya untuk mempermudah karena pramuka itu dari kota sampai ke kecamatan sampai ke dasa ada. Karena sekolah-sekolah itu lebih mudah dari sisi pelaksanaan kegiatan, bantuan masker begitu misalnya bukan gininya yang diberikan misalnya di pramukanya yang diberikan masker sekian. Artinya di SKPD atau di dinas yang menangani bantuan itu yang diterima disana, pramukanya dimintain bantuan dalam hal pendistribunya. Artinya itu kita hanya bisa melihat sepanjang apa yang ada di hibah itu, bagaimana sisi pertanggungjawabannya tepat waktu atau tidak sesuai tidak, menyentuh sasaran atau tidak begitu. Jadi secara umum itu kita LPK memeriksa pada fokusnya pada dana hibah, karena kalau untuk dana iuran dan lainnya itu kan tidak di masukkan ke kas umum dan lain-lain, biasanya kan kalau mungkin ada dana iuran dan lain-lain biasanya masuk kekegiatan dan itu laporan pertanggungjawabannya itu ada di laporan kegiatan, terpisah, biasanya tidak mengkhusus di laporan dana hibahnya. Seperti itu
- Q: Walaupun terpisah secara laporan kegiatannya tidak menjadi bagian dari pemeriksaan juga ya sehingga nanti di laporan akhir di kwartir itu selain hibah juga secara menyeluruh bisa disajikan bahwa di 1 tahun itu ada sumber lain yang di kelola.

- A: Begini, ini kan baru pertama ya, nanti yang kedua nanti yang ketiga mungkin tahun berikutnya, kita akan menyasar seperti itu, kita akan melihat berapa si misalnya dana hibah itu sumbernya dari mana oh dari APBD terus misalnya ada lagi sumbangan mana saja sumbernya dananya yang memberikan dana hibah, itu kan ada hibah ke pramuka itu ada hibah itu kan ada dari pemda mungkin dari CSR yang manalah itu yang nanti kita juga fokuskan tapi untuk sementara ini dalam 2 tahun lah sekarang baru kita mengawali dengan dana hibah itu kita lihat kalau sudah berkemban.
- Q: Saya tambahkan lagi 1 kak, kalau arah kebijakan di pramuka itu kak sampai tahun 2045 itu kan semua komponen lembaga di optimalkan termasuk LPK termasuk juga diharapkan masing-masing kwartir itu ada badan usaha sehingga tidak hanya bertumpu pada hibah pemerintah tetapi diharapkan juga bisa bangkitlah menciptakan dana internal tersebut terkait di buleleng bagaimana kak badan usahanya?
- A: Masih dalam proses kalau tidak salah, sudah ada wacana untuk membuat kedai pramuka tapi untuk pelaksanaannya belum tau untuk pastinya itu. Intinya sudah ada pemikiran arah kesana, saya lihat soalnya disana itu ada pakaian pramuka termasuk juga, mungkin kalau mau berkembang itu kan yang dari ya mungkin SD SMP SMA langsung mengambil disana itu pengadaan itu, bisa aja kan kalau ingin mau berkembang. Tidak cukup sampai disitu saja mengandalkan dana hibah kan gitu iurannya itu bisa di manfaatkan. Ada iuran anggota ada namanya, biasanya ketika ada kegiatan dan ketika kekurangan dana baru mulai melakukannya. Ada yang kalau pramuka-pramuka di SD mungkin atau di SMA lain-lain mungkin ada iuran-iuran wajibnya kalau untuk penggalang penegak itu ada biasanya. Kadang-kadang pramuka kan hobi kesenangan pokoknya, walaupun di bebani, kadang-kadang pihak orang tua kan sudah disana untuk kegiatan ini tapi dimintain juga sumbangan kan begitu. Tapi itulah yang namanya, apalagi seperti di SD itu kan ekstrakurikuler harus wajib tapi sudah wajib dibebani lagi orang tuanya untuk beli ini beli itu. Tetapi penentuan dan lain-lainnya itu tetap diputuskan dalam rapat.
- Q: Untuk terkait dengan keuangan di pengawasan pemeriksaan ada standar khusus yang dipakai
- A: Artinya kalau pemeriksaan kuangan itu kita memakai standar acuan perbup karena itu kan mengelola dana hibah perbup kita pakai, misalnya kan dana hibah harus dipertanggungjawabkan tepat waktu itu kan ada di perbupnya, harus sekian persen itu ada juga perbup mengatur, terus pertanggungjawaban harus membuat nota pesanan ini ini ini sampai dengan laporan. Kalau misalnya ada salah satu yang belum dipenuhi makanya itu kita kasi tahu
- Q: Berarti secara garis besar memang berangkat dari hibah. Apakah LPK pernah menggunakan jasa akuntan publik dalam proses pemeriksaan?
- A: Selama ini belum. Biasanya kalau yang melakukan akuntan publik itu dari kwartirnya, bukan dari LPK. Kwartir yang melakukan itu.

- Q: Soalnya di ADRT ada, menggunakan jasa akuntan publik
- A: Ada, biasanya akhir tahun atau awal tahun informasi kemarin dari kwarcab ada biasanya akuntan publik dari disediakan dari dinas pendidikan audit eksternal, karena kan dari dinas pendidikan yang memberikan hibah dalam hal ini kan pemerintah daerah sebagai letting sektornya kan dia.
- Q: Terkait tadi juga saya tanyakan, ada katanya Cuma saat saya cek leporannya ternyata kantor jasa akuntan bukan audit dari akuntan publik
- A: Maksudnya kantor jasa akuntan, kan itu yang melakukan audit.
- Q: Berarti bukan audit memberikan opini ya?
- A: Bukan, bukan memberikan opini dia, dari sisi pengelolaannya saja, kalau yang bisa memberikan opini itu hanya BPK, dia dari sisi pengelolaan keuangan akuntan publik itu sesuai tidak dana hibah itu di pergunakan atau tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan, terus bagaimana pengelolaannya trus bagaimana sisi pertanggungjawabannya dia kan khusus dari keuangannya saja. Kalau makannya akuntan publik dari khusus mengenai keuangannya saja kalau di LPK bukan di keuangannya saja artinya 5 aspek itu kita lihat. Kalau kabupaten lain belum melakukan kegiatan mungkin kerjanya di LPK itu, saya kan tidak mau namanya kita sudah di bentuk tidak ada kinerjanya kan nanti kita malu jadinya ya, biarpun kita ngayah istilahnya, tapi ngayah itu sebatas kemampuan kita punya kita punya kita dalam bentuk ya ini ngayahnya kepada pemerintah daerah ya ini.
- Q: Oh berarti terkait dari pemeriksaan akuntan publik itu dari aturan perbup juga ya pak? Jadi minimal mendapatkan hibah 500 juta wajib itu di jelaskan disana.
- A: Iya itu dijelaskan disana, paling tidak dari KAP Kantor Akuntan Publik.
- Q: Untuk selanjutnya tentunya LPK sudah bekerja dan memiliki beberapa temuan-temuan kekeliruan atas dari aspek yang tadi apakah dari seluruh hal tersebut merupakan tanggungjawab LPK untuk sampai di benahi dari temuan-temuan tersebut. Jadi begini, kita kan melakukan pengawasan, terus ada yang namanya temuan yang sesuai dengan ini itu kan harus sesegera ditindaklanjuti oleh kwartir yang menindaklanjuti. Menindaklanjuti oh misalnya oh ini nota pesannya belum dibuat itu misalnya atau mungkin dari sisi pelaporan kemudian gabung disini belum dipisah, atau mungkin dari sarana prasarana atau inventarisnya belum teregistrasi atau terdaftar mungkin itu dia yang ditindaklanjuti bukan dari LPKnya. LPKnya kan menemukan hal begitu daripada nanti orang lain nanti yang menemukan lebih bagus kan internalnya menemukan dulu sehingga itu diperbaiki pada saat ada pemeriksaan dari eksternal tidak ada temuan-temuan hal seperti itu.
- Q: Jadi lebih sebenarnya ke pembinaan
- A: Pembinaan kita, mengembalikan juga pembinaan
- Q: Disini LPK dilibatkan dalam kegiatan apa saja sebenarnya di kwartir?
- A: Iya dilibatkan dalam seluruh kegiatan, dari proses perencanaan diundang

kita

Q: Dalam hal ini kalau dari aspek kegiatan kan berjenjang kak, kalau dari kak suprik sudah mengetahui dari kwarda dibawahnya kwarcab kemudian ranting, kalau di kwartir cabang kalau aspek keuangan khususnya apakah ada reporting keatas ke kwarda itu kak?

A: Tidak ada

Q: Berhenti sampai di dinas pendidikan

A: Iya betul. Artinya kan kita Cuma diberikan dana hibah dari pemerintah daerah kabupaten

Q: Berarti memang khusus keuangan itu masing ini saja ya tidak ada maksudnya karena kwarda itu diatasnya kwarcab jadi juga perlu mengetahui pertanggungjawaban.

A: Sebagai pertanggungjawaban tetap diinformasikan tembusanlah istilahnya.

Q: Untuk raker itu kan tentunya diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebelum membahas rencana anggaran seperti itu yang dibawakan pada saat itu berarti sudah melalui proses pemeriksaan BPK

A: Iya harus.

Q: Apakah laporan yang di periksa selama ini terkait anggaran dan realisasi sudah memenuhi efisiensi

A: Kalau yang namanya efisiensi kan sudah semuanya efisiensi artinya kan sudah memenuhi standar efisiensi dan maupun efektifnya kan itu, laporan-laporan kalau kita lihat dikasi dna 500 itupun masih kurang istilahnya, kalau namanya anggaran itu masih kurang di sisi perencanaan di kasi 500

Q: Bagaimana dengan daerah lain yang saya lihat Cuma 50 juta setahun.

A: Disini sudah paling bagus, besar disini dikasi Cuma disini masi kita kelola sesuai dengan sasaran tujuan marwahnya dari pramuka itu kan

Q: Terkait dengan hambatan atau kendala kwartir dalam pengelolaan atau LPK dalam pengelolaan ada?

A: Kalau dari sisi pemeriksaan kwartir itu tidak ada hambatan sebenarnya, hambatannya karena mungkin kita namanya anggotanya itu adhoc ya kita melakukan pengawasan misalnya mengadakan ketempat ke kwartir si A belum bisa karena ada kesibukan lain, jarang kita bisa ya gini, namanya ya adhoc agak susah bisa ketemunya makanya seperti sekarang misalnya kita paling bisa dengan kak supri yang lainnya masih sibuk tempat kerjanya masih di grogak iya itulah kendalanya, artinya tidak seluruhnya seperti begitu ada hal-hal yang harus kita usahakan untuk bisa ketemu. Tapi itu bukan menjadi kendala yang sangat riskan tapi itu tetap kita harus bisa kerjakan, dan pelaksanaan itu bisa kita selesaikan tepat waktu.

Q: Sudah langsung proses cara mengatasi kendala seperti itu ya meluangkan waktu lah, meluangkan bisa bersama-sama bertemu. Yang penting

sebenarnya seperti yang sudah ketahui kan pengurus, LPK tidak ada di gaji samasekali, tadi saya tanyakan ada penggajian, oh tidak, yang di gaji hanya staf saja itupun honorerlah tidak bisa di bilang gaji seperti itu kak tingkat bilang. Bisa di paparkan mungkin dari kak supri dan kak omar apa yang melandasi kok mau bekerja

A: Namanya jiwa pramuka itu gimana, asas pramuka kan sukarela, makanya itu yang dipegang pramuka pengabdian nyanyian hymne pramuka itu dan sukarela. Makanya ajangan sumbangan wajib, jangan begitu yang namanya sumbangan sukarena tidak ada wajib.

Q: Soalnya menarik tadi dari kak tingkat, sudah ngayah payah mayah seperti itu

A: Iya memang begitu jiwanya pramuka kan seperti itu, kanya paruka itu sampai tingkat pusat sampai ke desa itu gampang, tinggal gebug aja dia bilang, tolong digerakkan ini langsung, istilahnya naluri ke manusia yang namanya itu sudah terbangun dia, suka membantu, senang dia, dari pada saya bengong disitu tanpa kegiatan lebih capek, dia dikasi kegiatan karena sudah senangnya, biarpun capek tapi tidak terasa. Tapi namanya kalau sudah bergabung di pramuka ini capeknya tidak ada, nanti kalau sudah duduk bengong baru merasa, itu naluri kemanusiaan, sosiologi kemanusiaannya kan begitu.

Q: Ngemak gae lebih seperti itu ya kak?

A: Iya, tapi kalau namanya sudah bergabung di pramuka apalagi kalau sudah pakai baju pramuka dengan kelengkapan atribut yang sudah sama disuruh begini sudah langsung menyebar tidak perlu lagi di perintah, itu kan mandiri. Tapi nanti kalau sudah di buka bajunya diam baru dia berpikir. Tapi kalau di tempat lain saya tidak tau apakah sama, apakah betul-betul, saya juga tidak tau saya juga baru pertama mengikui ininya, memang kalau kita lihat ini pramuka memang seperti itu, itu dah ngayah, payah, layah

Q: Yang terakhir sebenarnya ingin saya tanyakan terkait dengan pramuka ini kan bisa jalan, karena ada sokongan dana dari pemerintah, seandainya pemerintah berhenti memberikan dana bagaimana menurut kakak, apakah ?

A: Artinya kan begini dengan sekarang adanya sekongan dari pemerintah itu, itu yang kita manfaatkan sebaik-baiknya seefektif mungkin dan akuntabel. Ya nanti kalau tidak ada sokongan itu mungkin nantinya itu kita pikirkan kebelakang namanya senang, senang dulu kalau yang namanya cinta kita lakukan disana ada jurang tetap kita lakukan ya namanya sudah cinta, makanya yang sudah ada ini kita pelihara kita tingkatkan dan itu harus punya komitmen, itu saja sebenarnya, yang masalah nantinya besok tidak ada sokongan gini sudah berhenti jauh dari itu tanggungan api artinya sepanjang ini mari kita kelola dengan sebaik-baiknya kita tingkatkan patut misalnya dari sumber SDMnya kita tingkatkan, karena kedepannya sudah beda lagi, pramuka yang jaman dulu, dulu saja tidak ada danapun bisa jalan, artinya dulu tidak ada sokongan dana hibah sampai sekarang dibuatkan dana hibah begini yang bisa di berikan hibah setiap tahun hanya pramuka dan koni, yang lainnya kan tidak ada.

Q: PMI?

A: Pemberian hibah tidak boleh, pemberian hibah cukup 1 kali, karena ketentuan hibah yang berulang-ulang kali dapat setiap tahunnya koni dan pramuka, makanya dengan adanya begitu mari kita kelola dengan baik, orang dulu saja tidak dikasi hibah bisa jalan, apalagi sekarang di kasi hibah, biarpun kecil jangan diliat ini semangat gotong royongnya. Kita lakukan ini dulu, makanya yang penting pengelolaannya itu harus semuanya komponen itu harus saling mendukung kegiatan itu. Artinya kepercayaanlah disana ini uangnya dibawa kemana ini, lihat dulu, ya namanya orang tidak tau kan boleh saja punya persepsi seperti itu, saya pun juga, namanya pemeriksa itu kan kita juga pasti pikirannya ke negative, kalau orang pemeriksa itu negative, dikasi dana segitu masih kurang, dipakai apa uang itu coba lihat dulu, untuk kemajuan itu harus negative dulu baru kita bisa jangan lihat positifnya, biar untuk bisa meyakini makanya LPK itu untuk meyakinkan bahwa pengelolaan keuangan yang ada di kwarcab berkaitan dengan pengelolaan dana hibah ini buktinya, iya kan?

Q: Berarti sudah ada LHP dari LPK,

A: Sudah

Q: Misalnya tadi saya Tanya, ada pemeriksaan dari akuntan publik, oh ada bisa saya liat, LPKnya ada tergabung disini? oh terpisah di bawa sama LPKnya seperti itu

A: Yang tahun berapa?

Q: 2021

A: Ada di kwartir sudah ada belum di tanda tangani oleh pengurusnya, belum di kasi ke kita, kan begini sama dengan in tahun 2022, ini nanti saya ekspose sudah di setuju tanda tangan, kita pegang 1 dia dapat 1, jadi sekarang keduanya di pegang sama dia kalau dia bilang tidak ada kan sama saja berarti mulai lagi administrasinya masih mundur.

I. Jadwal Wawancara	
1.	Tanggal, hari : 8 Desember 2022, Kamis
2.	Waktu mulai dan selesai : 11.00 WITA s.d 12.48 WITA
II. Identitas Informan	
1.	Nama Informan : 1. Ni Nyoman Kartini, S.Sos 2. Drs. I Made Arawan, M.M
2	Jenis kelamin : 1. Perempuan

			2. Laki-Laki
3.	Usia	:	1. 50 Tahun 2. 62 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	1. Staf Pramuka Kwarcab Denpasar 2. Sekretaris I Kwarcab Denpasar
5.	Pendidikan terakhir	:	1. S1 2. S2
III. Pertanyaan & Jawaban			

Q: Mulai kapan kwartir mulai menerima dana hibah

A: Hibah dari tahun 2018. Dana hibah yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk program kerja di kwartir cabang dan juga kita ada kegiatan di kwartir ranting, di Denpasar kan ada 4 kwartir ranting Denpasar Utara, timur, selatan dan barat. Untuk kegiatan jambore ranting dari kwartir cabang mendanai tapi pelaksanaannya di kwartir ranting.

Q: Untuk sumber dana nike yang diperoleh langsung dari disdikpora ya? 2017 itu dana campur?

A: Iya dana campur dari tahun 2018, 2019, 2020 dari BPKAD langsung.

Q: Ini langsung dana hibah?

A: Iya hibah, tapi merosesnya itu di BPKAD, sumber dananya di BPKAD. 2021, 2022 baru dananya dari disdikpora

Q: Bisa di bantu kak, bagaimana proses pengajuan hibahnya?

A: Pertama, dana hibah tahun 2022 februari 2021 kita sudah mengajukan kepada bapak walikota, terus dana itu diproses proposal kita awal tahun 2022 baru kita tahu berapa kita dapat dana hibah itu, proposal 1 tahun sebelumnya kan begitu kita tahu berapa dapat dana di awal tahun 2022. Jauh jaraknya

Q: Untuk februari di tahun sebelumnya itu, itu maksimal batas waktu pengumpulan proposalnya?

A: Iya, dari sana dah kita buat proposal RAB kita diajukan ke pak walikota

Q: Biasa untuk proposal nike di setuju menyentuh angka proposal apa biasanya di kurangi?

A: Biasanya di kurangi, tergantung juga dana yang ada di pemerintah kota, kita tidak sama mendapatkan bantuan hibah dari tahun ke tahun tergantung usulan yang kita ajukan dan juga tergantung dana yang ada di pemprov kota. Di awal tahun baru kita tahu berapa dapat dana. Lagi kita menyesuaikan proposal yang kita ajukan itu dengan dana yang kita dapatkan. Penyesuaian

lagi, pasti berkurang. Tidak pernah pas

Q: Berarti untuk proposal ini sebelumnya melalui proses musyawarah/rapat dulu?

A: Ya Raker, Rapat Kerja Cabang

Q: Siapa saja yang dilibatkan dalam rapat kerja proposal atau anggaran ini?

A: Andalan dan Pelatih, andalan itu pengurus maksudnya. Unsur pimpinan itu Pengurus, andalan dan pelatih itu kita libatkan karena kan dia pelatih mau mengadakan kegiatan apa, semua unsur yang ada di kwacab.

Q: Kurang lebih setelah melalui itu, kira-kira berapa mata anggaran atau kegiatan itu ya yang disusun?

A: Yang disusun sampai 15 kegiatan, kegiatan siaganya apa, penggalangnya apa, penegaknya apa. Dan itu tidak tetap seperti itu setiap tahun, karena ada kadang-kadang kegiatan nasional, kegiatan provinsi kan gitu dia masuk karena kita mengadakan raker di cabang setelah rapat kerja nasional, rapat kerja daerah, baru kita ke rapat kerja daerah jadinya ada jamboree nasional gitu misalnya pas kita ada raker cabang kita tidak ada berita begitu kan apa yang kita buat, jangan-jangan kita membuat kegiatan tau-tau biaya operasional tidak tercantum. Mengacu jadinya yang kita rencanakan. Makanya rakercab kita ini pasti setelah rakernas dan rakerda begitu. Biar tau kegiatannya kita sesuaikan ada tidak kegiatan nasional ada tidak kegiatan itu yang kita fokuskan begitu baru kegiatan internal.

Q: Berarti menyesuaikan saja ya. Kalau di mata anggaran seperti di cabanng-cabang sebelumnya itu kan mempostkan untuk biaya kesekretariatan kemudian ada biaya kegiatan begitu

A: Kalau kita disini sama dana kegiatan dan ada dana kesekretariatan itu menyangkut pertama aci-aci terus BBM untuk kendaraan, biaya perawatan computer. Kalau ATK tidak tiang anggarkan di kesekretariatan tapi per kegiatan ada ATK. Karena kita buat dana cadangan siapa tau kita mendadak disuruh mewakili, Denpasar mewakili kegiatan ini, kita juga anggarkan ke sekretariatan dana cadangan untuk kegiatan ke nasional, perawatan mobil lagi 1.

Q: Disini mobilnya asset napi?

A: Aset pemkot kota Denpasar, kita dikasi hak pakai namanya, tapi merawatnya kita disini yang menganggarkan BBM dan biaya perawatan lainnya.

Q: Di kwartir cabang kota Denpasar mempunyai rekening Bank?

A: Punya BPD

Q: NPWP ada disini ya?

A: Ada, atas nama gerakan pramuka cabang kota Denpasar

Q: Berarti setiap melakukan pengadaan terkait dengan pajak ini menggunakan

- NPWP kwartir apa disdikpora kak?
- A: Dari tahun 2021 ini kita menggunakan NPWP disdikpora.
- Q: Terkait dengan proses turunnya dana di BPD itu sekaligus?
- A: Dari tahun 2018-2020 sekaligus, selama kita didikpora tahun 2021-2022 per triwulan
- Q: Bertahap ini ya kak?
- A: Iya pertriwulan
- Q: Terkait dengan pengelolaan penarikan ini bagaimana alurnya itu kak?
- A: Begini setelah kegiatan itu berjalan baru kita buat pertanggungjawaban berupa kwitansi, nota pesanan, nota kan begitu setelah itu baru kita bisa proses ke bendahara dan nanti bendahara memberikan saya kuasa selaku staf untuk mencairkan dana di bank dan dana itu langsung di transfer ke rekening rekanan, kita tidak menerima uang tunai lagi, dana tunai kerekanan dana tersebut langsung di transfer. Tidak ada dana tunai ke rekanan langsung
- Q: Berarti niki prosesnya piutang gitu dulu ya?
- A: Iya
- Q: Berarti kegiatan berlangsung dulu sudah ada ininya baru bayar begitu ya kak?
- A: Iya
- Q: Kira-kira pernah ada penalangan dana dulu?
- A: Tidak ada karena kita tidak punya dana
- Q: Terkait dengan itu, jenis laporan keuangan apa saja yang dimiliki di kwartir?
- A: Kita punya pertanggungjawaban dari semua kegiatan itu, ketika kegiatan itu berakhir per 31 desember semua sisa dana hibah kita harus kembalikan ke kas daerah, kalau ada sisa. Semua laporan berapa realisasi, misalnya kegiatan pesta siaga anggaran kita berapa realisasinya berapa sisanya berapa. Nanti sisa itu per 31 desember semua dikembalikan ke kas daerah sampai bunga uangpun semua dikembalikan. Jadinya rekening kita 0 kecuali uang buka rekening 100 ribu itu saja yang boleh ada di rekening 31 desember itu sisanya sudah kembali ke kas daerah.
- Q: Memang peraturan didenpasar seperti itu?
- A: Iya, kalau dulu tahun 2015 pernah dapat dana hibah sisa dari dana hibah itu masih tetap menjadi haknya pramuka bisa di gunakan untuk kegiatan lain, kalau tauh 2018 sampai sekarang semua dana hibah kembali ke kas daerah.
- Q: Berbeda dengan di buleleng kak, kalau di buleleng sampai saat ini kalau ada sisa bisa dipakai untuk kegiatan lain, tapi kalau disini dikembalikan sama seperti di di gianyar juga di kebalikan.
- A: Iya tergantung kebijakan daerah masing-masing.

- Q: Untuk turunnya dana ini di bulan apa kak yang di tahun 2022 misalnya kalau sudah di acc?
- A: Paling cepat bulan maret. Jadi prosesnya seperti ini januari baru kita tahu berapa kita dapat dana sekarang kita membuat SK menunggu SK dari walikota SK dana hibah, setelah SK itu turun baru kita membuat NPHD naskah perjanjian hibah pakai integritas apa kelengkapan yang lain itu baru kita bisa melakukan pencairan dana hibah itu paling cepat biasanya maret.
- Q: Kalau seandainya ada kegiatan di bulan januari sama dengan maret itu bagaimana?
- A: Begini biasanya kalau kita di Denpasar kan biasanya pesta siaga di bulan februari, kita memang menganggarkan triwulan satu sekian triwulan dua sekian kadang-kadang bisa kita ngebon di daganganya tapi kita tetap berusaha agar pencairan dananya segera turun karena SK yang agak lumayan juga. Paling bulan februari baru bisa mengajukan SK. Kalau sekarang sudah mendingan cepat prosesnya di hukum biasanya. Di hukum biasanya yang lama sampai keluarnya SK, kan karena nunggu TTD pak walikota, kalau tidak ada SK kita tidak bisa buat NPHD naskah perjanjian hibah, kalau naskah perjanjian hibahnya di tanda tangani oleh pak kadisdikpora kalau SKnya pak walikota
- Q: Terkait sumber dana, apa ada sumber dana lain dari pemerintah selain hibah?
- A: Tidak ada
- Q: Kwartir memiliki badan usaha apa tidak?
- A: Tidak punya.
- Q: Koperasi juga tidak?
- A: Tidak
- Q: Kwartir pernah melakukan penggalan dana?
- A: Tidak ada
- Q: Memungut uang kegiatan atau memungut uang pendaftaran peserta pernah kak?
- A: Tidak, kalau ada kegiatan nasional misalnya berapapun biaya camvi APBD yang punya, dari hibah dianggarkan
- Q: Termasuk kalau ada pakaian?
- A: Kita yang giniin, kecuali kita sudah anggarkan dia lain, kadang-kadang peserta anak-anak muda itu ingin punya ini baru urunan dia. Kalau misalnya dia beli tas misalnya itu kan tidak harus, ya urunan dia untuk membeli itu. Pribadi lah, sampai saat ini masih bisa Denpasar memfasilitasi hampir 7 juta per orang kegiatan nasional itu, transport kemudian pakaian ya semua, ransel untuk nasional kita tanggung, sampai uang saku juga kadang-kadang.

- Q: Bararti sudah dianggarkan ?
- A: Iya semuanya sudah di anggarkan, kadang-kadang uang saku kita anggarkan di kabupaten lain kan tidak ya,
- Q: Terkait dengan LPK kan baru di bentuk ini kak ya, untuk proses pembentukannya pada saat musyawarah, memilih orang-orang itu kan ada pengajuan oh si A, si B, bagaimana kira-kira?
- A: Waktu kita rapat setelah ka kwarcab terpilih dewan cabang barulah beliau ka kwarcab mencari kira-kira siapa yang cocok kan jelas yang dicari orang-orang yang berkecimpung di keuangan, biar taulah, itu saja prosesnya sederhana saja, kemudian anggota-anggotanya kita ambil dari disdikpora yang juga terkait dengan masalah ini biar tidak nyapliir. Masalahnya orang-orang di kwarda misalnya bu nyoman ini mengusulkan kegiatan kan diperiksa kan nyambung jadinya diperiksa dari awal sudah, cuma yang saya bilang tadi itu pak ketua itu meriksanya karena ini baru ya apa memeriksa di musyawarah cabang kan 5 tahun apakah akhir tahun ini tidak tau juga.
- Q: Di muscab nike 5 tahun sekali ya, untuk 1 tahun sekali itu pertanggungjawabannya ada lagi musyawarah?
- A: Diraker tidak membahas itu, menyinggung kegiatan saja. Kita menyampaikan pertanggungjawaban kepada disdikpora dan ke BPKAD setiap tahunnya laporan kita, kalau 5 tahun baru ke peserta. 5 tahun dekali dengan di musyawarah itu.
- Q: Berarti raker itu tidak menyinggung terkait dengan hibah itu? Tidak ya, langsung sudah di bentuk sesuai dengan aturan laporannya langsung diajukan ke disdik dan ke BPKAD.
- A: Iya
- Q: Maksimal batas waktu pelaporan atau bagaimana kak?
- A: 10 januari tahun berikutnya, kalau sekarang 10 januari 2023 paling lambat
- Q: Kadang-kadang ada keterhambatan disini kak?
- A: Sementara untuk Denpasar tidak pernah, malah maju, saya berusaha kadang-kadang awal januari sudah bisa saya sampaikan laporannya karena kita tanggal 31 desember penyetoran sisa dana hibah, januari awal sudah selesai laporannya.
- Q: Terkait dengan LPK tadi nike kan pasti diambil dari orang-orang yang mempunyai kemampuan, kira-kira ada penolakan tidak?
- A: Kita pengurus kwartir cabang Denpasar ini kita mengambil orang-orang berprestasi misalnya waka 1 masalah waka bina muda contoh ya, kita ambil kadis kuminfo, dulu kan di kesra dia, kemudian waka humas kita ambil kabag humas, waka hukum kita mabil kabag hukum ya begitu, kemudian untuk urusan orang dewasa kita ambil dari disdikpora sekdisnya kemudian waka kasek orang BPKAD bendahara bu putu kusuma bendahara kodya jadi kita ambil orang-orang yang tau tentang itu sehingga apa yang kita rencanakan kan lancar jadinya, jadi tidak ada hambatan, kalau masalah-

masalah SK kita telfun yang di bidangnya langsung dah, karena beliau merasa bertanggungjawab. Kalau yang di bawah baru kita secara teknis, waknya ini sekretarisnya orang pramuka sapa anggota. Ketuanya kita ambil top-topnya disitu, sekretaris sudah orang-orang teknis semua. Itu yang kita kejar di Denpasar sehingga roda kegiatannya ini sampai dibidang tadi itu lancarlah kalau kita mengajukan dana pasti cepat. Apa yang kita ajukan sudah sesuai dengan rapat-rapat kerja dari Jakarta, provinsi itu kita ajukan.

Q: Berarti penunjukkan LPK ditunjuk langsung?

A: Tidak, kita pertemuan pimpinan lah ka kwarcab terpilih kan beliau yang tau orang-orangnya. Tidak ada yang nolak. Sama dengan waka-waka itu Ka kwarcab yang menunjuk, ditelfun langsung bilang siap. Makanya ka kwarcab terpilih mencari orang-orang birokrat. Wakil walikota

Q: Disini kan ka kwarcab di bawahnya ada ketua harian?

A: Ada, keinginan ka kwarcab juga karena beliau sibuk, masalah keuangan pun dilibatkan ke ketua harian. Menandatangani SPJ juga

Q: LPK kan baru di bentuk belum bekerja ya kak?

A: Sekarang kita tunggu apakah beliau mengambil setiap tahunnya atau pada akhir masa jabatan kan pada musyawarah cabang. Disitu kan laporan keuangan masalahnya tanggung jawab keuangan disana.

Q: Kira-kira apa yang menyebabkan LPK belum di bentuk ?

A: Kita juga mengikuti aturan dari kwarnas saja, kalau dari kwarnas ada ya kita ikuti. Bagus juga agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Q: Iya, soalnya di 2017 di Jakarta kan ada korupsi, di Bandung yang terbaru kak.

A: Itu tergantung karakter orang ya, kesempatan, kita mencari keselamatan saja.

Q: Berkaitan dengan pengajian ada yang digaji?

A: Tidak

Q: Kalau untuk staf bu?

A: Kalau di dana hibah kita tidak anggarkan kak karena tiang tenaga kontrak di disdikpora yang diperbantukan di pramuka. Jadi saya di disdikpora

Q: Berarti secara SK kakak masuk di SK disdikpora?

A: Iya SK disdikpora

Q: Selama ini kalau LPK belum di bentuk, siapa saja yang menjadi pengawas dalam system pengelolaan keuangan?

A: Bendahara langsung bersama ketua harian

Q: Kalau mau mencairkan itu kan butuh tanda tangan beliau ya kak?

A: Tanda tangan keduanya kak bendahara dan ketua harian. Saya selaku staf

diberikan kuasa untuk pencairan dana di bank, surat kuasa untuk pencairan dana di bank, surat kuasa yang di tanda tangani oleh beliau berdua

Q: Untuk laporannya itu pernah menggunkan jasa akuntan publik tidak?

A: Tidak, belum pernah

Q: Kalau pemeriksaan BPK ada kak?

A: Ada setiap tahun. Begitu kita melaporkan januari itu semua kalau di Denpasar itu di panggil memberikan keterangan. Kita kan membuat laporan setiap tahun itu. Setiap tahun kita di panggil, paling-paling apa di tanya kenapa kok masih sisa. Dulu pernah kita waktu covid itu hampir 1,1M dananya kembali hampir 80%, kegiatan hanya januari februari habis itu sudah covid 2020 terakhir muscab 2020, itu saja kegiatannya 2, kegiatan nasional semua ditunda. Makanya saya di Tanya sama BPK kenapa uangnya tidak dipakai? Bagaimana saya bisa pakai kegiatan kita kan melibatkan siswa sedangkan siswa tidak oleh keluar, kan kembali jadinya uangnya.

Q: Apakah ada temuan setelah itu atau perbaikiakan?

A: Tidak, semua sudah sesuai, karena dari awal bendaharanya yang sudah bikin. Tidak pernah ada perbaikan, belum pernah mudah-mudahan tidak pernah.

Q: Apakah seluruh pengurus kwartir ini boleh mengakses data keuangan? Laporan pertanggungjawaban?

A: Boleh, kan semua kita terbuka, dimusyawarah itu semua kita kasi laporan keuangan. Seperti 2020 kan sisa uangnya kita tanyakan ini dimana sisa uangnya ini ? ke kas daerah, karena kita bukti semua ada, bukti transfer, bukti pengembalian dana ada, barang kali teman-teman kan banyak yang tidak tau, kalau ada sisa bisa digunakan untuk hal lain, kan tidak bisa tidak segampang itu ada prosesnya yang banyak.

Q: Terkait dengan laporan pertanggungjawaban ini langsung dari kwartir ke pemerintah ke disdikpora dan ke BPKAD, apa ada tembusan laporan pertanggungjawaban itu disampaikan di kwarda?

A: Tidak ada

Q: Kalau kegiatan?

A: Kalau kegiatan baru kita, kalau keuangan tidak itu intern kita di Denpasar. Kalau SK begitu kegiatan apa gitu baru tembusan kita ke kwarnas dan kwarda.

Q: Karena secara structural cabang ada di bawah kwarda kwarnas kalau penerbitan SK pun LPK itu di rekomendasi dulu dari bupati kwarda. Pertanggungjawabannya dari kwarda istilahnya yang menunjuk memberikan mandate itu saya kira ada penyampaian kesana.

A: Tidak pernah.

Q: Berarti cukup sampai di pemerintah?

- A: Laporan kita ditujukan kepada disdikpora tembusannya kepada BPKAD kepada Inspektorat
- Q: Karena dananya turun dari disdikpora?
- A: Iya
- Q: Setiap tahun ada pembelian asset tidak?
- A: Pembelian asset tidak kayaknya, kalau kita gini disdikpora yang giniin kita. Seperti ac itu disdikpora yang ngasi bukan kita
- Q: Berarti hibah itu memang khusus untuk kegiatan saja yang bu, kalau inventaris tv ac disdikpora yang punya.
- A: Iya betul, sampai meja pun begitu. Ada petugas yang langsung mencatat disini inventrisnya.
- Q: Menurut kakak apakah pengelolaan keuangan kwartir saat ini sudah baik kak?
- A: Sudah
- Q: Apakah ada yang menjadi kendala atau hambatan kwartir dalam melakukan pengelolaan keuangan selama ini?
- A: Selama ini tidak ada karena sudah di bantu oleh orang yang koompeten.
- Q: Yang terakhir kak, disini kan sebagian besar tidak ada penggajian kecuali kakak saja yang langsung dari disdikpora karena sebagai pegawai, selama ini kakak selaku sekretaris digaji ya?
- A: Tidak, relawan saja, semua tidak ada kak
- Q: LPK juga?
- A: Tidak
- Q: Kebetulan kakak ada disini apa yang melatar belakangi kakak mau bekerja padahal kan tidak ada gaji?
- A: Panggilan hati, karena kita merasa di pramuka memang begitu kita sekali pramuka tetap pramuka, iklas bakti bina bangsa kan begitu semboyan-semboyan itu sehingga di pramuka kita mencari senang (ngalih demen, ngalih timpal) kan begitu, kalau dibilang menghibur iya, apalagi saya sudah pension di pramuka saya bisa tertawa (mekedekan). Jadi ketua harian kita sudah tua/lingsir tapi masih semangat karena suka.
- Q: Berapa usia beliau ya kak?
- A: Tahun 54, 68 tahun jadinya.
Istilahnya dipramuka kan dunia pengabdian tanpa batas, misalnya saya berangkat ada kegiatan dimargarana atau dimana sampai disana sampai sore kita beli makan ada adik-adik disana, yuk kita makan, seperti itulah contohnya, tapi kita senang kok walaupun kita mengeluarkan uang tapi senang bersama anak-anak. Biar ada yang diingat dengan anak-anak dengan kak ini begini. Kalau di pramuka kita hitung-hitungna begini-begini susah

kalau tidak punya jiwa pengabdian. Artinya begini selama kita di pakai berarti kita masih diperlukan walaupun sudah pensiun atau apa masih kita diajak, masih ada orang yang mau mngajak kan senang kita.

I. Jadwal Wawancara	
1. Tanggal, hari	: 12 Desember 2022, Senin
2. Waktu mulai dan selesai	: 09.12 WITA s.d 10.00 WITA
II. Identitas Informan	
1. Nama Informan	: Ngakan Made Kasub Sidan, S.Pd., M.Pd
2. Jenis kelamin	: Laki-Laki
3. Usia	: 62 Tahun
4. Jabatan/kwartir	: Sekretaris Kwarcab Klungkung
5. Pendidikan terakhir	: S2
III. Pertanyaan & Jawaban	

Q: Bagaimana proses pengajuan hibah pramuka kak?

A: Anggaran itu kita ajukan ke dinas terkait yang dalam hal ini sampai tahun 2021 dinas kebudayaan kepemudaan dan olahraga disubpora, lewat sana mengajukan sebagian anggaran dan seterusnya. Sejak 2018 yang dalam hibah.

Q: Berarti sebelum 2018 kan tidak dapat ya, kalau 2016?

A: 2016 sama sekali kita tidak ada dana, 2017 lewat dinas pendidikan di bantu kegiatan kita karena kan dianggap kepemudaan dan olahraga dianggap kegiatan pemuda. Kegiatannya dari dinas pendidikan. Berapa besaran dana sudah jelas ada disana, kenapa banyak mengembalikan supaya jelas karena kemarin juga setiap ada monitoring kok bisa sampai mengembalikan 200 juta, kenapa dikasi dana kok dikembalikan, itu yang menyebabkan karena kita tidak mau bermasalah dengan dana, kita ingin mengeluarkan secara real sesuai dengan yang tertera di RKA baru, karena harus mengubah menyampaikan keatasan lagi ada proses-proses yang harus dilalui dan itu tidak mungkin kalau sudah diakhir bulan. Sedangkan yang di 2019 karena memang ada beberapa kegiatan yang memang tidak jalan, tidak bisa kita laksanakan dan kita alihkan.

Q: Terus bagaimana alur proses pengelolaan?

A: Pengelolaannya tetap yang menarik dananya adalah bendahara yang juga

tanda tangannya dari ka kwarcab, ka kwarcab tanda tangan bendahara tanda tangan bendahara yang menarik.

Q: Bagaimana proses penarikannya?

A: Itu diambil sesuai dengan kebutuhan lalu pengelolaannya sesuai dengan kegiatan.

Q: Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana pemerintah?

A: Pertama tentu bendahara kemudian yang berikutnya panitia kegiatan, jadi bendahara menguarkan pada penitia kegiatan, biar setiap ada kegiatan nanti bendahara memberikan pada panitia kegitan. Jadi nanti panitia kegiatan itu yang membuat SPJnya tentu juga bersama bendahara, jadi setiap kegiatan pasti ada penitia-panitia yang dibentuk.

Q: Apa ada pelaksanaan perencanaan keuangan dana anggaran pengendalian keuangan dan controlling?

A: Kontroling sementara sampai dengan 2021 itu dari ketua harian, kemarin kan pemeriksaan keuangan itu dilakukan oleh ketua harian, karena kita punya LPK tapi tidak berfungsi karena sudah pensiun tidak pernah hadir waktu itu. Yang sekarang justru berbanding terbalik justru sekarang hampir 1 tahun ini sudah 2 kali, kebetulan LPKnya sekarang itu dari kepala inspektorat itu menjadi ketua LPK, sekarang sudah 2 kali kesini. Kalau nanti persetujuan tahun 2023 itu turun hasil verifikasi provinsi beliau minta dikumpulkan semua pengurus untuk menjelaskan kembali mekanisme peneglolaannya, jadi konrolnya itu dari ketua harian kemarin.

Q: NPWP ada?

A: NPWP tidak, dulu ada

Q: Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawabannya kak?

A: Bentuk pelaporannya ya seperti ini di tambahn dengan rinciannya di lampiri dengan berkas.

Q: Apa saja aturan ketentuan peng SPJan pengelolaan keuangan dari daerah?

A: Biasanya dari dinas kebudayaan menyampaikan apa-apa saja yang perlu di penuhi.

Q: Apakah ada sumber dana yang di peroleh selain hibah dari pemerintah?

A: Kemarin kita untuk tahun 2022nya, kalau yang sampai tahun 2021 ada sumbangan-sumbangan ketika covid kita secara spontan, untuk membantu masyarakat memberikan masker kita secara spontan melakukan pengumpulan dana, jadi masing-masing kita tidak batasi harus berapa-berapa, secara seponatan entah berapa dapat saya juga tidak ingat kita berikan masker termasuk juga ka kwarcab menyumbang juga 1juta, ada bantuan spontan dari pengurus untuk penanggulangan covidnya.

Q: Apakah disini ada badan usaha dan koperasi kak?

A: Tidak ada badan usaha dan tidak ada koperasi.

- Q: Apakah kwartir pernah melakukan penggalan dana.
 A: Yang 2022 iya bekerja sama dengan MCD kalau sebelumnya tidak ada.
- Q: Penggalan dana dalam rangka apa kegiatan apa?
 A: Untuk mengikuti rainas
- Q: Bagaimana kedudukan sekretaris dan bendahara kak? Sejajar atau bagaimana?
 A: Sekretaris hanya mengontrol bersama-sama lebih banyak di bidang pengadministrasian saja dan persuratan, jadi keuangan saya sendiri berapa sisa dan sebagainya ngecek dari yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik bendahara. Karena setiap rapat saya meminta uti untuk membuat rekap berapa si dana, misalnya kita rapat bulan juni sampai dengan bulan juni berapa dana yang sudah terealisasi berapa dana yang sudah digunakan untuk apa saja berapa sisanya dibuatkan rekap nanti dibahas setiap pertemuan rutin itu. Pertemuan 3 bulanan.

I. Jadwal Wawancara			
1.	Tanggal, hari	:	12 Desember 2022, Senin
2.	Waktu mulai dan selesai	:	09.12 WITA s.d 10.24 WITA
II. Identitas Informan			
1.	Nama Informan	:	Dra. Luh Gede Karyawati, M.Pd
2.	Jenis kelamin	:	Perempuan
3.	Usia	:	59 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Bendahara Kwarcab Klungkung
5.	Pendidikan terakhir	:	S2
III. Pertanyaan & Jawaban			

- Q: LPK disini sudah dibentuk ya kak, periode masa kerja dari tahun berapa kak?
 A: Masa jabatan LPK itu yang sekarang 2021 sampai 2026 namun dilantiknya baru 2022 kemarin. Sudah pernah melakukan kunjungan kesini melakukan pembinaan sudah 2 kali.
- Q: Berarti ini untuk yang 2022. Yang tahun 2021 sama sekali belum ada?
 A: Tidak. Dari LPK tidak, dari ketua harian saja.
- Q: LPK sebelumnya yang di bentuk?

- A: LPK sebelumnya ada tapi anggotanya tidak pernah hadir, tidak pernah bertugas
- Q: Kalau komponen LPK sebelumnya itu dari napi nggih?
- A: Kurang tau saya.
- Q: Tapi kalau untuk yang baru ini?
- A: Kalau yang baru ini ketuanya dari kepala inspektorat kemudian wakilnya kepala badan pemeriksa keuangan (BPKPD) kemudian anggotanya itu dari bendahara disdikpora, kemudian ada dari kepala SMK negeri juga
- Q: Kemudian untuk pengelolaan dana tadi itu kan murni hibah nggh, sumber lainnya hanya dari sumbangan dan penggalan dana, untuk hibahnya kan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya ini, kalau untuk dana yang lain itu sumbangan dan penggalan dana kegiatan itu ada lain lagi bentuk laporannya itu kak?
- A: Ada, dilaporan, kayak sekarang misalnya penggalan dana untuk raimuna daerah ini kan diluar hibah
- Q: Tapi ada dari dana hibah untuk raimuna daerah ini?
- A: Tidak ada.
- Q: Secara garis besar dana hibah itu dialokasikan kemana saja pengeluarannya?
- A: Kalau kita pasti ke operasional dulu, operasional gaji kemudian banten, spanduk-spanduk dan sebagainya kemudian baru mengarah ke kegiatan-kegiatan, binamuda binawasa begitu kita mengikuti kegiatan yang ada di kwartir daerah. Ada juga kegiatan tahunan kita kayak pesta siaga ke kegiatan bina mudanya jadinya.
- Q: Untuk dana hibah penggajian ada berapa staf disini nggih?
- A: Satu saja
- Q: Berarti selain staf tidak ada yang digaji dari dana hibah?
- A: Tidak ada
- Q: Termasuk LPK nggh?
- A: Iya tidak ada.
- Q: Bisa dicertakan sedikit kak bagaimana proses pemilihan LPKnya, biasanya kalau di kwartir-kwartir itu kan setiap 5 tahun ada musyawarah cabang muscab itu, kalau setiap tahun pasti ada raker, disini terlaksana ya rakernya kak?
- A: Rakernya terlaksana, disini saya kan baru 2019 jadi kalau menanyakan proses pembentukan LPK jadi saya hanya bisa menceritakan yang sekarang saja yang 2021. Jadi 2021 itu ada musyawarah cabang untuk dilaksanakan pemilihan ka kwarcab disana langsung ditentukan tim permatur untuk menentukan siapa yang ditunjuk menjadi LPK tim permatur itu yang menentukan.

- Q: Tim permatur itu terdiri dari siapa saja?
A: Sesuai hasil diskusi pada saat musyawarah cabang itu si ada kakwarcab terpilih ada dari unsur kwartir cabang ada dari unsur kwartir ranting.
- Q: Untuk musyawarah itu kan ditentukan oeh tim permatur bahwa ini sekiranya jadi calon-calon LPK kemudian di diskusikan disana salam musyawrah, kira-kira kakak orang yang ditunjuk atau dicalonkan menjadi LPK itu sudah menyetujui sebelumnya bahwa beliau?
A: Sudah.
- Q: Berarti tidak ada penolakan sehabis terpilih?
A: Sementara ini si tidak ada.
- Q: Sebelumnya sampai 2021 kan belum ada penyusunan dari LPK ya untuk laporan keuangan hibah itu, seperti yang saya tanyakan tadi pernah iaudit oleh BPK?
A: Sepengetahuan saya itu ada di 2018-2019, kalau di 2020-2021 itu belum. Cuma kita tetap di periksa oleh keuangan dari pemda.
- Q: Saat penyetoran selama ini 2021 mengenai pertanggungjawaban hibah itu maksimal harus di setorkan bulan apa kak?
A: 10 januari tahun berikutnya
- Q: Selama ini pernah lewat tidak?
A: Belum
- Q: Setelah melalui proses penyetoran itu ada sesuatu yang kurang lengkap mungkin yang harus diperbaiki?
A: Kalau dari lapran prtanggungjawabn tidak ada. Kalau pengajuan pencairan iya kadang ada saja yang kurang. Kalau laporan pertanggungjawaban sampai saat ini sudah kita lengkapi.
- Q: Kembali lagi kebagian pengajuan tentunya kita kan membuat rencana anggaran dana atau proposal itu ke pemda itu harus pembahasan dari raker, biasanya apa yang menjadi acuan dalam penyusunan ini, sehingga kita mengajukan dana sekian sekian?
A: Kalau itu si mengikuti kegiatan daerah juga, Cuma masalahnya seperti itu, di daerah itu biasanya raker itu dipertengahan tahun, kemarin itu di bulan april sedangkan kita pengajuan alokasi itu sudah dilakukan bulan februari jadi itu yang menyebabkan kita tidak bisa, seperti raimuna sekarang kita tidak bisa mncantumkan kegiatan raimuna di tahun 2022, keterlambatan dari atas, tidak sinkron, misalnya di nasional januari di daerah fabruari kita maret lah bisa raker jadinya kan dari kegiatan di nasional bisa kita ajukan.
- Q: April itu di tahun yang sekarang apa di tahun sebelum-sebelumnya terus seprti itu?
A: Terus sperti itu, bahkan kita sudah berulang kali menyarankan bisa tidak

dimajukan karena katanya dari nasional juga seperti itu. Itu sebenarnya menjadi penyebab kenapa kita sampai mengadakan penggalan dana.

Q: Berarti memang tidak ada anggaran hibahnya untuk raina itu ya. Kalau misalnya ada apakah tidak bisa dana alokasi yang lain dialihkan ke kegiatan?

A: Kalau ini memang sudah tidak ada, tidak bisa. Karena memang dananya juga kecil. Kayak sekarang saja 50 juta, sedangkan 2018 kita dapat 400 sekian malah kembali 200.

Q: Untuk pembinaan dari LPK apa saja ibu?

A: Kalau yang terakhir sekitar 2 bulan yang lalu kesini tentang penggunaan kemudian mengenai penganggaran kemudian diskusi mengenai laporan jangan sampai terlambat.

Q: Kalau dari segi teknis penusunan anggaran itu tidak ya karena sudah sama dengan tahun-tahun sebenarnya?

A: Sudah sama.

Q: Berarti baru pembinaan secara 2 kali saja terhadap pengelolaan dana, kalau pemeriksaan langsung?

A: Belum

Q: Berarti selama ini masih fokus di keuangan ya. SPI ada disini?

A: Tidak ada. Waktu ini sempat dibahas sampai sekarang belum ada pergerakan.

Q: Apa saja yang menjadi kendala selama ini dalam hal penganggaran, penyusunan maupun pelaporan?

A: Kalau soal laporan menurut saya tidak ada kendala, yang menjadi kendala itu ada kegiatan tapi tidak ada di anggaran. Itu saja sebenarnya.

Q: Kalau sebaliknya?

A: Kebanyakan begitu, kalau dulu ada anggarannya kegiatannya tidak ada. Ada kegiatannya tidak ada anggarannya.

Q: Berarti yang ditahun-tahun sebelumnya itu memang sisa dari realisasi itu harus dikembalikan?

A: Dikembalikan, tahun 2016 sampai bunga di kembalikan.

Q: Memang harus seperti itu ya, apa tidak bisa diendapkan kemudian dipakai kembali, itu memang peraturan dari pusat?

A: Iya, bisa sebenarnya kalau di NPHD itu kalau saya bunga itu dapat di pergunakan pasti kan karena kita juga banyak membantu. Kita mengikuti acuan itu setelah raker pencairan mengikuti di NPHD naskah perjanjian hibah.

Q: Terakhir anggarannya terus menurun dari tahun 2021-2022 sama 50 juta.

- Untuk kemarin saya dengar hanya klungkung yang tidak mengirim jarnas ya?
- A: 2022 jadinya tidak ikut jarnas, 2021 kita ikut jamboree daerah itu dari sumbangan per sekolah. kita buat RAB dulu kemudian sesuaikan dengan RAB sekian diperlukan dana kita bagi akhirnya per orang kena 500 ribu. Jadinya kalau sekolah mengirim 2 orang jadi 1 juta, kalau 4 2 juta. Jamboree nasional kan baru ini, memang tidak ada anggaran.
- Q: Untuk laporan kegiatan biasanya yang menjadi laporan kegiatan menyeluruh kwarcab klungkung itu ada yang menjadi 1 atau semua terpisah hibah atau laporan atau misalnya jamda terpisah?
- A: Terpisah
- Q: Tidak ada laporan pengurusan yang jadi 1 itu yang mendapatkan dana hibah, sumbangan begitu.
- A: Tidak. Terpisah.
- Q: Kalau untuk pertanggungjawaban itu ada tembusan ke kwarda mengenai kegiatan?
- A: Kalau ke kwarda tidak ada, ke kwarda hanya saat raker mengirim laporan kegiatan dengan jumlah penggunaan dana sekian, kalau laporan tentang hibah kayak gini tidak ada. Kami belum pernah menunjukkan ke kwarda.
- Q: Berarti pasca raker hasil dari raker mengenai kegiatan dan berapa anggaran dananya itu yang dilaporkan.
- A: Saat rakerda diminta, misalnya kemarin rakerda 2022 diminta 2021 apa saja kegiatan yang sudah berjalan berapa anggarannya dimana sumbernya, itu saja.
- Q: Berarti setiap rakerja itu mengundang seluruh perwakilan cabang kak ya?
- A: Iya
- Q: Siapa biasanya yang mewakili ke sana?
- A: Kalau dari sini ka kwarcab dan waka, ka kwarcab mungkin di wakikan sekretaris cabang dewan kerja.
- Q: Berarti laporan yang dikirmikan di yang real ya yang realisasinya?
- A: Iya

I.	Jadwal Wawancara		
1.	Tanggal, hari	:	12 Desember 2022, Senin
2.	Waktu mulai dan selesai	:	11.20 WITA s.d 12.23 WITA
II.	Identitas Informan		
1.	Nama Informan	:	Ni Wayan Mudiarthi, S.Pd
2.	Jenis kelamin	:	Perempuan
3.	Usia	:	58 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Bendahara Kwardcab Karangasem
5.	Pendidikan terakhir	:	S1
III.	Pertanyaan & Jawaban		

- Q: Kakak menjabat menjadi bendahara dari tahun berapa?
A: Dari tahun 2011, sudah 3 periode, setiap 5 tahun di buat SK baru, sekarang sampai tahun 2027. Tahun 2022 dilantik masa bakti 2022-2027
- Q: Untuk kepengurusannya ada ketua harian?
A: Kalau tahun 2021 ada ketua harian, sekarang mengacu pada SK yang dari kwarda tidak ada ketua harian harus ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, ketua harian katanya tidak ada
- Q: Ini dari kwarda ya?
A: Iya kita mengacu dari kwarnas, yang dari kwarda mengacu ke kwarnas, yang dari kwardcab megacu ke kwarda, SK untuk pelantikannya ini.
- Q: Ketua harian tidak ada tapi sekertarisnya dua, bendaharanya?
A: Bendaharanya 2 juga. Bendahara 1 bendahara 2. Wakil ketuanya ada 5, waka-waka sesuai dengan bidang-bidangnya.
- Q: Untuk sumber dana murni hibah atau ada lain?
A: Untuk kegiatan yang ada di kwardcab ini menggunakan dana hibah yang di dapatkan dari bupati.
- Q: Ini untuk SKPDny keluarnya di dinas pendidikan ya kak?
A: Iya di dinas pendidikan. Di bidang KPO keluarnya kan ada di dinas pendidikan 7 bidang.
- Q: KPO itu?
A: Kepemudaan. Pramuka itu kan memang di kepemudaan sektornya.
- Q: Bagaimana alur pengajuannya kak?
A: Alur pengajuannya, awalnya kita mengajukan proposal dan rincian kegiatan apa-apa yang akan kita laksanakan, mengajukan proposal itu misalnya kita

tahun depan mengadakan, dari tahun sebelumnya kita sudah mengajukan rincian proposal itu kita ajukan misalnya kegiatan itu 10 dengan dana 600 begitu contohnya belum tentu dapat sekian. Mungkin dananya dapat 1/3 dari usulan kita, sekarang mana kegiatan yang urgent-urgent itu yang penting-penting yang harus dilaksanakan. HUT pramuka itu kan harus ada, rakercab harus ada belanja operasional kwarcab harus ada, itu dulu yang kita utamakan baru kegiatan-kegiatan, sebenarnya kegiatan pramuka itu banyak sekali, kalau ada dana banyak itu karena sekarang pramuka itu kan sudah mulai ada masuk kurikulum . sudah ditingkatkan lah lagi, kalau dulu kan agak pasif.

Q: Berarti untuk pengajuan proposal kan anggaran 2022 ini 2021 sudah mengajukan, maksimal di bulan apa nggih sudah menyetorkan proposal?

A: Menyetorkan rincian dari bulan desember kita sudah menyetorkan rincian.

Q: Maksimalnya bulan apa itu?

A: Ini untuk proses tidak sekali kita mengajukan usulan-usulannya. Usulan awalnya di kepemudaan dulu, untuk pramuka berapa yang dianggarkan di kepemudaan nanti KPU nya itu yang mengusulkan awalnya sekarang hibah itu ada di kepemudaan kalau dulu masih ada di TTAPD, TTAPD nya menganggarkan dulu ini untuk pramuka kasi sekian sudah dianggarkan disana saat menyusun RKAA desember sudah menyusun, sebelum desember sudah dari bulan berapa itu, dari bulan oktober sudah menyusun itu untuk 2023 nya itu, sudah kita ajukan. Sudah itu januari kita mulai sudah itu DPA-DPA yang OPD nya dulu untuk pramukanya nyusul mungkin february atau maret itu sudah kita mengajukan proposal ke yang akan mencairkan dananya itu di KPO disana kita mengusulkan sekarang kalau dulu di TTAPD sekarang disini di dinas pendidikan.

Q: Berarti bertahap?

A: Bertahap

Q: Berarti sebelum mengajukan itu kita minta kisi-kisi begitu ya berapa kira-kira anggarannya ya kak?

A: Ya, kisi-kisi dulu biar bisa kita membuat usulan itu apa-apa saja yang akan kita usulkan dengan dana sekian, begitu.

Q: Berarti ini sudah turun dananya berarti lagi ada revisi tahap kedua nggih?

A: Nggih

Q: Menyesuaikan dengan dana yang disetujui begitu ya kak?

A: Menyesuaikan, turun dananya kita ajukan proposal kan sudah di balas itu pengajuan proposal kita bahwa dapat dana sekian begitu. Mengulang lagi kita mengajukan dengan adanya tanda tangan lurah, harus ada tanda tangan camat, seperti itu proposalnya, bahwa ada hibah pramuka. Tapi camatnya itu yang ada di wilayah itu, kita kan dinas pendidikan camatnya kan camat karangasem seperti itu.

- Q: Harus ada tanda tangan itu ya?
A: Iya harus ada tanda tangan itu di depannya itu yang mengetahui, kan pertamanya yang membuat itu adalah ketua pramuka ka kwarcab. Sudah itu di ketahui oleh lurah dan camat. Itu usulan saya selama saya menjadi bendahara.
- Q: Di kwartir punya nomor rekening ya?
A: Ada, rekening kwartir cabang
- Q: Rekeningnya dalam bentuk bank BPD?
A: Iya bank BPD
- Q: NPWP ada?
A: Ada, tapi sekarang semenjak di dinas pendidikan pakai NPWP dinas pendidikan, membayar pajaknya itu.
- Q: Berarti NPWP tidak dipakai?
A: Kalau sekarang tidak di pakai, dulu waktu TTAPD masih di kabupaten masih BPKAD lah masih mengeluarkan itu pakai kwartirnya. Terpakai NPWPnya kalau sekarang dinas pendidikan, karena mungkin dananya itu dikeluarkan oleh dinas pendidikan.
- Q: Untuk penarikan dana yang sudah turun, untuk proposalnya perbaikannya setelah NPHD di tanda tangani apa sebelumnya? Kan SK dulu turun dari bupati itu.
A: Membuat SK dulu bahwa disana kan di SK itu di cantumkan mendapat hibah sekian. Habis itu revisi dulu baru NPHD, baru kita buat NPHD di NPHD itu ada namanya kerja sama pihak pertama pihak kedua begitu nanti disana.
- Q: Untuk laporan keuangan itu apa saja jenis laporan keuangannya yang di laporan pertanggungjawaban keuangan itu kak?
A: Jenis laporan yang kita buat karena ada kegiatan kegiatannya misalnya di operasional kwarcab ada disana belanja-belanja ATK, foto copy saya jadikan satu itu dari semua kegiatan, PPN kalau itu hanya ada pesanan nota dan kwitansi
- Q: Untuk mengeluarkan dana tersebut dari rekening siapa saja yang otoritas?
A: Otoritas, kita kan mengajukan specimen, specimen itu disana sekarang kita kesepakatan dengan ketua dan bendahara, yang menjadi ketua sekrang masih aktif di PNS di ASN kan apalagi pak asisten sekarang tidak mungkin begitu narik ikut asisten, dikuasakan lah kepada bendahara disana di specimen tercantum bahwa dalam penarikan uang di bank di kuasakan kepada bendahara itu berisi
- Q: Surat kuasa penarikan?
A: Iya, di tanda tangani oleh ka kwarcab.

Q: Apakah ada sumber dana selain hibah yang dipakai di kwartir? Sumbangan seperti itu?

A: Kalau misalnya di kegiatan, misalnya dananya itu di kwarcab sudah tidak ada kalau ada peserta yang akan melaksanakan kegiatan, contoh waktu ini kan ada raida sedangkan anggaran di kwarcab tidak ada anggaran di raida, terpaksa yang dari sekolah yang dari gugus-gugus itu memungut untuk kegiatan itu tapi kwarcab mengordinir yang membantu membarikan pelatihan dan sebagainya untuk diadakan raida, raida itu kan untuk raimuna untuk tahun depan memang sekarang harus ada raida.

Q: Berarti untuk hibah tahun ini belum sempat dianggarkan untuk raida?

A: Tidak ada, kan ada jarnas, jamboree nasional pun itu *nepes-nepesan* tidak ada anggaran, tapi jarnas harus jalan.

Q: Jarnas tahun 2022?

A: Iya. Terus raidanya bagaimana ini, terus tahun depan kan ada raimuna, raimuna nasional kan harus ada raida tahun ini, nah itu kita anu ke sekolah aja, disekolah kan bisa dana BOS itu kan boleh itu untuk pramuka.

Q: Berarti dialihkan ke sekolah begitu kak?

A: Iya dialihkan ke sekolah dan kegugus itu.

Q: Berapa kira-kira dananya untuk yang di sekolah per orang sampai 500rb ya?

A: Untuk raidanya itu, dari sekolah itu saling bantu ini sebenarnya dari sekolah biar jalan paling mungut untuk uang konsumsi 150 per siswa disekolah, yang lainnya kwarcabnya itu kan ada pelatih-pelatih itu nanti itu yang membantu palatih-pelatih itu, begitu. Ini kerja social ini

Q: Ini kan sumber dana yang berbeda kak ya dari hibah khusus raida ini di sekolah dari bos itu, kalau dikordinir oleh kwartir apa yang diminta ya kak?

A: Tidak, Cuma menyampaikan ke pembinanya saja. Kan kita rapat

Q: Apakah tidak ada kasi saya kwitansi kasi saya gini untuk pertanggungjawaban ke sekolah?

A: Tidak, nanti siswanya itu dengan Pembina,

Q: Berarti kwartir tidak?

A: Tidak, kwartir tidak ikut campur, hanya memberi jalan nanti silakan itu di sekolah disamping itu di dana BOS itu ada memang dibuatkan untuk kegiatan pramuka, memang sudah dirapat-rapat itu pramuka itu harus ada di rincian BOS itu, sudah ada masuk disana itulah yang di pakai.

Q: Gotong royong ya?

A: Iya gotong royong, karena ini kan terbatas

Q: Di kwartir memiliki badan usaha?

A: Tidak ada

- Q: Koperasi juga tidak ada?
A: Tidak ada
- Q: Di kwartir karangasem pernah melakukan penggalan dana terkait mungkin bekerjasama dengan MCD, atau penggalan dana dengan siapa penggalan-penggalan dana untuk kegiatan?
A: Belum
- Q: Kalau raimuna cabang murni dari?
A: Kalau raimuna cabang tahun depan kan ada raimuna cabang lagi dari sekarang sudah kita anggarkan, kalau untuk keningkat nasional harus kita karena itu biayanya besar. Raimuna tahun 2017 kita gotong royong sebanyak sebagai peninjau ke Jakarta
- Q: Kwartir menerima sumbangan? Waktu covid misalnya?
A: Sumbangan waktu covid ada, masker ada dari kwarnas, kwarnas yang ngirim lewat kwarda, kwarda mengirim ke kwarcab begitu, itu sudah saya bagikan ke kwaran, nanti kwaran yang membagikan ke wilayahnya dia, begitu
- Q: Berarti untuk sementara ini sumbangan berupa uang tidak ada, berarti hanya barang ya?
A: Tidak ada, barang saja.
- Q: Sekarang mengenai LPK, LPK karangasem ini kapan mulai di bentuk?
A: Sudah di bentuk, sekalian dengan pengurus yang baru
- Q: Sebelumnya sudah ada LPK apa belum?
A: Belum, baru tahun ini dibentuk karena tahun ini membuat SK itu harus ada ini, ada ini, ada ini, melengkapi itu
- Q: Ini memang dari dari kwarda yang meminta untuk dibentuk?
A: Tidak, kita kan dari kwarcab kita kan harus biar tidak salah apa yang ada dari kwarnas dan kwarda itu saya ikuti, biar tidak salah kita kan harus mengikuti dari atas juga itu. Tapi setiap tahun di periksa BPK
- Q: Pada saat pemeriksaan dari BPK itu berarti kwartir di panggil ya untuk memberi keterangan?
A: Iya, laporannya diminta, itu dilihat laporannya.
- Q: Pernah ada temuan atau lancar-lancar saja?
A: Belum si, belum ada temuan tidak ada di revisi, saya transparan sekali pelaporannya, dan juga sudah sesuai dengan pengajuan pada proposal.
- Q: Untuk pembagian tugas antara bendahara 1 dan 2, ibu bendahara 1, bendahara 2 apa itu pembagian tugasnya?
A: Tidak ada pembagian tugas yang jelas. Saling bekerjasama.
- Q: Untuk pemilihan LPK itu seperti apa waktu ini? kan ada di musyawarah

- cabang itu, kakak ikut dimusyawarab cabang waktu ini?
- A: Tidak
- Q: Saya mau tanyakan sedikit kan di bentuk tim permatur pada saat itu pada siding itu kan siapa yang ditunjuk sebagai pengurus, terus yang terkait khusus LPK ini bagaimana proses pemilihan orang-orangnya oh si A dicalonkan sebagai LPK si B dicalonkan sebagai LPK, bagaimana prosesnya?
- A: Begitu dah, kan dapat juga kumpul dulu begitu, sekarang kita mau memilih jadi ketua siapa jadi bendahara siapa jadi sekretaris siapa, sama-sama saya yang ini tau saya yang ini tau kesepakatan, sepakat tidak.
- Q: Kalau LPK ini, yang menjadi ketua LPK ini dari golongan apa ya kak? Kalau di kwartir-kwartir yang lain itu ketuanya dari inspektorat. Dari ini yang tau bagian keuangan beliau, kalau di karangasem bagaimana?
- A: Begitu dah sama, sama seperti itu, semua LPK di bali mengacu itu sama kalau yang jadi bagian keuangan dicari dari tim inspektorat. Kalau yang dari keuangan realisasinya seperti apa mungkin dari sekdis. Biar sejalan dengan tugasnya.
- Q: Ada staf di kwartir?
- A: Tidak ada staf, kalau dulu ada 2 stafnya
- Q: Digaji itu stafnya?
- A: Digaji dari hibah, sekarang tidak ada, dulu 2 ada
- Q: Pengurus tidak di gaji?
- A: Tidak ada gaji-gajian apa tidak dapat kerja social, kebetulan dulu saya bendahara pengeluaran di dinas pendidikan, saya lama jadi bendahara bendahara rutin namanya dulu, sudah itu berubah menjadi bendahara pengeluaran tetap jadi bendaharalah pokoknya. Karena kalau penerimaan kan di SKB penerimaannya itu di dinas pendidikan pengeluarannya itu.
- Q: Berarti LPK ini baru 2022 ini, bulan apa ya pelantikannya,
- A: Pelantikannya tanggal 30 april
- Q: Di bulan april, berarti nanti akhir masa jabatannya juga di april?
- A: Iya sesuai dengan SKnya
- Q: Berarti kakak selaku bendahara belum ada join sama LPK,LPK belum ada bertanya mengenai pemeriksaannya
- A: Belum, akhir tahun ini, akhir tahun ini sudah ditanya-tanya makanya saya siap-siap membuat laporannya. Muscabnya tanggal 27 maret itu 1 bulan jedanya itu baru bisa dilantik.
- Q: Sumber dana yang diterima di hibah ini menurut kakak sudah pas sudah efiseien pengelolaan kegiatan di kwartir
- A: Begidah seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita ingin membuat

kegiatan banyak tetapi dana dapat sedikit kita dikasi dana, kita atur itu kegiatannya yang mana yang paling urgent yang harus dilaksanakan itu-itu saja dulu didanai dengan dana sekian, kalau maunya membuat kegiatan banyak dana tidak cukup nanti kan biar tidak kualahan itu pada saat kegiatan berlangsung, tidak ada ini tidak ada ini, yang hut pramuka harus diutamakan harus ada, rakercab, operasional kwarcab, adalah dana sisa lagi dari itu apa yang perlu untuk di kwartir ranting pembinaan gudep begitu misalnya, gudep masukkan dananya berapa-berapa. Nanti kita rapat, tidak bendahar sendiri yang kerja yang untuk membuat rincian ini harus dengan yang memahami dengan waka-waka itu kita harus kumpul rembug membicarakan hal itu.

Q: Berarti realisasi ini habis?

A: Habis,

Q: Kalau misalnya ada sisa itu

A: Ada sisa itu kan STS itu misalnya BBM yang ada ditanggung ada sisa 5 ribu dari jumlah liter-liter itu kita kembalikan pakai STS supaya uang itu balance

Q: Dikembalikan ke?

A: Ke kas daerah lewat BPD, harus di kembalikan agar tidak ada saldo

Q: Termasuk bunga?

A: Bunga saya tetapkan di buku rekening saya tidak berani obrak abrik. Saya sudah Tanya di IRDA dengan kepala irda pak wayan sudarsana, kalau ada bunga ini dibuku tabungan dana-dana hibah itu apa dikembalikan atau bagaimana. Kata beliau biarkan dibuku tabungan

Q: Berarti yang dikembalikan sesuai dengan hibahnya?

A: Hibahnya saja, kalau bunganya tetap di buku tabungan.

Q: Kendala yang dihadapi dalam penyusunan keuangan itu apa saja kira?

A: Kendalanya itu saja, ingin membuat banyak kegiatan tapi dananya tidak cukup, itu saja.

Q: Ini yang terakhir ini biasanya pengurus dipramukan kan tidak gaji, apa yang menyebabnya khususnya kakak selaku bendahara yang sya wawacarai ini mengabdikan atau bekerja walaupun diusia pensiun?

A: Waktu ini sebelum pension saya sudah disini, kebetulan juga saya paham membuat laporan pengelolaan keuangannya ini yang lainnya juga saya senang berorganisasi walaupun tidak ada imbalan saya senang dapat betukar pikiran, mencari pengalaman senang saya dapat ilmu lagi. Pramuka itu kan sifatnya tidak begitu saklek sederhana bersosial itu.

Q: Kakak Pembina pramuka?

A: Tidak, saya tidak membina saya hanya bendahara tapi saya senang melihat ada kegiatan-kegiatan seperti itu dalam artian ikut disana menyaksikan walaupun tugas saya membuat laporan tapi saya ikut menyaksikan makanya

saya tau kegiatan ini ini yang dilaksanakan walaupun tidak pernah belajar pramuka, pernah waktu SD SMP pernah belajar pramuka tetapi tidak mendalami tetapi tau, karena saya terjun kelapangan biasanya kan ada keah, apa yang dilaksanakan secara tidak langsung kan tau kegiatan ini, ini yang dilaksanakan ini yang dikerjakan, tau jadinya hapal jadinya.

Q: Sudah ada panggila dipramuka nggh tidak ada paksaan?

A: Tidak ada, waktu itu kan saya masih bendahara, kepala dinasnya itu pak gede ariasa dia kan ditunjuk sebagai ketua oleh bapak bupati, dia bingung siapa yang dipilih menjadi sekretaris siapa yang menjadi bendahara begitu, karena saya di dinas pendidikan saya ditanyain, bujero sekarang ada organisasi pramuka ada dana hibah awalnya itu tahun 2011 ada dana hibah, saya minta tolong bisa tidak bu jero menjadi bendaharannya, seperti apa pak? Saya Tanya itu, hibah ini nanti ada kegiatan-kegiatan itu disampaikan ada hut ada operasional ada di gedung pemuda nanti disana nanti kita angkat staf 2, karena saya masih aktif kan tidak mungkin saya tinggal duduk di gedung pemuda hanya untuk mengurus pramuka kan tidak mungkin saya karena saya juga sibuk di dinas pendidikan adalah staf saya yang mengordinir yang rutusnya itu yang lainnya juga sibuk, saya yang menghendel staf yang 2 itu untuk bekerja apa, bekerja apa, semua itu saya yang mengurus sampai laporannya yang lainnya tinggal berkegiatan begitu, untuk kegiatan ini keperluannya apa itu staf yang jalan lewat saya karena kan saya yang pegang uangnya, beli apa, keperluan apa untuk kegiatan yang jalan itu.

Q: Berarti memang berangkat tidak dari pramuka di tunjuk atas kepercayaan bersama.

A: Iya, disampaikan waktu itu awalnya kan ada raker cabang, sebelumnya di kumpulkan dulu siapa-siapa saja yang ditunjuk ditanyai disana sudah sepakat seperti itu.

I.	Jadwal Wawancara		
1.	Tanggal, hari	:	12 Desember 2022, Senin
2.	Waktu mulai dan selesai	:	13.00 WITA s.d 14.15 WITA
II.	Identitas Informan		
1.	Nama Informan	:	Nyoman Aryawan, S.E
2.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
3.	Usia	:	48 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Sekretaris Kwarda Bali
5.	Pendidikan terakhir	:	S1
III.	Pertanyaan & Jawaban		

Q: Sumber dana utama yang dikelola Kwarda Bali dari mana kak?

A: Murni hibah, ya dari pemerintah pemprov

Q: Tidak ada sumber lain kak?

A: Dana yang kita kelola di Kwarda Bali murni hibah tidak ada dana yang lain, saya dulu Sekretaris di Kwarcab Gianyar, semenjak 2020 efektif saya di Kwarda Bali. Memang masa kepengurusan kami 2019 – 2024 tapi kami baru dilantik dan menerima SK Januari 2021. Jadi semenjak saya di kwarda 2020 efektif memang sudah hibah tidak ada dana lain lagi. Memang secara AD/ART ada sumbangan, iuran anggota namun kita tidak ada mengadakan itu

Q: Di kwarda ada Badan Usaha kak?

A: Tidak ada

Q: Koperasi juga tidak ya?

A: Di Kwarda Bali tidak atau belum ada Badan Usaha, koperasi juga tidak ada. Selama ini kami mengandalkan dana hibah pemerintah saja. Walaupun itu sampai tahun ini menurun di 2022 ini kami hanya menerima 500juta saja.

Q: Terkait dengan penelitian kak, LPK sudah dibentuk dan bekerja di kwarda?

A: Begini ya, adik meneliti tentang LPK, jujur saja LPK di Kwarda Bali belum bekerja, karena memang tidak ada yang harus dikerjakan. Teknis kerja petunjuk pelaksanaan dan teknis kerjanya belum ada, apa yang mau dikerjakan.

Q: Kira-kira apa yang membuat LPK belum bekerja ya kak?

A: Memang sudah ada ya LPK di lingkungan kwartir yg lain sudah bekerja? tolong dibedakan antara LPK secara aturan dan realita. LPK itu lembaga independen yang posisinya setara dengan ketua kwartir. Seharusnya secara pemilihan harusnya dipilih oleh musyawarah dan ditetapkan oleh presidium, namun LPK dibentuk oleh tim formatur, itu ya yang terjadi di kwarda tidak tau di kwartir yang lain sama atau tidak. Tim formatur adalah tim yang dibentuk untuk membantu ketua kwartir terpilih menyusun kepengurusannya dan badan kelengkapan lainnya di bawah ketua. Tim formatur ya salah satu anggotanya ketua terpilih

Q: Sesuai dengan aturan harus dipilih berdasarkan musyawarah kan kak?

A: Ya betul, harus disana dipilih dan digetok palu ditetapkan oleh presidium, tapi ini tidak, karena proses pembahasannya lama ya.

Q: Apa saja yang dibahas saat musyawarah kak?

A: Ya tentunya membahas masalah pertanggungjawaban dulu, setelahnya memilih ketua kwartir, tim formatur dan lpk, saat itu lpk tidak jadi dibentuk oleh tim formatur karena lpk harus wajib dibentuk ya.

Q: Apa yang menyebabkan seperti itu kak?

- A: Karena banyak kendala saat musyawarah, peserta musda sudah berbicara lebih cepat lebih baik, maka itu yang terjadi. Seharusnya LPK tidak boleh dibentuk oleh tim formatur namun harus dibentuk langsung dalam musyawarah dan ditetapkan langsung oleh presidium, ya itu yang terjadi.

I.	Jadwal Wawancara		
1.	Tanggal, hari	:	19 Desember 2022, Senin
2.	Waktu mulai dan selesai	:	09.00 WITA s.d 10.03 WITA
II.	Identitas Informan		
1.	Nama Informan	:	Dewa Made Muartha,SH
2.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
3.	Usia	:	52 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Sekretaris/Kasi Kepemudaan
5.	Pendidikan terakhir	:	S1
III.	Pertanyaan & Jawaban		

- Q: Berdasarkan informasi yang saya peroleh kwartir cabang badung sudah mempunyai LPK. Sebelumnya sumber dana yang di kelola oleh kwartir kan bukan berupa hibah ya, itu murni dari tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak hibah?

A: Sampai sekarang pun tidak murni hibah

- Q: Apa yang melatar belakangi tidak hibah alokasi dananya?

A: Itu kan ada 2 pilihan pramuka itu bisa menerima dana dari APBD bisa melalui dana hibah bisa melalui kegiatan, kalau seandainya menggunakan dana hibah mungkin dari segi administrasi agak kegiatan itu harus di pertanggungjawabkan oleh pengurus cabang. Kalau seandainya kegiatan tidak didanai oleh hibah tidak secara otomatis kegiatan itu dipertanggungjawabkan oleh cabang, berarti secara administrasi pemeriksaannya di dinas.

- Q: Untuk kaitannya dengan hal itu berarti LPK tidak dibentuk karena memang dana hibah tidak ada di kwartir?

A: Karena kalau diberikan dana hibah mungkin wajib membentuk LPK lembaga pemeriksa keuangan, kalau di kwarda menggunakan dana hibah baru di bentuk LPK.

- Q: Di badung tidak makanya tidak di bentuk LPK. Jadi sementara ini kwartir tidak membuat laporan kegiatan begitu kak?

A: Membuat laporan kegiatan tapi pengSPJannya prosesnya di disini.

- Q: Berarti di kwartir berapa dana yang diperoleh juga ada seharusnya? Di laporan pertanggungjawaban itu ?

- A: Dilaporan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan ada, hanya peng SPJannya prosesnya ke dinas di dinas yang mengawasi nanti pertanggungjawaban kegiatan tetap dibikinkan di kwartir cabang.
- Q: Selanjtnya bisa di bantu pak dijelaskan sedikit alur kwartir itu mendapat dana alokasi dari disdik sekian-sekian bersumber dari mana saja niki? ka kwartir mengajukan dulu ke disdik ada kegiatan ini ini ini, atau disdik sudah punya ini sendiri?
- A: Kegiatan pramuka itu kan diatur dalam permendagri 050, itu sub sub kegiatan sudah ada, rumah-rumahnya sudah ada, tinggal kwartir mengajukan sesuai dengan kebutuhannya dalam kegiatan setiap tahunnya, kwartir cabang yang mengajukan nanti disesuaikan dengan dana APBD juga, seandainya memungkinkan kegiatan yang diajukan oleh kwartir bisa dipenuhi oleh APBD berarti kegiatan itu bisa jalan. Nanti APBD Karena tahun lalu terjadi covid apa yang kita ajukan dari kwartir tidak bisa diakomodir, jadi kegiatan yang benar-benar urgent seperti pemeliharaan gedung, gaji tenaga kontrak itu saja yang bisa dimasukkan kedalam kegiatan itu, kegiatan kwartir cabang.
- Q: Di kwartir ada staf ya?
- A: Ada, semua ada 11 orang
- Q: Stafnya bertugas di gedung pramuka?
- A: Tenaganya ada di masing-masing kwaran berarti di kwaran ada 6 di kwartir cabang ada 5. Mereka membantu kegiatan pramuka di masing-masing kecamatan atau kwaran.
- Q: Sebelumnya untuk kwartir itu mendapatkan informasi apa tidak mengenai tahun ini mendapatkan alokasi dana kegiatan pramuka segini segini atau tidak?
- A: Kalau staf di kwartir cabang dapat informasi kegiatan yang akan kita laksanakan ini ini ini, nanti kan bisa diinformasikan kemasing-masing gugus depan kegiatannya ini ini ini, tetapi tidak secara rinci, paling informasinya tahun ini kegiatan di kwarcab ada ini ini ini. tidak secara rinci kita berikan kegiatan ini anggaran sekian.
- Q: Untuk proses pencairan dana, kan sudah diberikan informasi ke kwartin dana sekian-sekian dan kwartir akan melaksanakan kegiatan A misalnya atau perkemahan tingkat cabang, kita kan mengajukan dana ke disdik bahwa RABnya sekian, untuk proses pencairannya dana langsung niki bagaimana?
- A: Setiap kegiatan kan ada PAGU di awalnya itu, kalau sudah ada PAGU diawal kan tidak bisa di rubah itu, apa yang kita ajukan awal sudah ada, di kwartir kan sudah ada bendahara, di kwartir cabang dia yang membuat SPJnya
- Q: Untuk PAGU itu dasarnya darimana kak?
- A: Dari usulan kita, usulan kwartir cabang, apa kebutuhan kegiatan kita di kwartir cabang seperti KMD berpa orang yang diginikan.

- Q: Berarti prosesnya itu dari awal usulan cabang. Untuk penetapan pagu itu maksimal cabang menyampaikan usulan itu bulan apa?
- A: Kalau untuk 2023 awal 2022 sudah.
- Q: Februari?
- A: Iya, itu kan baru rancangannya saja, kalau 2023 sekarang terakhir finishnya bulan desember.
- Q: Berarti prosesnya sesuai dengan PAGU ya, tidak membuat anggaran nanti SPJ pertanggungjawabannya di sesuaikan dengan anggarannya?
- A: Kalau kita menggunakan dana hibah kan bisa berubah-ubah itu kalau kita sudah berkegiatan apa usulan kita di kegiatan berarti itu yang harus dilaksanakan. Kalau menggunakan dana hibah kan kadang-kadang seandainya memang ada kegiatan yang harus dilaksanakan hari ini bisa dialihkan bisa dipindahkan dananya ke hibah.
- Q: Tapi kan perlu membuat perubahannya?
- A: Tetap juga kan harus dilaporkan juga tapi kegiatan itu masih bisa
- Q: Selama ini kalau realisasi, kalau lebih kan tidak mungkin kalau kurang?
- A: Kalau kurang mungkin, kalau seandainya memang seandainya ada selisih sedikit-sedikit itu kan mungkin, tapi kalau sementara ini tidak si terlalu paling selisih lagi berapa lagi 2 juta, asuransi yang kadang-kadang itu, asuransi tenaga kontrak itu.
- Q: Karena ini di badung kan cuma satu-satunya kwartir yang tidak hibah bentuk dana kegiatannya, jadi segera garis besar itu penelitian saya ini meneliti bagaimana LPK bekerja, LPK kan badan independent yang wajib ada di masing-masing kwartir. Menurut kakak walaupun bases dana yang digunakan bukan hibah LPK ini selanjutnya bisa dibentuk/wajib di bentuk apa tidak di kabupaten badung?
- A: Sebenarnya karena kita menerima diluar dari APBD kalau tidak menggunakan dana hibah tidak perlu sebenarnya. Proses peng SPJannya ini kan di dinas jadinya, dinas sudah punya sebelum kegiatan berjalan sudah di periksa juga gininya, kecuali kalau memang menggunakan dana hibah penting ada LPK, karena sebelum kegiatan berjalan ada dana ada lembaga yang memeriksa keungan gininya. Kalau menggunakan dna hibah kan otomatis di kwarcab yang dipriksa. Makanya kalau tidak menggunakan dana hibah kayaknya kalau dibilang tidak penting penting juga Cuma terlalu banyak juga orang yang duduk digini kan fungsinya tidak, karena proses pemeriksaan juga didinas gininya, kalau menggunakan dana hibah seharusnya harus ada lebih efektiflah direalisasikan.
- Q: Selama ini ada kendala untuk pertanggungjawabannya yang disampaikan atau SPJ SPJ yang harus di penuhi oleh kwartir ke dinas?
- A: Karena itu dah, karena kita berpatokan pada usulan apa yang kita usulkan itu yang harus kita lakukan.

- Q: Berarti proses penganggaran melibatkan kwartir untuk pengajuan awal?
A: Iya,
- Q: Kemudian untuk pengendalian atau kontroling itu ada apa langsung dari dinas saja?
A: Dari dinas
- Q: Kalau reporting atau pelaporan yang di laporkan ke dinas hanya berupa LPJ LPJ sesuai dengan anggaran?
A: Iya apa-apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kwarcab di laporkan disana disesuaikan dengan pengamprahan peng SPJan itu
- Q: Berarti jenis laporan yang di keluarkan itu laporan realisasi anggaran saja nggih?
A: Realisasi anggaran, realisasi fisik, realisasi keuangan kan ada, berapa persen terlaksana berapa persen tidak.
- Q: Itu kira berpengaruh terhadap kinerja kwartir atau disdik apa tidak untuk realisasi penyerapan anggaran itu, kurang atau bagaimana?
A: Pengaruh?
- Q: Sebaiknya bagaimana yang baik realisasinya itu kak?
A: Itu kan setiap kegiatan realisasi fisik dan keuangan harus seimbang, berapa realisasi fisik dan keuangannya harus terlaksana tapi kadang-kadang selisih lagi sedikit kan tidak begitu besar sekali pengaruhnya.
- Q: Kira-kira kalau missal ada realisasi 100 juta terserap 50% untuk pengajuan berikutnya di kegiatan yang sama itu berpengaruh apa tidak itu?
A: Mungkin di pertanyakan kegiatannya kalau tidak efektif mungkin bisa dicoret kegiatannya. Kalau missal kita tidak bisa memenuhi kegiatan itu 100% kan dipertanyakan jadinya. Seperti kegiatan itu memang dilaksanakan kurang bisa di serap sama kwarcab.
- Q: Berarti memang harus benar-benar disesuaikan?
A: Iya apa yang kita usulkan kita sudah memperkirakan bahwa kegiatan kegiatan apa yang terlaksana kecuali memang post mayor kegiatan itu kalau memang ada keadaan yang memaksa kemungkinan saja kegiatan itu tidak terlaksana.
- Q: Di kwartir tidak ada badan usaha dan koperasi ya?
A: Tidak ada
- Q: Apa kwartir pernah melakukan penggalan dana?
A: Kalau melakukan penggalan dana pernah, kayak gunung agung meletus itu pernah kita melakukan bikin jimpitan ke masing-masing gugus depan nanti kita serahkan lagi ke korban bencana, pernah kita melaksanakan itu.

- Q: Untuk laporan realisasinya ini berarti gabung ya kak sama dinas pendidikan?
- A: Di kepemudaannya buat dulu sub program kegiatan pramuka
- Q: Berarti punya sub sendiri? Laporan di sub itu ya?
- A: Iya, kegiatan kepramukaan kegiatan ke pemudaan
- Q: Ini rutin di periksa oleh inspektorat sama BPK untuk laporannya itu?
- A: Laporannya kalau dinas pendidikan rutin di periksa, Cuma kalau objeknya kan masing-masing, lain-lain kadang-kadang kena kadang-kadang tidak.
- Q: Sampling ya?
- A: Iya sempel, tapi secara keseluruhan dinas pendidikan rutin diperiksa karena menggunakan dana besar, kalau mengkhusus di kepramukaan tidak.
- Q: Berarti selama ini tidak ada temuan khusus ketidak sesuaian?
- A: Tidak
- Q: Terakhir ini untuk kegiatan khusus ke pramukaan di undang-undang sumber dana itu kan memang dari iuran dari sumbangan pemerintah bersumber dari APBN/APBD itu seperti yang dididik ini, kalau seandainya tidak ada undang-undang itu kira-kira pramuka itu jalan?
- A: Ini kan pramuka social sifatnya, tergantung kondisi keuangan, adanya antusias juga, kalau dulu belum adanya UUD kan tetap jalan juga pramukanya, tapi dengan terbitnya undang-undang ini apalagi pramuka itu wajib di sekolah kan harus ada kegiatan yang harus dilaksanakan.
- Q: Pramuka itu memang berjalannya harus dengan dana pemerintah, soalnya kalau berdiri sendiri seperti yayasan yang lain itu tidak bisa ya?
- A: Mungkin kegiatan tidak efektif, bisa dibilang kalau membuat organisasi itu kan organisasi nirlaba non profit organisasi social kalau di bilang tidak jalan tidak mungkin tapi tetap jalan Cuma melaksanakan kegiatan itu kalau Cuma sekedar di laksanakan disekolah kan tetap bisa jalan.
- Q: Yang terakhir menurut kakak dibagian pembinaan peserta didik anak muda itu masih relevan di dana ini apa tidak? Yang di kepramukaan bagaimana?
- A: Masih tetap relevan karena ini kan bagian dari membangun karakter, membangun wawasan kebangsaan, masih banyak sangat relevan ini, apalagi dengan kondisi seperti sekarang anak-anak beralih dari dulunya permainan tradisional sekarang ke permainan era digital.

I.	Jadwal Wawancara		
1.	Tanggal, hari	:	17 Februari 2023, Jumat
2.	Waktu mulai dan selesai	:	10.42 WITA s.d 12.00 WITA
II.	Identitas Informan		
1.	Nama Informan	:	Luh Febry Ariani,SE.,M.Si.
2.	Jenis kelamin	:	Perempuan
3.	Usia	:	32 Tahun
4.	Jabatan/kwartir	:	Ka. Div Audit
5.	Pendidikan terakhir	:	S2
III.	Pertanyaan & Jawaban		

- Q: Cocok tidak memakai laporan keuangannya ISAK 35 kalau dulu PSAK 45 ya?
- A: Iya dulu PSAK 45 dirubah jadi ISAK 35, kalau ISAK 35 lebih ke pendidikan, yayasan, non profit lah itu, nirlaba itu ya. Kalau ini pramukanya tujuannya untuk organisasi.
- Q: Organisasi atau pendidikan kepramukaan, itu ada di undang-undangnya.
- A: Iya berarti tujuan pendidikan kepramukaan itu memang untuk pelatihan pengembangan pendidikan kepramukaan, memang tidak ada tujuan profit. Berarti masuk disana.
- Q: Sementara ini kan dari sumber pendapatan yang ada yang paling mendukung utamanya adalah poin B-nya kak, APBN dan APBDnya kak, bisa di bantu mekanisme dari pemerintah itu ada yang kalau diseluruh bali yang saya jajaki datangnya ada di badung itu APBD alokasi langsung pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga, jadi dikelolanya langsung disdikporanya nanti turunnya ke kwartir cuma pertanggungjawabannya langsung ke disdikpora, kalau selain di badung, diseluruh kabupaten termasuk di provinsi itu mekanismenya hibah kak, hibahnya dari disdikpora juga, tetapi kalau disdikpora itu ada pagu anggarannya, kalau hibah kan lebih fleksibel lagi penggunaan anggarannya disana. Sementara ini karena hibah saja dia mengikuti mekanisme pelaporan hibah saja case bases.
- A: Tidak hanya caseflow untuk penerimaan hibah pemakaian hibah, begitu ya?
- Q: Iya, itu saja jadinya, bagaimana menurut kakak apakah, sementara ini si saya menjelaskan sedikit tujuan penelitian saya adalah kepada Lembaga Pemeriksa

Keuangannya, kan ada dijelaskan disini pramuka itu memiliki sebuah lembaga pemeriksa keuangan tugasnya adalah memeriksa seluruh keuangan kwartir. Nah saya tanya wawancara di beberapa itu memang yang paling besar itu APBN/APBD Cuma kadang-kadang ada iuran ada juga sumbangan bantuan dan lainnya, tapi dibuat laporannya pada LPJ terpisah masing-masing kegiatan, misalnya kegiatan A ada sumbangan 700rb tapi sementara ini yang paling menjadi fokus cuma APBN saja, begitu.

A: Sekarang untuk memudahkan lembaga pemeriksaannya saja kan? Berarti kan menyeragamkan seluruhnya harusnya?

Q: Casenya adalah LPK belum bekerja, saya tanya kenapa belum bekerja, belum ada petunjuk teknis atau belum ada peraturan terkait bagaimana dia harus bekerja melakukan pemeriksaan.

A: Iya, dia tidak bisa menyalahkan atau membenarkan oleh si kwartir-kwartir tersebut.

Q: Iya Bagaimana menurut kak?

A: Tidak ada pedomannya dia.

Q: Iya belum.

A: Kalau mau LPKnya gerak, mau tidak mau harus di sosialisasi dulu untuk keseragaman bentuk laporan yang dibuat oleh kwartir, kwartir harus membuat bagaimana standar sebenarnya untuk laporan dana-dana yang mereka terima entah itu hibah atau sumber dari pemerintah.

Q: Sementara ini semua sudah membentuk LPK kak, kecuali badung karena dia tidak hibah jadi dia tidak membentuk LPK tetapi LPK yang sudah terbentuk itu belum bekerja, yang bekerja hanya di buleleng. Saya tanya kerja menggunakan aturan atau teknis apa sebenarnya tidak ada tetapi karena ketua LPKnya dari Inspektorat dia mengadopsi apa alur kerja yang ada di inspektorat itu selama ini.

A: Harus begitu memang sebenarnya mungkin LPK sendiri yang membuat trobosan baru bagaimana cara kerja mereka agar mereka aktif agar mereka kelihatan juga bekerja.

Q: Masalahnya sekarang kan kalau LPK yang sudah bekerja sekarang fokus ke hibah saja, jadi menurut saya kan ketinggalan sebenarnya karena ada iuran yang tidak di periksa.

A: Nah itu karena dasarnya ini semua mau tidak mau ini semua harus mencakup dalam laporan tersebut. Dibuat keseragaman dulu agar bisa mencakup semua dana-dana yang lain.

Q: Kalau di buleleng, sebenarnya dia kan lembaga pemeriksa keuangan saya kira aspek-aspek yang difokuskan sama dia melalui pemeriksaannya adalah keuangan ternyata tidak, menyeluruh ternyata pemeriksaan dari LPK itu, di ADART disebutkan LPK bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keseluruhan keuangan kwartir, kalau seluruh berarti kan seluruh dana yang diperoleh. Seandainya nanti LPK mau memeriksa keseluruhan apakah cocok atau tidak menggunakan ISAK 35 itu kak?

A: Cocok dia, masuk itu. Karena begitu memang ada pedomannya ada data ada pondasi itu.

Q: Berarti cocok dia melakukan penyusunan dengan itu

A: Dan bisa juga menyatakan wajar/tidak wajar dan salah/benar. Kalau hanya sebatas ini saja kan si wilayah A punya kebijakan seperti ini saja sementara wilayah yang B punya kebijakan begini tidak bisa di akomodir semuanya secara umum.

Q: Selanjutnya kak, ini kan saya temukan di buleleng saja, disana ada PERBUP tentang pertanggungjawaban pelaporan evaluasi hibah, di ayat tersebut berisi

penyerahan hibah dengan jumlah 500 juta keatas dilakukan pemeriksaan audit oleh kantor akuntan publik atau pejabat yang berwenang, nah sementara ini KJA dia, berarti mekanismenya kan belum audit, jadi bagaimana menurut kakak?

A: Belum diaudit itu, sudah memenuhi poin ini berarti. Karena disini diisi juga dilakukan pemeriksaan atau, berarti kan bisa salah satu.

Q: Beda berarti audit dan pemeriksa?

A: Mungkin disana iya? Karena ini masih bias, disini ada “Oleh Akuntan Publik atau Pejabat Berwenang” mungkin KJAnya disini dianggap pejabat yang berwenang. Bisa dibenarkan memakai itu, kecuali disini “Wajib” kantor akuntan publik jika memang itu istilahnya audit mau tidak mau ya harus kantor akuntan publik tetapi kantor akuntan publik juga tidak bisa mengaudit apabila si kwartir tidak mempunyai laporan keuangan.

Q: Tetapi selama ini dia punya itu saja, dia punya buku bank, buku kas umum.

A: Tidak bisa, kalau dibidang audit tetap tidak bisa dikategorikan sudah di audit karena memang audit mengontrol keuangan kecuali auditnya dengan kata lain audit khusus atau audit spesial dan yang lain. Kalau audit umum pasti dasarnya laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan,

Q: Kalau dia bentuknya seperti ini kak?

A: Tidak bisa, belum bisa, kalau di bidang review tidak juga. Kalau memeriksa ini mungkin memeriksa benar tidak transaksinya ada, sudah memenuhi SPJ tidak, sudah ada kwitansinya, kepatuhannya.

Q: Untuk LPKnya nanti saya sarankan jika pemeriksaannya bisa memenuhi sebaiknya diperiksa secara menyeluruh nanti LPK yang membuat standar laporannya.

A: Jadi LPK juga punya batas dasar untuk menyalahkan, menegur atau memperbaiki kwartir-kwartir itu. Sama dia dengan organisasi-organisasi pasti punya, seperti LPD di atasnya LPD kan ada yang melakukan pengawasan, di atasnya LPD itu juga harus punya dasar atau standar keuangan LPD itu sendiri. Ada yang lebih tinggi lagi misalnya BPR ada OJK yang mengawasi.

Q: Ya itu saja kak, kenapa penelitian saya tidak bisa kuesioner karena saya ingin mengungkap kenapa LPK sudah dibentuk tetapi belum bekerja jadi istilahnya hanya memenuhi amanat UU dan ADARTnya saja dibentuk tetapi selama ini belum bekerja karena bingung, kalau sudah bingung berlama-lama diam jadinya.

A: LPKnya yang membentuk siapa?

Q: Melalui musyawarah khawatir kak

A: Berarti anggota kwartir dong, bukan di luar itu?

Q: Iya bukan diluar itu, itupun prosedurnya sudah formal kak berdasarkan musyawarah itu kan ada surat ketetapan sidang, nanti untuk pengajuannya harus di lembaga kwartir di atasnya misalnya cabang dikabupaten harus minta rekomendasi Bupati dulu setelah itu diajukan di kwartir daerah nanti daerah yang menerbitkan SK pengurus LPK itu.

A: LPKnya sendiri punya keahlian khusus tidak dibidang tersebut?

Q: Nah itu tidak disebutkan disini, tetapi pada saat musyawarah pemilihan siapa yang berhak diunjuk calon-calon LPK itu ya setidaknya memiliki keahlian dalam bidang keuangan atau hukum, nah selama ini sebagian besar karena pramuka guru-guru pembina Spd kebanyakan mungkin pensiunan kepala sekolah itu yang ditunjuk.

A: Iya mungkin mereka lebih menguasai kependidikannya, keuangan belum berarti kan?

Q: Beliau ditunjuk karena mengetahui mengenai Dana Bos seperti itu.

A: Iya seperti itu karena mereka kan tujuannya untuk mencari dana biar bisa gerak.

Q: Berarti dari laporan yang sudah ada di Buleleng itu maunya nanti saya sampaikan, sajikan begitu, kalau mau yang lain yang belum bekerja bisa meniru setidaknya yang di Buleleng dulu. Nanti bersama-sama menyusun standar dan bagaimana kebijakan. Kalau ini di audit bisa kak?

A: Belum, laporan keuangan tidak ada. Audit Kepatuhan jadinya, audit kepatuhan paling kita nyocokin dengan ADART, Perbup atau apa yang ada. Ini KJA juga seperti sudah melaksanakan itu.

LAMPIRAN 3

SK PENETAPAN LPK KWARTIR SE_BALI

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARDA BALI





KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 012. TAHUN 2020
TENTANG
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
MASA BAKTI 2019-2024**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarda Gerakan Pramuka merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka, yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan kwartir daerah Gerakan Pramuka;
 - b. bahwa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Bali Tahun 2019 telah menetapkan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali masa bakti 2019-2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikukuhkan penetapannya dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Kwarda Gerakan Pramuka Bali Nomor: 359/22-A, tanggal 26 Desember 2019.
 - 2. Rekomendasi Gubernur Bali Nomor 23064 Tahun 2019 Tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Lembaga Keuangan Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019-2024, dengan susunan:

- Ketua** : Dr. Ni Ketut Rasmimi, SE., M.Si., AK., CA
Wakil Ketua : Drs. I Dewa Made Ardana
Anggota : 1. Dr. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
2. Drs. I Putu Santika, M.Pd.
3. I Nengah Atmaja, S.Pd.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dietapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 17 Januari 2020
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL
Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Bali, selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka.
- 2. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB BANGLI

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG GERAKAN PRAMUKA BANGLI TAHUN 2021
NOMOR: 055 / 22.06 - C
TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BANGLI MASA BAKTI 2021 - 2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021,

Menimbang:

1. Bahwa untuk menciptakan transparansi keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangli Masa Bakti 2021-2026
2. Bahwa pembentukan Lembaga Pemeriksa Keuangan perlu dituangkan dalam surat keputusan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021.

Mengingat:

1. Undang - Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang dilaksanakan tanggal 25 – 29 September 2018 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara..
3. Program Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2019 dan Rencana Strategik Gerakan Pramuka Tahun 2019 – 2045
4. Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka yang dilaksanakan tanggal 22 Nopember 2019 di Denpasar
5. Keputusan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangli Nomor 023 / 22.06-E Tahun 2021 tentang Panitia Kegiatan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021 Nomor: 050/22.06-C Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Kwartir Cabang Bangli Dan Syarat Sah Calon, Tim Formatur, Dan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Pramuka Kwartir Cabang Bangli Masa Bakti 2021 - 2026
2. Surat Keputusan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021 Nomor: 045/22.06-C Tentang Pernyataan Kuorum Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021
3. Usulan yang berkembang dalam Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Bangli Tahun 2021



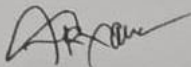
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Mengesahkan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangli Masa Bakti 2021 – 2026 sebagai berikut:
1. I Dewa Ngurah Werdiputra, S.Pd. (Ketua)
 2. I Wayan Sudarma, S.Pd. (Sekretaris)
 3. Ni Ketut Sariani S, S.Pd AUD. (Anggota)
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Bangli
Pada tanggal : 21 Desember 2021
Pukul : 15.25 Wita

PRESIDIUM

Ketua	Sekretaris	Anggota
		
I Putu Eka Pradnyana, S.Pd.	Ni Wayan Nani Sinarsih TKA, S.Pd.H., M.Pd.	Ni Luh Putu Tunjung Ary Wahyuni, S.Pd.

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB BULELENG

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
NOMOR : 033 TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BULELENG
MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2025

- Ketua : Gede Ngurah Omardani, SE.MM.
Wakil Ketua : Kadek Supri Budiadnyana, SE.
Anggota : 1. I Kadek Darsika Aryanta, S.Pd., M.Pd.
2. I Gusti Bagus Adino, S.Pd.
3. Ni Ketut Aryatrini, S.Pd.

Bali, 27 Nopember 2020

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali



SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB DENPASAR



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
NOMOR : 010 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA DENPASAR
MASA BAKTI 2020 - 2025

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang adalah lembaga independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang, yang memiliki tugas dan wewenang membina, mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang;
- b. bahwa Walikota Denpasar telah merekomendasikan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Denpasar Masa Bakti 2020 – 2025;
- c. bahwa pengurus sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka X Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tatakerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
6. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 011 Tahun 2020 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019-2024 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Nomor 002 Tahun 2021 tentang Perubahan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali Masa Bakti 2019-2024.

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar Nomor : 09/2209-C tanggal 26 Februari 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Pengurus dan Permohonan SK Kwarda.
 2. Rekomendasi Walikota Denpasar Nomor : 800/919/DISDIKPORA/2021 tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Denpasar Masa Bakti 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Denpasar Masa Bakti 2020 – 2025, dengan susunan :
- Ketua : Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, S.S., M.Si.
- Wakil Ketua : I Made Sudiasta Adnyana, SH.
- Anggota : I Made Sudarya, SE.
- : I Made Karyana, S.Sos.
- : Franciska Sri Haryanti
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 2 Maret 2021
Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali

Ketua,

I Made Kentin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
2. Gubernur Bali selaku Ketua Mabida.
3. Wakil Gubernur Bali selaku Ketua Harian Mabida.
4. Sekretaris Daerah Bali selaku Sekretaris Mabida.
5. Para Wakil Ketua / Ketua Komisi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali.
6. Para Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang seluruh Bali.

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB GIANYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
NOMOR : 009 TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA GIANYAR
MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2024

- Ketua : 1 Ketut Putra Jaya, S.Pd.
- Wakil Ketua : 1 Nyoman Suartana, S.Pd.
- Anggota : 1. 1 Wayan Mawa, S.Pd., M.Pd.
2. 1 Nyoman Ruba, S.Ag.
3. 1 Gusti Putu Suardiawan, SH.

Denpasar, 9 Maret 2020
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
Made Rentin

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB JEMBRANA



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
NOMOR : 031 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA JEMBRANA
MASA BAKTI 2021 - 2026

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang adalah lembaga independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang, yang memiliki tugas dan wewenang membina, mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang;
- b. bahwa Bupati Jembrana telah merekomendasikan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jembrana Masa Bakti 2021 - 2026;
- c. bahwa pengurus sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka X Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tatakerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
6. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 011 Tahun 2020 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019 - 2024 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Nomor 002 Tahun 2021 tentang Perubahan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali Masa Bakti 2019 - 2024.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Jembrana Nomor : 047 / 22.02 - E tanggal 28 Oktober 2021 perihal Mohon Rekomendasi.
2. Rekomendasi Bupati Jembrana Nomor : 422.5 / 3370 / Dikpora / 2021, tanggal 29 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jembrana Masa Bakti 2021 - 2026, dengan susunan :
Ketua : Ni Nyoman Purnamiati, SE.
Wakil Ketua : Dewa Komang Adi Putra Negara
Anggota : I Kadek Awan Pianata, S.Pd.,M.Pd.
Anggota : Ni Made Dewi Lidyastuti Anggarini, SE.,M.Pd.
Anggota : I Ketut Rita, S.Pd.
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 1 November 2021
Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali
Ketua,

I Made Rontin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
2. Gubernur Bali selaku Ketua Mabida.
3. Wakil Gubernur Bali selaku Ketua Harian Mabida.
4. Sekretaris Daerah Bali selaku Sekretaris Mabida.
5. Para Wakil Ketua / Ketua Komisi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali.
6. Para Bupati / Walikota seluruh Bali selaku Ketua Mabicab.
7. Para Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang seluruh Bali.

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB KARANGASEM



BUPATI KARANGASEM

REKOMENDASI

NOMOR : 427/1551/KPO/DISDIKPOR/SETDA

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KARANGASEM
MASA BAKTI 2022 - 2027

Bahwa Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh Musyawarah Gerakan Pramuka dan Berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Bupati Karangasem selaku Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Karangasem, merekomendasikan Susunan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Karangasem Masa Bakti 2022 - 2027 sebagai berikut :

Ketua : I Komang Budiarta, SE
Wakil Ketua : I Ketut Juniarsa Wijaya, S.STP, M.AP
Anggota : 1. I Gusti Made Artha Wijaya, ST
2. I Putu Wirasanjaya, S.Pd.,M.M
3. Dra. Desak Putu Ariyati

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai dasar permohonan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Karangasem.

Karangasem, 25 April 2022

BUPATI KARANGASEM,
SELAKU KETUA MAJELIS
PEMBIMBING KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KARANGASEM

& I GEDE DANA, S.Pd.,M.Si

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB KLUNGKUNG



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
NOMOR : 014 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KLUNGKUNG
MASA BAKTI 2021 - 2026

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang adalah lembaga independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang, yang memiliki tugas dan wewenang membina, mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
- b. bahwa Bupati Klungkung telah merekomendasikan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Klungkung Masa Bakti 2021 - 2026;
- c. bahwa pengurus sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka X Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tatakerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 145 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka;

SK LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN KWARCAB TABANAN



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA BALI
NOMOR : 026 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA TABANAN
MASA BAKTI 2020 - 2025

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang adalah lembaga independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang, yang memiliki tugas dan wewenang membina, mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang;
- b. bahwa Bupati Tabanan telah merekomendasikan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tabanan Masa Bakti 2020 - 2025;
- c. bahwa pengurus sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka X Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tatakerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
6. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 011 Tahun 2020 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019 - 2024 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Nomor 002 Tahun 2021 tentang Perubahan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali Masa Bakti 2019 - 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tabanan Nomor : 20/22.02.C tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Pengurus dan Permohonan SK Kwarda.
 2. Rekomendasi Bupati Tabanan Nomor : 027/4798/Disdik TAHUN 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tabanan, Susunan Keanggotaan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tabanan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tabanan Masa Bakti 2020 - 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tabanan Masa Bakti 2020 - 2025, dengan susunan :
- Ketua : Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.
- Wakil Ketua : I Nengah Wisnu Wardana, S.IP.
- Anggota : I Gusti Nyoman Susila, SH.
- : I Nyoman Adi Saputra, S.Pd.
- : I Nengah Sumayasa, S.Pd., M.Pd.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 15 Oktober 2021
Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali

Ketua,

I Made Kertin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
2. Gubernur Bali selaku Ketua Mabida.
3. Wakil Gubernur Bali selaku Ketua Harian Mabida.
4. Sekretaris Daerah Bali selaku Sekretaris Mabida.
5. Para Wakil Ketua / Ketua Komisi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali.
6. Para Bupati / Walikota seluruh Bali selaku Ketua Mabicab.

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF

(Interview Guide)

Judul Penelitian : Peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali

Nama Peneliti : I Gede Aristana Diputra

Lokasi Penelitian : Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali

A. Kisi – Kisi dan Pertanyaan Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pengelolaan dana dari pemerintah, intern dan publik di lingkungan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali?

Topik Bahasan	Sub Topik / Aspek	Pertanyaan Wawancara
Proses Pengelolaan Dana Pemerintah	Sumber Dana	<ol style="list-style-type: none">1. Darimana (SKPD) sumber dana pemerintah diperoleh?2. Bagaimana proses pengajuan dana hibah pemerintah?3. Sejak kapan mendapatkan dana pemerintah?4. Berapa besaran dana yang diperoleh?
	Pengelolaan Dana	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana alur / proses pengelolaan dana yang diperoleh dari pemerintah?2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana pemerintah?3. Apakah ada pelaksanaan Perencanaan Keuangan dan Anggaran (<i>Budgeting</i>) dan Pengendalian Keuangan (<i>Controlling</i>)?4. Apa saja dan bagaimana bentuk dari Pelaporan Keuangan (<i>Reporting</i>) di Kwartir?

		5. Apa saja aturan yang menjadi standar kwartir dalam membentuk atau membuat laporan keuangan tersebut?
Pengelolaan Dana Intern dan atau Dana Publik	Sumber Dana dan Pengelolaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sumber dana yang diperoleh selain dana pemerintah? 2. Apakah kwartir memiliki badan usaha? 3. Apakah kwartir akan membentuk koperasi? 4. Apakah kwartir pernah melakukan kegiatan penggalan dana? 5. Apakah kwartir pernah memungut uang kegiatan atau pendaftaran peserat dalam kegiatan? 6. Apakah kwartir pernah menerima sumbangan baik dari anggota maupun masyarakat? 7. Berdasarkan jawaban “Iya”, Bagaimanakah proses pencatatan dan pengelolaan keuangannya? 8. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan usaha intern dan atau dana publik?

usan Masalah 2

Bagaimanakah peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pramuka dan implementasi pengawasan serta pemeriksaan keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali?

Topik Bahasan	Sub Topik / Aspek	Pertanyaan Wawancara
Peran Lembaga Pemeriksa	Pengetahuan dan keberadaan LPK di	1. Apakah LPK sudah dibentuk di kwartir?

Keuangan (LPK) Pramuka	lingkungan kwartir	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana proses pembentukan LPK? 3. Apa saja yang menjadi indikator pemilihan atau persyaratan seorang anggota LPK? 4. Bagaimana proses pemilihan ketua LPK? 5. Apakah menurut anda LPK sudah memenuhi kriteria independensi? 6. Apakah LPK sudah bekerja? 7. Apakah menurut pendapat saudara LPK di kwartir sudah kompeten dalam bidangnya?
	Tugas Pokok dan Fungsi LPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tugas pokok dan fungsi dari LPK? 2. Apakah LPK sudah bekerja? 3. Apa dasar LPK melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan? 4. Jika LPK belum bekerja: Apa yang menyebabkan LPK belum bekerja sampai saat ini? 5. Apakah LPK mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan kwartir dengan baik? 6. Apakah LPK ada melaksanakan tugas lain selain pemeriksaan keuangan kwartir?
Implementasi pengawasan serta pemeriksaan keuangan Kwartir	Pengawasan dan pemeriksaan oleh LPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah proses pengawasan keuangan oleh LPK? 2. Bagaimanakah proses pemeriksaan keuangan oleh LPK? 3. Apa saja yang menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan keuangan oleh LPK? 4. Apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh kwartir saat ini dalam pengelolaan dana? 5. Apa saja yang menjadi acuan LPK dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan? 6. Apa saja aturan atau standar yang

		<p>menjadi acuan LPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan?</p> <p>7. Apakah LPK pernah menggunakan jasa akuntan publik?</p> <p>8. Jika LPK sudah bekerja: apa saja laporan hasil pemeriksaan yang dibuat?</p> <p>9. Secara keseluruhan dan akhir pemeriksaan apakah LPK ikut bertanggungjawab terhadap bagaimana proses pengelolaan keuangan kwartir dan temuan-temuannya?</p> <p>10. Apakah LPK bertanggungjawab terhadap temuan-temuan kekeliruan dalam proses pengelolaan dan hasil keuangan kwatir?</p>
--	--	---

usan Masalah 3

Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali?

Topik Bahasan	Sub Topik / Aspek	Pertanyaan Wawancara
Akuntabilitas keuangan kwartir	Transaransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah seluruh pengurus kwartir dilibatkan (<i>participation</i>) dalam proses pengelolaan keuangan? 2. Apakah seluruh pengurus kwartir dapat mengakses data keuangan kwartir? 3. Apakah masyarakat /pemerintah /pemangku kepentingan dapat mengaskses data keuangan kwartir? 4. Apakah dalam musyawarah

		pertanggungjawaban semua komponen pemangku kepentingan dilibatkan?
	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kwartir selalu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan atau pengurus tahunan? 2. Apakah kwartir membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (kwartir → pemerintah) (kwarcab→kwarda), (kwarda→ kwarnas)? 3. Apakah kwartir melaksanakan musyawarah anggota untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangannya? 4. Apakah laporan pertanggungjawaban kwartir diperiksa oleh LPK? 5. Apakah laporan keuangan yang dibahas dalam musyawarah anggota adalah laporan yang sudah melalui hasil pemeriksaan LPK? 6. Apakah setiap kegiatan ada laporan pertanggungjawaban keuangannya? 7. Aturan-aturan apa saja yang harus dipenuhi oleh kwartir dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kwartir? 8. Apakah laporan keuangan kwartir saat ini sudah memenuhi aturan dan prosedur tersebut? 9. Apakah ada laporan tentang anggaran dan realisasi keuangan terkait dengan efisiensi? 10. Secara keseluruhan apakah menurut anda kwartir sudah

		menerapkan akuntabilitas keuangan?
--	--	------------------------------------

usan Masalah 4

Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali?

Topik Bahasan	Sub Topik / Aspek	Pertanyaan Wawancara
Kendala dan hambatan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Kwartir	Kendala dan hambatan dalam pengelolaan keuangan kwartir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apakah pengelolaan keuangan kwartir saat ini sudah baik dan benar? 2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan kwartir dalam melakukan pengelolaan keuangan? 3. Bagaimana cara mengatasi kendala dan hambatan tersebut?
	Kendala dan hambatan dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan kwartir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apakah LPK sudah melaksanakan proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan dengan baik? 2. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan LPK dalam melaksanakan proses pemeriksaan keuangan kwartir? 3. Bagaimana cara mengatasi kendala dan hambatan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari :
2. Waktu mulai dan selesai :

II. Identitas Informan

1. Nama Informan :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan/kwartir :
5. Pendidikan terakhir :

III. Pertanyaan penelitian:

1. Darimana (SKPD) sumber dana pemerintah diperoleh?
2. Bagaimana proses pengajuan dana hibah pemerintah?
3. Sejak kapan mendapatkan dana pemerintah?
4. Berapa besaran dana yang diperoleh?
5. Bagaimana alur / proses pengelolaan dana yang diperoleh dari pemerintah?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana pemerintah?
7. Apakah ada pelaksanaan Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*) dan Pengendalian Keuangan (*Controlling*)?
8. Apa saja dan bagaimana bentuk dari Pelaporan Keuangan (*Reporting*) di Kwartir?
9. Apa saja aturan yang menjadi standar kwartir dalam membentuk atau membuat laporan keuangan tersebut?
10. Apakah ada sumber dana yang diperoleh selain dana pemerintah?
11. Apakah kwartir memiliki badan usaha?
12. Apakah kwartir akan membentuk koperasi?
13. Apakah kwartir pernah melakukan kegiatan penggalan dana?

14. Apakah kwartir pernah memungut uang kegiatan atau pendaftaran peserat dalam kegiatan?
15. Apakah kwartir pernah menerima sumbangan baik dari anggota maupun masyarakat?
16. Berdasarkan jawaban “Iya”, Bagaimanakah proses pencatatan dan pengelolaan keuangannya?
17. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan usaha intern dan atau dana publik?
18. Apakah LPK sudah dibentuk di kwartir?
19. Bagaimana proses pembentukan LPK?
20. Apa saja yang menjadi indikator pemilihan atau persyaratan seorang anggota LPK?
21. Bagaimana proses pemilihan ketua LPK?
22. Apakah menurut anda LPK sudah memenuhi kriteria independensi?
23. Apakah LPK sudah bekerja?
24. Apakah menurut pendapat saudara LPK di kwartir sudah kompeten dalam bidangnya?
25. Apa saja tugas pokok dan fungsi dari LPK?
26. Apakah LPK sudah bekerja?
27. Apa dasar LPK melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan?
28. Jika LPK belum bekerja: Apa yang menyebabkan LPK belum bekerja sampai saat ini?
29. Apakah LPK mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan kwatir dengan baik?
30. Apakah LPK ada melaksanakan tugas lain selain pemeriksaan keuangan kwartir?
31. Bagaimanakah proses pengawasan keuangan oleh LPK?
32. Bagaimanakah proses pemeriksaan keuangan oleh LPK?
33. Apa saja yang menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan keuangan oleh LPK?
34. Apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh kwatir saat ini dalam pengelolaan dana?
35. Apa saja yang menjadi acuan LPK dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan?
36. Apa saja aturan atau standar yang menjadi acuan LPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan?
37. Apakah LPK pernah menggunakan jasa akuntan publik?
38. Jika LPK sudah bekerja: apa saja laporan hasil pemeriksaan yang

dibuat?

39. Secara keseluruhan dan akhir pemeriksaan apakah LPK ikut bertanggungjawab terhadap bagaimana proses pengelolaan keuangan kwartir dan temuan-temuannya?
40. Apakah LPK bertanggungjawab terhadap temuan-temuan kekeliruan dalam proses pengelolaan dan hasil keuangan kwartir? Apakah seluruh pengurus kwartir dilibatkan (*participation*) dalam proses pengelolaan keuangan?
41. Apakah seluruh pengurus kwartir dapat mengakses data keuangan kwartir?
42. Apakah masyarakat /pemerintah /pemangku kepentingan dapat mengakses data keuangan kwartir?
43. Apakah dalam musyawarah pertanggungjawaban semua komponen pemangku kepentingan dilibatkan?
44. Apakah kwartir selalu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan atau pengurus tahunan?
45. Apakah kwartir membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (kwartir → pemerintah) (kwarcab→kwarda), (kwarda→ kwarnas)?
46. Apakah kwartir melaksanakan musyawarah anggota untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangannya?
47. Apakah laporan pertanggungjawaban kwartir diperiksa oleh LPK?
48. Apakah laporan keuangan yang dibahas dalam musyawarah anggota adalah laporan yang sudah melalui hasil pemeriksaan LPK?
49. Apakah setiap kegiatan ada laporan pertanggungjawaban keuangannya?
50. Aturan-aturan apa saja yang harus dipenuhi oleh kwartir dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kwartir?
51. Apakah laporan keuangan kwartir saat ini sudah memenuhi aturan dan prosesur tersebut?
52. Apakah ada laporan tentang anggaran dan realisasi keuangan terkait dengan efisiensi?
53. Secara keseluruhan apakah menurut anda kwartir sudah menerapkan akuntabilitas keuangan?
54. Menurut anda apakah pengelolaan keuangan kwartir saat ini sudah baik dan benar?
55. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan kwartir dalam melakukan pengelolaan keuangan?
56. Bagaimana cara mengatasi kendala dan hambatan tersebut?
57. Menurut anda apakah LPK sudah melaksanakan proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan dengan baik?
58. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan LPK dalam melaksanakan proses pemeriksaan keuangan kwartir?

59. Bagaimana cara mengatasi kendala dan hambatan tersebut?

IV. Jawaban Informan



